



DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN
CILACAP



KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR

Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perkotaan Maos
Kabupaten Cilacap

DOKUMEN ADMINISTRASI

2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Hidayah-Nya dan kekuatan lahir batin sehingga Dokumen Administrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2022–2041 ini dapat terselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuannya sehingga penyusunan KLHS RDTR ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Proses penyusunan KLHS dilakukan mengacu peraturan perundangan yang berlaku. Dalam setiap tahapannya dilakukan berbagai kegiatan dan didokumentasikan sebagai bukti bahwa proses dan tahapan penyusunan KLHS ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/2017. Pokok kegiatan yang harus dilakukan antara lain :

- 1) Pembentukan tim pembuat KLHS RDTR;
- 2) Perumusan dan Pengkajian Isu Pembangunan Berkelanjutan;
- 3) Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP)
- 4) Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan; dan
- 5) Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

Proses dalam setiap tahapan tersebut dibuat dalam Buku Lampiran tersendiri yang bagian dari satu kesatuan dengan Buku Laporan KLHS.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2022–2041 diucapkan terima kasih, dengan cita-cita semoga mampu mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan di Kabupaten Cilacap.

Cilacap, 4 November 2022


BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
LAMPIRAN 1 : SK POKJA PL PENYUSUN KLHS	1
LAMPIRAN 2 : KERANGKA ACUAN KERJA KLHS.....	7
LAMPIRAN 3 : BUKTI PEMENUHAN STANDAR KOMPETENSI PENYUSUN KLHS	16
LAMPIRAN 4 : PROSIDING KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK I	36
LAMPIRAN 5 : PROSIDING FGD 1	56
LAMPIRAN 6 : PROSIDING FGD 2	76
LAMPIRAN 7 : PROSIDING KONSULTASI PUBLIK II	95
LAMPIRAN 9 : PENJAMINAN KUALITAS KLHS.....	125
LAMPIRAN 10 : VALIDASI KLHS.....	146



DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN
CILACAP



KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RDTR

Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perkotaan Maos
Kabupaten Cilacap

LAMPIRAN **1**

**SURAT KEPUTUSAN (SK)
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUN KLHS**



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 660.1/ **533** /24/TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAOS
DAN KAWASAN PERKOTAAN SIDAREJA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Maos dan Kawasan Perkotaan Sidareja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419),
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 105);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 131);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Maos dan Kawasan Perkotaan Sidareja, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lingkup Kegiatan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Maos dan Kawasan Perkotaan Sidareja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- a. identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan;
 - b. isu pembangunan yang paling strategis;
 - c. isu pembangunan berkelanjutan prioritas;
 - d. identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan pengaruh pada lingkungan hidup;
 - e. analisis pengaruh hasil isu pembangunan berkelanjutan prioritas dengan materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program;
 - f. kajian muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - g. rumusan alternatif;
 - h. penyusunan rekomendasi;
 - i. penjaminan kualitas;
 - j. pendokumentasian dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas merencanakan, melaksanakan, monitoring, dan evaluasi kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Maos dan Kawasan Perkotaan Sidareja
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 dengan Kode Kegiatan / Kode Rekening 2.11.02.2.02.01.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 30 JUN 2022

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
 NOMOR : 660.1/ **533** /24/TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN MAOS DAN
 KAWASAN PERKOTAAN SIDAREJA

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAOS
 DAN KAWASAN PERKOTAAN SIDAREJA

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap	Anggota
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap	Anggota
6.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	Anggota
9.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	Anggota
11.	Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	Anggota
12.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap	Anggota
13.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	Anggota
14.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap	Anggota
15.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap	Anggota
16.	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Anggota
17.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Anggota
18.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Anggota
19.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap	Anggota

1	2	3
20.	Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap	Anggota
21.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda selaku Subkoordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Anggota
22.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda selaku Subkoordinator Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Anggota
23.	Camat Maos	Anggota
24.	Camat Sidareja	Anggota
25.	Tenaga Ahli yang ditunjuk	Anggota



BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI



DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN
CILACAP



KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RDTR

Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perkotaan Maos
Kabupaten Cilacap

LAMPIRAN **2**

**KERANGKA ACUAN
KERJA (KAK)**



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	
PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN MAOS	
UNIT	: DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
KODE PROGRAM	: 02.11.02
NAMA PROGRAM	: PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
KODE KEGIATAN	: 2.11.02.2.02
NAMA KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/ KOTA
NAMA SUB KEGIATAN	: PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RENCANA TATA RUANG
KODE SUB KEGIATAN	: 2.11.02.2.02.01
PEKERJAAN	: PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN MAOS

URAIAN PENDAHULUAN

Latar Belakang	<p>Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p><i>Mainstreaming</i> pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai landasan operasional pelaksanaan pembangunan baik dalam RPJP maupun RPJMD. Lebih dari itu, UUD 1945, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan arti pentingnya lingkungan hidup.</p> <p>Pendekatan konsep keruangan sangat identik dengan fenomena lingkungan hidup yang dinamis dan sistemik. Penataan ruang meliputi kegiatan dalam sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkaitan satu sama lainnya bersifat sekuensial. Pemahaman bahwa sistem ini merupakan siklus menyebabkan hasil-hasil yang diperoleh dari proses perencanaan tata ruang ditempatkan sebagai acuan dari kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rencana tata ruang wilayah adalah wujud formal kebijakan, rencana dan program (KRP) yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah tertentu.</p> <p>Dalam dua dekade terakhir kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Banyak faktor penyebabnya antara lain demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya hingga faktor institusi dan politik. Salah satu jalan keluar yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah dimaksud adalah perlunya tindakan strategik yang dapat menuntun, mengarahkan dan menjamin lahirnya kebijakan, rencana dan program yang secara inheren mempertimbangkan efek negatif terhadap lingkungan dan menjamin keberlanjutan.</p>
-----------------------	--

	<p>Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dibentuk untuk memperbaiki politik dan tata kelola lingkungan hidup, dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada level pengambil keputusan yang bersifat strategis yaitu pada level kebijakan, rencana dan program. Sebagaimana diamanatkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau pogram.</p> <p>UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 - 2021, mengamanatkan bahwa Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai dokumen perencanaan tata ruang. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten ke dalam rencana distribusi pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan perkotaan maupun kawasan fungsional kabupaten. Dengan kata lain RDTR Kabupaten mempunyai fungsi untuk mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang di atasnya dalam mewujudkan ruang.</p> <p>Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk dokumen RDTR sebagai instrumen untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan disusun sebagai bentuk antisipasi dan konsekuensi kebijakan, rencana dan program dalam Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Maos terhadap lingkungan hidup serta memenuhi kebutuhan akan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p>
<p>Capaian Program dan Keluaran</p>	<p>a. Capaian Program Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku</p> <p>b. Keluaran Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan Maos, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil identifikasi pemangku kepentingan 2. Hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan pada konsultasi publik 3. Hasil analisis isu pembangunan yang paling strategis dan isu pembangunan prioritas 4. Hasil identifikasi muatan kebijakan, rencana dan program yang menimbulkan pengaruh pada lingkungan hidup 5. Hasil analisis pengaruh isu pembangunan prioritas dengan materi muatan kebijakan, rencana dan program 6. Hasil kajian muatan KLHS berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Jasa Ekosistem, Sumber Daya Alam, Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati dan Resiko Dampak Lingkungan Hidup 7. Hasil perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program 8. Hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan program 9. Hasil penjaminan kualitas

	10. Hasil pendokumentasian KLHS 11. Validasi KLHS
Sasaran	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan Maos.
Lokasi Kegiatan	Kawasan Perkotaan Kecamatan Maos
Sumber pendanaan	Biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan Maos bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 58.484.900 (lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan kode rekening 2.11.02.2.02.01.5.1.2.02.08.0032
Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Sri Murniyati, ST, M.Si Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
Wilayah Studi	Kawasan Perkotaan Kecamatan Maos
DATA PENUNJANG	
Data Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap. 2. Data Rancangan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. 3. Data Kajian Geolistrik 4. Data Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah 5. Data statistik dari BPS Kabupaten Cilacap. 6. Data dalam dokumen RDTR Perkotaan Maos 7. Data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cilacap 8. Data Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap 9. Data Kajian Lingkungan Hidup Strategis 10. Data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Cilacap 11. Data RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 12. Data lain yang terkait
Standar Teknis	Standar teknis yang harus dipenuhi adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Studi Terdahulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi dalam rangka penyusunan KLHS RTRW Tahun 2011- 2031 2. Studi lain yang terkait

Referensi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
-----------------	---

RUANG LINGKUP

Lingkup Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan isu Pembangunan Berkelanjutan b. Pengkajian kebijakan, rencana dan program dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos c. Menentukan mitigasi dan / atau alternatif kebijakan, rencana dan program dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos d. Memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan, rencana dan program dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos e. Melakukan penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos. f. Validasi atas penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos.
------------------	---

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Jam kerja 8 jam per hari atau dapat ditambah sesuai kebutuhan untuk mempercepat proses pekerjaan.
-----------------------------------	---

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BULAN KE-		
		1	2	3
1.	Persiapan pekerjaan			
2.	Laporan pendahuluan			
3.	Konsultasi Publik :			
	Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan			
	Identifikasi Pembangunan Berkelanjutan yang Paling Strategis			
	Identifikasi Pembangunan Berkelanjutan Prioritas			
4.	Identifikasi Materi Muatan KRP			
5.	Materi Muatan KRP yang berdampak			
6.	Analisis pengaruh D3TLH, Risiko, Jasa			

	<p>f. Melakukan penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos.</p> <p>g. Menyusun rancangan validasi KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos</p> <p>h. Menyusun dan memaparkan laporan KLHS.</p>
Pendekatan dan Metodologi	<p>Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap dilakukan oleh penyedia jasa konsultansi sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2016 dan PerMenLHK Nomor : P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017</p> <p>Ketentuan lain mengikuti Dokumen Pengadaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.</p>
Kualifikasi Badan Usaha/Penyedia	<p>Klasifikasi : Kecil</p> <p>Sub Klasifikasi : Jasa Konsultasi Lingkungan (KL 401) / Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL (KBLI 74909)</p>
Kualifikasi Tenaga Ahli	<p>Beberapa tenaga ahli dan tenaga pendukung sebagai berikut :</p> <p>A. Tenaga Ahli :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Lingkungan Posisi : Ketua Tim Kualifikasi : Ahli bidang Lingkungan, minimal berpendidikan S1/ S2 Teknik Lingkungan/ Kesehatan Lingkungan / Ilmu Lingkungan yang memiliki pengalaman kerja dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun dan pernah menyusun KLHS Rencana Tata Ruang. Jumlah : 1 orang dengan lama kerja 3 bulan (3 OB) 2. Ahli Lingkungan Posisi : Anggota Tim Kualifikasi : Ahli bidang Lingkungan, minimal berpendidikan S1 Teknik Lingkungan/ Kesehatan Lingkungan / Ilmu Lingkungan yang memiliki pengalaman kerja dibidangnya minimal 2 (dua) tahun Jumlah : 1 orang dengan lama kerja 3 bulan (3 OB) 3. Ahli Perencanaan Wilayah Kota Posisi : Anggota Tim Kualifikasi : Ahli bidang perencanaan wilayah kota, minimal berpendidikan S1 bidang perencanaan wilayah kota dan memiliki pengalaman kerja dibidangnya minimal 2 (dua) tahun Jumlah : 1 orang dengan lama kerja 3 bulan (3 OB) <p>B. Tenaga Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Berjumlah 1 orang dengan lama kerja 3 bulan (3 OB), disyaratkan berpendidikan sekurang-kurangnya SMA/ SMK

<p>Pedoman Pengumpulan Data Lapangan</p>	<p>Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tahapan Persiapan Survey. Tahapan persiapan survey dilakukan dengan tahapan: pengkajian data dan hasil/study literatur terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis, mempersiapkan daftar kebutuhan data/informasi, questioner, organisasi kerja serta surat tugas 2 Tahapan Survey Tahapan survey adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Survey data instansional; berupa pengumpulan/perekaman dari data sekunder untuk mendapatkan data angka, dan informasi berkaitan dengan materi kajian. b. Survey lapangan ; mencakup survey lokasi perencanaan yang terdiri dari perbandingan data instansional dengan keadaan yang sebenarnya tentang kondisi lapangan, c. <i>Interview</i>; untuk melengkapi kedua survey tersebut guna memperoleh bahan atau keterangan yang lebih rinci yang belum terekam. 3 Pengolahan Data Untuk keperluan prakiraan dan evaluasi maupun perolehan materi data dilakukan pengumpulan analisis data yang relevan (dapat menjamin <i>reliability</i> dan <i>validity</i>) dari setiap komponen yang dikaji. Sehingga hasil identifikasi, prakiraan dan evaluasi data dapat dijadikan landasan dalam penyusunan laporan kegiatan.
<p>Pelaporan Hasil Pekerjaan</p>	<p>Seluruh hasil pekerjaan akan dibuat pelaporan dalam Bahasa Indonesia yang terdiri dari sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan pendahuluan Berisikan alasan dan dasar pelaksanaan KLHS, proses KLHS, identifikasi pemangku kepentingan, rencana pelaksanaan konsultasi publik. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya satu minggu setelah jadwal pendahuluan sebanyak 3 (tiga) buku laporan pendahuluan. b. Laporan antara Berisikan deskripsi kegiatan, hasil pelaksanaan konsultasi publik, hasil isu pembangunan berkelanjutan, isu pembangunan berkelanjutan strategis dan isu prioritas, hasil identifikasi muatan KRP yang menimbulkan pengaruh pada lingkungan hidup, rencana analisis pengaruh isu pembangunan prioritas dengan materi muatan KRP, rencana kajian muatan KLHS, rencana perumusan alternatif dan rekomendasi perbaikan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya satu minggu setelah jadwal antara sebanyak 3 (tiga) buku laporan antara. c. Laporan akhir Berisi hasil laporan pendahuluan dan laporan antara dan ditambahkan hasil analisis pengaruh isu pembangunan prioritas dengan materi muatan KRP, hasil kajian muatan KLHS, hasil perumusan alternatif dan rekomendasi perbaikan serta validasi KLHS. Sistematika/kerangka laporan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P. 69/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 5 (lima) buku laporan akhir d. Flashdisk berisi tentang softcopy seluruh produk yang dihasilkan sebanyak 2 buah.

Penutup	<p>Dengan tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat kebijakan, rencana dan program (KRP) yang mengatur penataan ruang dan mengoptimalkan dampak positif sekaligus sebagai komitmen pemerintah dalam melaksanakan amanat pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Demikian Kerangka acuan ini disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Hal hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut akan ditindaklanjuti pada acara <i>Anwizing</i>.</p>
---------	---

Cilacap, Mei 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cilacap

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



SRI MURNIYATI, ST., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700910 199703 2 005



DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN
CILACAP



KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RDTR

Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perkotaan Maos
Kabupaten Cilacap

LAMPIRAN **3**

**BUKTI PEMENUHAN
STANDAR KOMPETENSI
PENYUSUN KLHS**



Ketua Tim

Tenaga Ahli Lingkungan Hidup | Alex Luqman S.W., S.T., M.Si.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi : Team Leader/Ahli Lingkungan
2. Nama Perusahaan : CV. Ideal Mandiri Consultant
3. Nama Personil : Alex Luqman Setio Wibowo, S.T.,
M.Si.
4. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 20 Desember 1973
5. Pendidikan : Sarjana Teknik Lingkungan, Sekolah
Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta,
tahun 1997
S2 Teknik Lingkungan Universitas
Sebelas Maret Surakarta Tahun 2014
6. Pendidikan Non Formal :
7. Penguasaan Bahasa Inggris : Baik
8. Pengalaman Kerja :

Tahun 2021

- a. Nama Proyek : Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan Provinsi
Sulawesi Utara
- b. Lokasi Proyek : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- c. Pengguna Jasa : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan
- d. Nama Perusahaan : CV. Spulu' 83
- e. Uraian Tugas : Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli dalam
penyusunan dan pembahasan rencana
kerja dan alokasi kegiatan
Bertanggungjawab atas tercapainya
tujuan dan sasaran dari kegiatan.

- Mengkoordinasi penyusunan laporan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam KAK dan kontrak kerja sama.
Mempresentasikan hasil kegiatan
- f. Waktu Pelaksanaan : 1 Juli – 31 Desember 2020 (6 bulan)
- g. Posisi Penugasan : Ahli Lingkungan
- h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tidak Tetap
- Surat Referensi Pengguna Jasa :

Tahun 2020

- a. Nama Proyek : Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta
- b. Lokasi Proyek : Kabupaten Gunungkidul
- c. Pengguna Jasa : Bappeda Kabupaten Gunungkidul
- d. Nama Perusahaan : CV. Ideal Mandiri Consultant
- e. Uraian Tugas : Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli dalam penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan alokasi kegiatan
Bertanggungjawab atas tercapainya tujuan dan sasaran dari kegiatan.
Mengkoordinasi penyusunan laporan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam KAK dan kontrak kerja sama.
Mempresentasikan hasil kegiatan
- f. Waktu Pelaksanaan : 1 Juli – 31 Desember 2020 (6 bulan)
- g. Posisi Penugasan : Team leader/ Ahli Lingkungan
- h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tetap
- i. Surat Referensi Pengguna Jasa :

Tahun 2020

- a. Nama Proyek : Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara
- b. Lokasi Proyek : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- c. Pengguna Jasa : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- d. Nama Perusahaan : Cipta Prima Engineering
- e. Uraian Tugas : Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli dalam penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan alokasi kegiatan Bertanggungjawab atas tercapainya tujuan dan sasaran dari kegiatan. Mengkoordinasi penyusunan laporan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam KAK dan kontrak kerja sama. Mempresentasikan hasil kegiatan
- f. Waktu Pelaksanaan : 1 September – 31 Desember 2020 (4 bulan)
- g. Posisi Penugasan : Team leader/ Ahli Lingkungan
- h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi Pengguna Jasa :

Tahun 2019

- a. Nama Proyek : Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Adipala dan Kawasan Perkotaan Sampang Kabupaten Cilacap
- b. Lokasi Proyek : Kabupaten Cilacap
- c. Pengguna Jasa : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

- d. Nama Perusahaan : CV. Ideal Mandiri Consultant
- e. Uraian Tugas : Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli dalam penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan alokasi kegiatan Bertanggungjawab atas tercapainya tujuan dan sasaran dari kegiatan. Mengkoordinasi penyusunan laporan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam KAK dan kontrak kerja sama. Mempresentasikan hasil kegiatan
Waktu Pelaksanaan : 1 September – 31 November 2019 (3 bulan)
- f. Posisi Penugasan : Team leader/ Ahli Lingkungan
- g. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tetap
- h. Surat Referensi Pengguna Jasa :

Tahun 2018

- a. Nama Proyek : Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap
- b. Lokasi Proyek : Kabupaten Cilacap
- c. Pengguna Jasa : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cilacap
- d. Nama Perusahaan : CV. Tampomas 15
- e. Uraian Tugas : Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli dalam penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan alokasi kegiatan kepada masing-masing tenaga ahli. Bertanggungjawab atas tercapainya tujuan dan sasaran dari kegiatan, Mengkoordinasi penyusunan laporan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam KAK dan kontrak kerja sama.

- Mempresentasikan hasil kegiatan yang dilaksanakan.
- f. Waktu Pelaksanaan : 1 Agustus – 31 November 2018 (4 bulan)
- g. Posisi Penugasan : Ahli Lingkungan
- h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi Pengguna Jasa : -

Tahun 2017

- a. Nama Proyek : Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen
- b. Lokasi Proyek : Kabupaten Sragen
- c. Pengguna Jasa : Bappeda Kab. Sragen
- d. Nama Perusahaan : PT. Duta Citra
- e. Uraian Tugas : Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli dalam penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan alokasi kegiatan kepada masing-masing tenaga ahli. Bertanggungjawab atas tercapainya tujuan dan sasaran dari kegiatan, Mengkoordinasi penyusunan laporan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam KAK dan kontrak kerja sama. Mempresentasikan hasil kegiatan yang dilaksanakan.
- f. Waktu Pelaksanaan : 1 Agustus – 31 November 2017 (4 bulan)
- g. Posisi Penugasan : Team Leader/Ahli Lingkungan
- h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tidak Tetap
- Surat Referensi Pengguna Jasa : -

Tahun 2017

- a. Nama Proyek : Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen
- b. Lokasi Proyek : Kabupaten Sragen
- c. Pengguna Jasa : Bappeda Kab. Sragen
- d. Nama Perusahaan : PT. Duta Citra
- e. Uraian Tugas : Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli dalam penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan alokasi kegiatan kepada masing-masing tenaga ahli. Bertanggungjawab atas tercapainya tujuan dan sasaran dari kegiatan, Mengkoordinasi penyusunan laporan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam KAK dan kontrak kerja sama. Mempresentasikan hasil kegiatan yang dilaksanakan.
- f. Waktu Pelaksanaan : 1 Februari – 31 Mei 2017 (4 bulan)
- g. Posisi Penugasan : Team Leader/ Ahli Lingkungan
- h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tidak Tetap
- Surat Referensi Pengguna Jasa : -

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

MENYATAKAN BAHWA :

- Alex Lugman Setio Wigowo -

NRM : A131208001

LAHIR DI

Surakarta

TANGGAL

20 Desember 1973

TELAH MENYELESAIKAN DAN MEMENUHI SEMUA SYARAT PENDIDIKAN

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PROGRAM STUDI : Ilmu Lingkungan

KEPADANYA DIBERIKAN GELAR

MAGISTER SAINS (M.Si.)

BESERTA SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT PADA GELAR TERSEBUT.

DIBERIKAN DI SURAKARTA PADA TANGGAL **Dua Puluh Delapan Oktober Dua Ribu Empat Belas**

DIREKTUR

Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.
NIP 19610717 198601 1 001



REKTOR



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP 19570707 198103 1 006



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

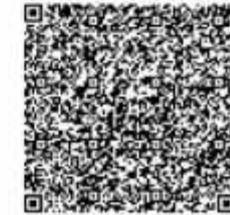
Nama : **ALEX LUQMAN SETIO WIBOWO, ST. MSI.**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI TEKNIK LINGKUNGAN - MADYA

Nomor Registrasi
1.5.501.2.088.11.1059377

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 6 November 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 5 November 2022.



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 6 November 2019

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Jawa Tengah
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif
Nur Atimah, SE

Keabsahan
1. QR Code dan Data yang tertera dalam SEA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memuat tanda tangan basah karena telah dipertanggung-jawabkan secara elektronik (Digital Signature)

SERTIFIKAT

02a.0035/GN/X/2021

Diberikan Kepada

Alex Luqman Setio Wibowo, S.T., M.Si.

Atas Partisipasi Sebagai

PESERTA

Pelatihan "Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)"

Pada 22-24 Oktober 2021



Dr. Luthfi Muta'ali, S.Si., MSP
Pemateri Utama

Arif Kurniawan, S.Si
Direktur Greenative

Halaman 1-2

PELATIHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

22-24 Oktober 2021

METODE PELATIHAN DARING

	Materi	Jam Pelajaran (JPL)
1	Administrasi KLHS (Pra dan Pasca KLHS)	1 JPL
2	Proses Penyusunan KLHS RTRW dan RPJMD	1 JPL
3	Metode Penyusunan KLHS RTRW dan RPJMD	1 JPL
4	Integrasi KLHS Kedalam RTRW dan RPJMD	1 JPL
5	Praktek Penyusunan KLHS RPJMD	5 JPL
6	Praktek Penyusunan KLHS RTRW	5 JPL
7	Presentasi	2 JPL

Halaman 2-2

Nomor seri ijazah : 34112746

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

Memberikan ijazah kepada : **Dewi Rimayani**

Tempat dan tanggal lahir : **Jepara, 11 Oktober 1972**

N I R M : **9061050301050039**

Program Pendidikan : **Sarjana (S.1)**

Fakultas : **Teknik**

Jurusan : **Teknik Sipil**

Program Studi : **Teknik Sipil**

Status : **Diakui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0789/O/1987 tanggal 12 Desember 1987.**

Ijazah ini diserahkan setelah bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang bertubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai Gelar Akademik Sarjana Teknik (S.T.).

N I R L : **91508520**
Ditandatangani oleh

Tanggal : **10 Februari 1998**

Semarang, **10 Januari 1998**

Drs. Sujanta
Nrp. 111301

Prof. Dr. Soedarsono, MS
* NIP. 130219419





LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **DEWI RIMAYANI, ST**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MUDA

Nomor Registrasi
1.2.201.3.102.04.1036850

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Maret 2023.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 Maret 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Riau
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Ir. H. Roy Meindo

Keterangan:
1. QRcode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MUDA

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji:

DEWI RIMAYANI, ST

Anggota Asosiasi Profesi **ASTTATINDO**

No: **04.ASTTATINDO.20.6595**



VIBY INDRAYANA, ST, MM
KETUA UMUM



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BEKERJASAMA DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor : 1707/PROTAN/SDA/2009

SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

DEWI RIMAYANI, ST.

Tempat dan tanggal lahir : Jepara, 11 Oktober 1972

Kualifikasi/Klasifikasi : Profesional Madya SDA

TELAH MENGIKUTI

Pelatihan Keahlian Jasa Konstruksi Bidang Tenaga Ahli Perencanaan Itigast

Mulai tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan 21 Maret 2009 di Semarang dengan predikat Baik



KETUA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
LPJKN

[Signature]
Dr. Ir. PURNOMO SOEKIRNO



Jakarta, 25 Maret 2009
SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
DAN SUMBER DAYA MANUSIA

[Signature]
Ir. PADAN KRISNANDAR, MT
MTP 110022472



BALAI PENINGKATAN KEAHLIAN TEKNIK KONSTRUKSI SUMBER DAYA AIR
 PUSAT PEMBINAAN KEAHLIAN DAN TEKNIK KONSTRUKSI
 BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
 KERJASAMA DENGAN
 LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK)
 DAERAH JAWA TENGAH



Sertifikat

Diberikan kepada :

Dewi Rimayani, ST

Sebagai Peserta

Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
 yang dilaksanakan di Semarang pada tanggal, 12 - 17 Juli 2010

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
 Daerah Jawa Tengah
 Ketua Umum,



Mulyono
 J. Mulyono Baroen

Semarang, 17 Juli 2010
 Balai Peningkatan Keahlian Teknik Konstruksi
 Sumber Daya Air
 Kepala,



Dwiyoanto
 Ir. Herivadi Dwiyoanto, Dipl.HIE
 NIP. 19570502 198603 1 002

Nomor seri ijazah : **SL 706/20/II/98**

**SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN
YOGYAKARTA**

Membagikan kepada : **Muhammad Nur Sigit Wibawa**
Tempat dan tanggal lahir : **Sleman, 23 November 1972**

NIRM/Nomor Ujian : **920053083404020122 / T 51433.0417**
Program Pendidikan : **STRATA SATU (S. 1)**
Jurusan : **TEKNIK LINGKUNGAN**
Program Studi : **TEKNIK LINGKUNGAN**
Status : **DIAKUI, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 232/DIKTI/Kep/1993, tanggal 1 Mei 1993.**

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik Sarjana Teknik (ST).

N.I.R.L. : **989205308340402086**

Yogyakarta, **16 Januari** 19 **98**
Ketua.

Menyerahkan oleh :
Kopertis Wilayah V DIY
16-02-1998
Kantor Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V
M. Arch
NIP 138350205



Prof. Dr. Ir. H. Cholid Fandeli
Ketua

MENGESAHKAN
Salinan/ Foto Copy Telah Sesuai Dengan Aslinya
Nomor: **177 / STTU/Lept/ D... / A... / 20/98**
Diperiksa Oleh :
Nama : **Prof. Dr. Ir. H. Cholid Fandeli**
Jabatan : **Ketua**
Yogyakarta, **16 FEB 1998**





LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **MUHAMAD NUR SIGIT WIBOWO, ST**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI TEKNIK LINGKUNGAN - MADYA

Nomor Registrasi
1.5.501.2.088.11.1071234

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 3 November 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 2 November 2023.



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 November 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Jawa Tengah
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif

Nur Atimah, SE

Berkas yang tertera dalam SKS ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPIK Certificate Scanner
1. QR Code dan Data yang tertera dalam SKS ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPIK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

AHLI TEKNIK LINGKUNGAN - MADYA

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan beriatu di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji:

MUHAMAD NUR SIGIT WIBOWO, ST

Anggota Asosiasi Profesi **INTAKINDO**

No: **11.17.0021645**



Ir. Ch. SLAMET KITRI
KETUA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS DIPONEGORO



No. U. : 13498/ST

No. F. : 18431

Pimpinan Universitas Diponegoro dengan ini menyatakan bahwa :

Bagus Oka Pradapa

NIM *L2L005806*

lahir di **Semarang** tanggal **3 Juli 1987** telah menyelesaikan
dan memenuhi segala syarat pendidikan pada **Program Sarjana Teknik Geologi,**
sehingga kepadanya diberikan :

IJAZAH

dengan gelar akademik

SARJANA TEKNIK (S.T.)

dengan demikian dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tertinggi.

Diberikan di Semarang pada tanggal **23 Juni 2010**

DEKAN
FAKULTAS TEKNIK

Ir. Hj. SRI EKO WAHYUNI, MS.
NIP. 195008291981022001



REKTOR

Prof. Dr. dr. SUSILO WIBOWO, MS.Med., Sp.And.
REKTOR NIP. 195403211980031002







SERTIFIKAT

11/IAP JATENG 19 - 22/II/2020

Diberikan Kepada :

Bagus Oka Pradapa

PESERTA

Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Diselenggarakan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
pada tanggal 20 Februari 2020

Semarang, 20 Februari 2020



Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik - UNISSULA

Ir. Eppy Yuliani, MT
NIP. 1961070721987011



Ketua
Ikatan Ahli Perencanaan
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Agung Pangarso, MT
NA. 33-17-001.1







Materi	Nilai
<ul style="list-style-type: none"> • Dasar, Kebijakan dan Prosedur Perundangan Yang Mendasari Penyusunan KLHS RPJMD • Proses Penyusunan KLHS RPJMD • Analisis Keuangan Daerah Untuk Pembangunan Berkelanjutan • Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian dan Validasi KLHS 	2 JP 2 JP 2 JP 2 JP
<div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>	<div style="border: 1px dashed black; display: inline-block; padding: 2px 10px;"> Total : 8 JP </div>



DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN
CILACAP



KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RDTR

Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perkotaan Maos
Kabupaten Cilacap

LAMPIRAN **4**

**PROSIDING
KONSULTASI PUBLIK 1**



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan MT. Haryono. Nomor. 79. Telepon / Faksimile (0282) 533073
Website : www.dlh.cilacapkab.go.id E-mail :

CILACAP

Kode Pos 53222

**BERITA ACARA
KONSULTASI PUBLIK (KP) 1
PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG
(RDTR)
KAWASAN PERKOTAAN MAOS KABUPATEN CILACAP**

Nomor : 660.1/867/24

Pada hari Rabu, tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (7 Juli 2022) Bertempat di Ruang Rapat Adipura DLH, Kabupaten Cilacap telah diadakan Rapat dengan agenda Konsultasi Publik (KP) 1 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos, Kabupaten Cilacap dalam rangka penyepakatan Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan yang dipimpin oleh Ibu Sri Murniyati S.T., M.Si. dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat sebagaimana terlampir dalam daftar hadir pelaksanaan kegiatan.

Adapun Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan dalam penyusunan KLHS yang disepakati dalam Konsultasi Publik (KP) 1 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

A. Isu Pembangunan Berkelanjutan Aspek Sosial sebagai berikut:

1. Terdapat lingkungan permukiman kumuh
2. Adanya Rumah Tidak Layak Huni
3. Masih terdapat angka kemiskinan
4. Kualitas sumber daya manusia belum optimal
5. Masih terdapatnya angka pengangguran
6. Masih adanya kesenjangan antar wilayah
7. Masih adanya kesenjangan pendapatan masyarakat

B. Isu Pembangunan Berkelanjutan Aspek Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Karangreja
2. Potensi alih fungsi lahan pada rencana pola ruang dan penyediaan prasarana dan sarana RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap
3. Potensi terjadi alih fungsi lahan akibat rencana pengembangan jalan dan jalan kereta api

4. Limbah industri rumah tangga mayoritas belum dilakukan pengolahan
5. Limbah industri rumah tangga ada yang belum dilakukan pengolahan
6. Akses sanitasi yang layak dan aman belum optimal
7. Masih adanya penanganan air limbah rumah tangga yang belum memenuhi standar
8. Masih adanya praktik BABs (Buang Air Besar Sembarangan) tertutup
9. Pengelolaan sampah belum optimal
10. Pembuangan sampah sembarangan ditepi jalan nasional masih terjadi
11. TPS dan angkutan sampah ke TPA belum memadai
12. Bank sampah hanya ada di 3 desa: Desa Glempang, Klapagadan dan karangkemiri
13. Potensi terjadi alih peningkatan pencemaran udara dan perubahan iklim akibat meningkatnya kegiatan industri, perdagangan, perumahan, transportasi dan pertanian
14. Masih adanya praktik pembakaran sampah
15. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau
16. Adaptasi dan Mitigasi terhadap perubahan iklim belum optimal
17. Terjadi kekeringan, banjir dan genangan
18. Rendahnya kualitas jalan menuju WP
19. Sistem transportasi dan angkutan jalan belum optimal.
20. Halte belum optimal: depan balai desa Glempang, depan SMAN 1 Maos, Depan Stiker Seruling Mas.
21. Trayek dan angkutan belum optimal: Ada 2 trayek: Adipala Maos 1 kendaraan, Sahwangi Maos 4 kendaraan.
22. Belum ada terminal, saat ini di Adipala
23. Terdapat Perlintasan Kereta api yang berpotensi kemacetan dan kecelakaan
24. Pemindahan kantor Kecamatan dari Desa Klapagada ke desa Karangreja berpotensi terjadi pengembangan infrastruktur penunjang
25. Penataan Drainase kurang optimal
26. Kurangnya infrastruktur sumber daya air untuk pertanian
27. Potensi menurunnya produksi perikanan budidaya di wilayah yang bersebelahan dengan DAS Serayu
28. Akses air minum yang layak dan berkelanjutan belum optimal
29. Penduduk banyak menggunakan sumber air minum non perpipaan dari sumur
30. Masih kurangnya akses jaringan air minum perpipaan
31. Menurunnya kuantitas air permukaan dan air bawah tanah
32. Menurunnya sumber mata air
33. Berkurangnya areal infiltrasi air tanah
34. Adanya degradasi lahan catchment area (daerah resapan)
35. Masih adanya sumur bor dalam pemenuhan kebutuhan air (misal : industri, perumahan)

36. Masih perlunya pembangunan embung sebagai penampung air untuk irigasi
37. Kurangnya air baku untuk memenuhi kebutuhan kedepan
38. Banjir dan genangan di Klapagada, Pasugihan Karang kemiri
39. Potensi Bencana Gempa Bumi di seluruh wilayah Kecamatan
40. Potensi Bencana Kekeringan
41. Potensi ancaman tsunami
42. Bencana Angin puting Beliung di seluruh wilayah Kecamatan
43. Penanganan kebencanaan belum optimal
44. Kurang optimalnya kinerja infrastruktur irigasi
45. Perubahan iklim ekstrim menyebabkan penurunan hasil pertanian
46. Bencana hidrometeorologi berupa angin kencang, hujan lebat dan banjir merendam tanaman padi
47. Potensi penurunan hasil pertanian pangan terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
48. Masih adanya ancaman OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)

C. Isu Pembangunan Berkelanjutan Aspek Ekonomi sebagai berikut:

1. Terdapat penduduk miskin
2. Kurangnya inovasi dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata
3. Pengembangan UKM belum optimal
4. Pengembangan produk berbahan lokal belum optimal
5. Penataan kawasan perdagangan dan jasa belum optimal
6. Masih terbatasnya pasar dan toko modern seperti: toko swalayan, mall dan lain-lain
7. Pasar tradisional memerlukan penataan
8. Pasar Sentolo Baru perlu penataan untuk kuliner

Demikian berita acara ini disepakati dan ditandatangani untuk digunakan sebagaimana mestinya. Notulensi dan daftar hadir menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini (terlampir).

Penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik 1

Penyepakatan Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan

KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap

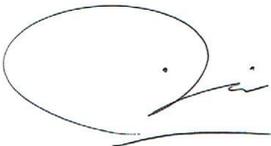
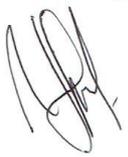
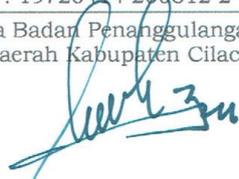
Disepakati di Cilacap pada tanggal 7 Juli 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP



SRI MURNIYATI S.T. M.Si.

NIP. 197009101997032005

PEMERINTAH DI KABUPATEN CILACAP	
<p>a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cilacap</p>  <p>Cicik Setyorini, S.P. NIP. 19700507 199803 2 004</p>	<p>a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cilacap</p>  <p>Kurnia Andri Purnomo, S.T., M.T. NIP. 19860413 200903 1 002</p>
<p>a.n. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap</p>  <p>Muhammad Subhan, S.E. NIP. 19660525 198903 1 011</p>	<p>a.n. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Cilacap</p>  <p>Yoppi Juli Priyono, A.Md. NIP. 19890717 202012 1 010</p>
<p>a.n. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap Subkoordinator Standarisasi Mutu</p>  <p>Edi Sukarno, S.Sos., M.M. NIP. 19670926 199303 1 002</p>	<p>a.n. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap</p>  <p>Indriati Dwi Cahyani, S.T., M.M. NIP. 19720414 200312 2 001</p>
<p>a.n. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cilacap</p>  <p>Itrinna Fajar, S.P., M.Eng., M.URP. NIP. 19860323 201212 2 001</p>	<p>a.n. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap</p>  <p>Kelik Gunantoro S.T., M.Eng. NIP. 19740127 200212 1 005</p>
<p>a.n. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap</p>  <p>Marsid, S.T. NIP. 19730516 200801 1 007</p>	<p>a.n. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap</p>  <p>Singgih Wijayanto, S.T. NIP. 19921007 202012 1 011</p>

<p>LEMBAGA NON PEMERINTAH DAN AKADEMISI</p>	
<p>Politeknik Negeri Cilacap</p>  <p>Vicky Prasetya, S.ST., M.Eng. NIP. 199206302019031011</p>	<p>Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pelajar Peduli Lingkungan (PEPPELING) Cilacap</p>  <p>Herman Sukato</p>
<p>Universitas Nadhatul Ulama Al-Ghazali Cilacap</p>  <p>Fahrur Rozi</p>	

Notulensi

NO	POIN RAPAT	KETERANGAN
1	Pembukaan rapat	Oleh Kepala Dinas LH Cilacap
	Saran Pendapat & Tanggapan	
1	Legal formal Perda I/2021 atau 75/2021 RDTR total 21 RDTR, ada 1 Perbup RDTR Cilacap. Warisan 8 materi teknis yang siap, tetapi versi Permen PU lama. 4 sudah disinkronisasi (Sidareja, Majenang, Cimanggung, Dayeuhluhur)	DPUPR (Bp. Andri)
	RDTR Sinerginya: 2023 Adipala dan Sampang, 2025 Wanareja & Patimuan, Peta-peta dasar sudah tahun sebelumnya	
	Sekalian perkenalan tim sebagai konsultan penyusun RDTR agar sinkron	
	Usul Supaya bisa sistem hybrid	
	2027 semoga bisa sinergi antara RDTR dan KLHS	
	Temuan KLHS akan diakomodir semoga tidak banyak mengubah	
	LSD: SK 2021 +65.000 Ha, Dirjen Pengendalian sudah cek, tapi belum disepakati	
	KLHS bagaimana? Output LSD akan diarsir tersendiri, sehingga KLHS bisa berjalan dulu dengan draft yang ada	
	LSD Sidareja: 1.163 Ha, tanaman pangan 1115 Ha tidak sama dengan tanaman lain	
	Substansi draft pendahuluan:	
	Sidareja masih updating juga, cek folder	
	Judul tabel hal 2.1 tidak terpancang pada wilayah admin karena dari RDTR -> luas wilayah perencanaan / WP	
	Pola Ruang: masih dilakukan update; WP 2.975 Ha (cek)	
	Peta dasar: ada digitasi peta dasar; pola ruang pakai yang pola ruang saja (yang update 2020)	
	Shp baru sudah masuk, layout peta masih pakai BWP diganti WP	
	Ruas jalan kolektor primer (Linggar Jaya)	
2	Sidareja, isu isunya diantaranya seputar banjir, <i>universal access</i> , lahan pertanian, akses jalan	DPUPR (Bp. Imam)
3	Sebaiknya KLHS dan KRP saling koordinasi agar sinkron	Bappeda (Bp. Arief)
	Pada 2023 akan diselenggarakan KLHS RPJMD dan RPJPD	
4	Pokja KLHS merupakan bagian dari Pokja RDTR	DLH (Bp. Ady)
	Untuk mengikuti regulasi dari provinsi, serta nomenklatur	
	Terdapat 12 tahapan KLHS, dapat dilakukan secara hybrid	
	Substansi: Delineasi WP disinkronkan	
	LP2B dan LSD diidentifikasi	
	Rencana Struktur & Pola Ruang menjadi pertimbangan dalam isu PB	
5	7 desa di Maos konsentrasi di batas selatan (dengan Adipala) sehingga pengembangan bisa ke utara-timur	Kecamatan Maos
	Terdapat rencana relokasi kec dan untuk RTH	
	Belum ada pengelolaan sampah secara teratur, baru berupa bank sampah dan diharap ada sistem angkutan dari TPS ke TPA agar dapat menjadi pemasukan bumdes	

NO	POIN RAPAT	KETERANGAN
	Jalan kalau bisa ada ringroad supaya tidak berfokus di jalan nasional	
	Koridor jalan 200 m statusnya KPLB sawah sehingga tidak bisa dibangun	
	Relokasi kecamatan sekalian meminta alun-alun	
	Ada perlintasan KA dekat pertigaan & pasar, jalan nasional kearah Kesugihan -> bila diusulkan ada flyover	
	Genangan: karangreja & klapagada, sumbernya dari karangsuri, kuncinya kalau bisa dibuang ke sungai Serayu, kalau tidak secara topografi akan mengarah ke kr. reja	
	Penutupan	

Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771 – 534775 Faksimile (0282) 535222
Website : www.cilacapkab.go.id E-mail : setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

Cilacap, 5 Juli 2022

Nomor : 005/01669/24/CLP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth. :
Bapak /Ibu / Saudara
Sebagaimana Daftar Terlampir
di -
CILACAP

Mengharap kehadiran Bapak / Ibu / Saudara pada :

Hari/ tanggal : Kamis, 7 Juli 2022
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Acara : Rapat Membahas Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos dan Kawasan Perkotaan Sidareja
Tempat : Ruang Adipura DLH Kabupaten Cilacap
Jalan MT.Haryono No. 79, Donan, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap
Catatan : 1. Materi rapat dapat di download melalui [link http://bit.ly/lappendahuluanklhsrdtr22](http://bit.ly/lappendahuluanklhsrdtr22)
2. Saran/masukan/tanggapan secara tertulis disampaikan melalui alamat e-mail bidangpp.dlh@cilacap@gmail.com atau ke nomor WA Sdr. Doni Alfianto, ST (No. Hp. 081226819586)

Demikian atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI CILACAP
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AWALUDDIN MUURI, AP, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 199412 1 001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran I : Surat Bupati Cilacap
 Nomor : 005/01669/24/CLP
 Tanggal : 5 Juli 2022

Daftar Yang di Undang :

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap	Anggota
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap	Anggota
6.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap	Anggota
8.	Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	Anggota
9.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	Anggota
12.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	Anggota
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap	Anggota
14.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap	Anggota
15.	Kepala ATR / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap	Anggota
16.	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Anggota
17.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Anggota
18.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Anggota
19.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Cilacap	Anggota
20.	Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Cilacap	Anggota
21.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup selaku Subkoordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Anggota
22.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup selaku Subkoordinator Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Anggota
23.	Camat Maos	Anggota
24.	Camat Sidareja	Anggota
25.	Tenaga Ahli	Pendamping Pokja



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Daftar Hadir

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL
WAKTU
TEMPAT
ACARA

: Kamis, 07 Juli 2022
: Pukul 13.00 WIB s/d selesai
: Ruang Rapat Adipura DLH Kabupaten Cilacap
: Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos dan Kawasan Perkotaan Sidareja

NO	NAMA	JABATAN	DINAS/INSTANSI	NO. HP/WA	TANDA TANGAN
1	Diponegoro P. Danti	Selescan	Xec. PPAAS	0813227214668	1.
2	Suwardi	St. km	PPFD Cilacap	081391529808	2.
3	Rom Muchdori	Selescan	Kec. Sidareja's	085291478198	3.
4	Imam J.	PPFD Kertanegara			4.
5	Juran Hm	PPA M		085726469003	5.
6	Ninto	Komis PPKL	DH	08156979251	6.
7	Yunus Angip	Ket. fungsi	DAUW	081348061190	7.
8	Judri Ayu Y	Revisi Sanitasi	Dinas Kesehatan	088047800651	8.
9	Randy Satria Yudha	Staff	DPSDA	082135594894	9.
10	EO, NARONNO	Dis. SPAN	Dispan	080257772615	10.
11	Kurnia Andri	DPUPR	DRUPR	085641283795	11.
12	Fikriyony. A	Dinas Perikuman	Pres. Abdulh	085795099127	12.
13	Wazqino	Kasbi ESDM	Dusnakorin	085647886893	13.
14	Yappa	Staff	Protektor	082123582600	14.
15	Indrat	Kasubag Peran	DPKUFM	08121522086	15.

16	XUMI TIESTA P	Pengelola Bahan Baku	DPIKUM	085741668785	16.	
17	Sajimi	Kasir	BOM	0865 432551 6029	17.	
18	Amy Setiawan	Sik PBM / PKKASLI	DH	0813 2196763	18.	
19	Pesthi	GK PSL	PLH	085 728 919 127	19.	
20	Arti N.	staff / gudang LH	PLH	0815 7972665	20.	
21	Sawandri	Finis PPLH	DLH		21.	
22	SA MURNIYAT	1/2 DLH	DLH		22.	
23	Doni Alfonto	Staff	DLH		23.	
24	DWI WAHYU NUGROHO	DLH staff PSL	DLH		24.	
25	TITAS MUSTIKA NUR P	staff PDL	DLH	085860 432 284	25.	
26	SRI KARTO WU	Staff DLH	DH		26.	
27					27.	
28					28.	
29					29.	
30					30.	
31					31.	
32					32.	
33					33.	
34					34.	
35					35.	

Dokumentasi





Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang WP Maas terdiri atas:

1. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
2. Rencana Jaringan Transportasi
3. Rencana Jaringan Energi
4. Rencana Jaringan Telekomunikasi
5. Rencana Jaringan Sumber Daya Air
6. Rencana Jaringan Air Minum
7. Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun (B3)
8. Rencana Jaringan Persampahan
9. Rencana Jaringan Drainase
10. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya.

Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang WP Maas terdiri atas:

A. ZONA LINDUNG

1. Zona Badai Air
2. Zona Perlindungan Setempat
3. Zona Ruang Terbuka Hijau

B. ZONA BUDIDAYA

1. Zona Badan Jalan
2. Zona Pertanian
3. Zona Perikanan
4. Zona Kawasan Peruntukan Industri
5. Zona Perumahan
6. Zona Sarana Pelayanan Umum
7. Zona Perdagangan dan Jasa
8. Zona Perkantoran
9. Zona Transportasi
10. Zona Pertahanan Keamanan



PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Pendekatan tata cara penyelenggaraan KLHS dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan:

1. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS, Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan validasi KLHS.
2. Mekanisme Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui:
 - a. Pengajian pengantar Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
 - b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
 - c. Penjaminan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan berkelanjutan.

Selain itu pendekatan tata cara penyelenggaraan KLHS juga dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.69/MENLHK/SETEN/KUM.1/22/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

1. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Tahap Pengajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;
 - b. Tahap Perumusan Alternatif Mula Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - c. Tahap Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
2. Penerapan mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS wajib bersifat:
 - a. jenuh, tuntas, terarah dan diaku informasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang bersifat:
 - i. umum, konseptual, dan/atau mikro; atau
 - ii. fokus, detail, terikat, terbatas dan/atau teknis, dan
 - b. prosedur dan mekanisme penyusunan dan/atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

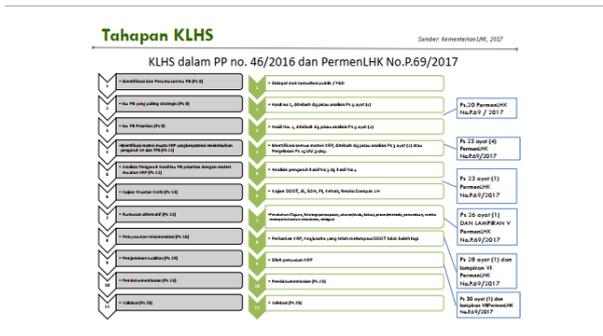
A TAHAPAN KLHS RDTR

No	Tahapan Pembuatan (PP 46/Permen 69)
I	Persiapan
A	Identifikasi para pemangku kepentingan
B	Penyusunan KA
II	Tahap Pengkajian Pengaruh KRP
A	Identifikasi dan perumusan isu PB
B	Isu PB strategis (ps 9)
C	Isu PB Prioritas (ps 9)/(ps 20)
D	Identifikasi KRP yang berpengaruh thd LH (ps 10-12)/(ps 22)
III	Analisis pengaruh KRP & isu PB Prioritas
A	Kajian muatan KLHS (ps 13)/(ps 23)
IV	Rumusan Alternatif (ps 15)/(ps 26-27)
V	Rekomendasi (ps 16)/(ps 26-29)
VI	Pengintegrasian (ps 30)
VII	Penjaminan Kualitas (PS 19) / (PS 31-34)
VIII	Pendokumentasian (ps 23) / (ps 35)
IX	Validasi (ps 25) / (ps 36-37)

Tahapan KLHS

Sumber: Kementerian LHK, 2017

KLHS dalam PP no. 46/2016 dan PermenLHK No.P.69/2017



B PEMBENTUKAN POKJA PENYUSUN KLHS

- Pokja KLHS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Penyusun RDTR OSS Kabupaten Lampung Tengah
- Pokja KLHS bertugas melaksanakan tahapan KLHS dengan cara saling bertukar informasi dan memberikan masukan terhadap proses penyusunan RDTR OSS Kabupaten Lampung Tengah
- dengan pokja lain di bawah koordinasi Ketua Tim Penyusun RDTR OSS Kabupaten Lampung Tengah
- Kinerja Pokja KLHS juga melibatkan pemangku kepentingan.
- Pembentukan Pokja Penyusunan Dokumen KLHS RDTR OSS Kabupaten Lampung Tengah
- ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah tentang Pembentukan Kelompok Kerja dalam Penyusunan KLHS RDTR OSS Kabupaten Lampung Tengah

C PENYUSUNAN KAK KLHS

Pokja KLHS menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan pedoman kerja bagi Pokja KLHS dalam rencana pelaksanaan revisi. KAK KLHS RDTR OSS Kabupaten Lampung Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan dan Sasaran
- c. Lingkup Kegiatan
- d. Hasil yang Diharapkan
- e. Rencana Kerja Pelaksanaan dan Metode Pengkajian
- f. Kebutuhan Narasumber/Akademisi yang diperlukan membantu Pokja PL dalam melakukan analisis
- g. Waktu dan Biaya

D TAHAPAN PERUMUSAN ISU PB

No	Tahapan Langkah Kegiatan	Metode dan Teknik	Hasil
1.	Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik (Pasal 9 Ayat 2 PP No 46/2016 dan Pasal 21 Ayat 1) Permen LHK RI Nomor P.69/MENLHK/SETEN/KUM.1/22/2017 • Teknik Pendukung Kegiatan : Metode urah pendapat/ Metaphor/ Kuis/teknik/ Diskusi/ Literatur 	Rumusan daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan
2.	Penyusunan Isu Pembangunan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelompokan isu berdasarkan aspek pembangunan • Metode kesamaan substansi dan/atau memisah sebab-akibat dengan memperhatikan (lintas sektor, wilayah, pemangku kepentingan, waktu) • Melakukan konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman isu pembangunan berkelanjutan • Melakukan konfirmasi dari data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan 	Rumusan daftar isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Rumusan daftar isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan kesamaan sebab akibat.
3.	Telaah terhadap isu pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan telaah cepat hasil pengkajian yang memperinci bagian unsur-unsur paling kecil: • Karakteristik wilayah yang ditelaah dalam bentuk spasial (initialnya dengan menggunakan peta Rupa Bumi, peta rencana tata ruang dan peta tutupan lahan) • Tingkat pentingnya potensi dampak; • Keterkaitan antar isu strategi pembangunan berkelanjutan 	Hasil telaah sebagai dasar untuk menentukan isu pembangunan berkelanjutan strategis (initialnya dengan menggunakan peta Rupa Bumi, peta rencana tata ruang dan peta tutupan lahan)
4.	---	---	---

D TAHAPAN PERUMUSAN ISU PB

No	Tahapan Langkah Kegiatan	Metode dan Teknik	Hasil
4.	Kajian perimbangan tentang Pembanguan Berkelanjutan	Membuat perimbangan tentang : • tingkat pentingnya potensi dampak, berdasarkan indikasi cakupan wilayah dan frekuensi/intensitas dampak; • keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan hasil telah seak-akibatnya	Hasil telah sebagai dasar untuk menentukan isu pembangunan berkelanjutan strategis Rancangan Program pembangunan berkelanjutan strategis
5.	Uji silang hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan	Uji silang hasil identifikasi isu pembangunan terhadap muatan Pasal 9 ayat (1) PP No 46 Tahun 2016. Muatan materi Pasal 9 ayat (1), meliputi: 1. Karakteristik wilayah; 2. Tingkat pentingnya potensi dampak dan risiko; 3. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan; 4. Keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; 5. Muatan Rencana Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 6. Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada harkat di atasnya yang harus diacu, serup dan berada pada wilayah yang berkegiatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.	Gambaran keterkaitan kajian hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dengan muatan Pasal 9 ayat (1) PP No 46 Tahun 2016.

D TAHAPAN PERUMUSAN ISU PB

No	Tahapan Langkah Kegiatan	Metode dan Teknik	Hasil
6.	Pemetaan isu	Uji silang hasil identifikasi isu pembangunan terhadap muatan Pasal 9 ayat (2) PP No 46 Tahun 2016 • Pembobotan hasil analisis uji silang isu pembangunan dan berkelanjutan strategis • Muatan materi Pasal 9 ayat (2) PP No 46 Tahun 2016, meliputi: 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; 2. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup; 3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem; 4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam; 5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam; 6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; 7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; 8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghijauan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghijauan masyarakat; 9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat dan/atau • Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.	Hasil telah sebagai dasar untuk menentukan isu strategis dan prioritas Rancangan isu strategis dan prioritas

TATA CARA IDENTIFIKASI KRP YANG BERPENGARUH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

- TAHAPAN :**
1. Identifikasi KRP RDTR
2. Penapisan terhadap KRP RDTR
 a. Penapisan KRP terhadap kriteria dampak/ risiko LH (Pasal 15 UU 32/2009 atau Pasal 3 ayat 2 (a) PP No. 46/2016)
 b. Penapisan KRP dengan Isu PB Prioritas

- Muatan RTRW yang diidentifikasi dampak/risiko lingkungan hidup, meliputi:**
 1. Tujuan Penataan Ruang
 2. Rencana Struktur Ruang
 3. Rencana Pola Ruang
 4. Ketentuan Pemfaatan Ruang (Indikasi Program)
 5. Ketentuan Umum Zonasi

a. Penapisan KRP dengan Kriteria Dampak dan/atau Resiko LH (Pasal 15 UU No 32/2009 atau Pasal 3 ayat 2 (a) PP No 46/2016)

PENAPISAN dengan Pasal 15 UU No. 32/2009 atau Pasal 3 ayat 2 (a) PP No. 46/2016. Suatu Kebijakan, Rencana dan/atau Program dinyatakan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup dilihat dari perkiraan dampaknya terhadap 7 muatan, yaitu :
 1) Perubahan iklim (R, Bdm)
 2) Kerusakan, kemerosotan dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati (KEHATI)
 3) Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah, bencana banjir longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan (Bencana)
 4) Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam (Mutu SDA)
 5) Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan (Alih fungsi lahan)
 6) Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghijauan sekelompok masyarakat (Kemiskinan)
 7) Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia (Kesehatan)

Penapisan KRP dengan Pasal 3 ayat 2 (a) PP No. 46/2016 dilakukan melalui diskusi dengan Pokja terkait dengan identifikasi KRP RTRW KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW SELATAN untuk dilakukan penilaian berdasarkan professional judgement.

Metode kuantitatif untuk menapisan Dampak KRP dapat dilakukan dengan mengidentifikasi jenis dampak yang dilakukan secara professional judgement (berdasarkan profil LH) yaitu :
 1. **Positif (+)** : Memberikan dampak positif terhadap tujuh muatan KLHS
 2. **Negatif (-)** : Memberikan dampak negatif terhadap tujuh muatan KLHS
 3. **Netral (0)** : Tidak memberikan dampak positif maupun negatif
Penilaian dengan satu nilai (+) memberikan gambaran bahwa KRP berpotensi menimbulkan dampak/ berpengaruh terhadap LH

E IDENTIFIKASI KRP BERDAMPAK

No	Tahapan Langkah Kegiatan Analisis Pengaruh	Metode dan Teknik	Hasil
1.	Identifikasi Muatan KRP Yang Berpotensi Mempengaruhi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Berkelanjutan	Uji silang/ crosscheck dengan literatur dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (Penjelasan Pasal 15 UU No 32/2009) • Kriteria dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (Penjelasan Pasal 15 UU No 32/2009), meliputi : 1. perubahan iklim; 2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati; 3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan; 4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; 5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; 6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghijauan sekelompok masyarakat; dan/atau 7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.	KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH.

E IDENTIFIKASI KRP BERDAMPAK DAN PERLU KAWAN MUATAN KLHS

No	Tahapan Langkah Kegiatan Analisis	Penjelasan	Metode dan Teknik	Hasil
2	Identifikasi Keterkaitan Antara Materi Muatan KRP Dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	Uji silang keterkaitan antara materi muatan KRP dengan Isu pembangunan berkelanjutan strategis • Keterkaitan KRP dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	Metode Analisis Dampak/ risiko KRP yang berpotensi lingkungan (-, 0, menimbulkan pengaruh dan +)	Teknik penilaian Dampak/ risiko KRP yang berpotensi lingkungan yang perlu kajian muatan KLHS

F ANALISIS PENGARUH

- MUATAN KLHS (PASAL 13 PP NO 46/2016) MELIPUTI :**
 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
 2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
 3) Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
 4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

F ANALISIS PENGARUH

No	Tahapan Langkah Kegiatan Analisis	Penjelasan	Metode dan Teknik	Hasil
1	Analisis Pengaruh	Analisis pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program dalam KLHS. Data pelaksanaan analisis: • Penetapan perundang-undangan; • Jelasnya prosedur, waktu, tempat, contoh prakas terkait, dan informasi tersedia yang diacu secara ilmiah; • Jelasnya nilai penelitian yang akurat; • Jelasnya antar anal.	Metode Analisis Dampak/ risiko KRP yang berpotensi lingkungan (-, 0, menimbulkan pengaruh dan +) • Teknik analisis Dampak/ risiko KRP yang berpotensi lingkungan yang perlu kajian muatan KLHS	Teknik penilaian Dampak/ risiko KRP yang berpotensi lingkungan yang perlu kajian muatan KLHS
2	Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan	Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung kehidupan manusia dan ambang batas kemampuan tersebut. Kemampuan kajian ini berguna sebagai acuan untuk menentukan apakah intervensi pembangunan masih dapat dilakukan dalam beresam variabel yang memengaruhi jasa dan produk dari ekosistem, misalnya daya dukung tanah/kelembapan tanah, air, nutrisi spesifik, dan lain sebagainya. Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain adalah mengukur tingkat kelestarian, mengukur jejak karbon, mengukur jejak air, dan lain sebagainya. Teknik-teknik tersebut dapat digunakan untuk menentukan daya dukung lingkungan hidup dapat menguji ketahanan yang ada atau memprediksi yang akan terjadi dalam lima.	Teknik analisis Dampak/ risiko KRP yang berpotensi lingkungan yang perlu kajian muatan KLHS	Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

KAPASITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

1. Acuan : Permen LH No. 17/2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah

a. Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang.

- Peta kelas kemampuan lahan
- Peta subkelas kemampuan lahan
- Peta kemampuan lahan dalam tingkat unit pengelola
- Peta evaluasi kesesuaian lahan

b. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan.

c. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan.

2. Acuan Lainnya (berdasarkan pendapat dan pendekatan pakar)

a. Perhitungan Daya Dukung Pangan, pendapat pakar Fuad, et al, yang termuat dalam makalah Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Meningkatkan NIKRI: 255-266. Terkait acuan perhitungan : ketersediaan dan kebutuhan pangan (beras)

b. Perhitungan Daya Dukung Lahan Untuk Permukiman, pendekatan permukiman (bangunan) berdasarkan Dr. Ing Ir. Widodo Brontowiyono, MSc (KLHS untuk RTRW dengan pendekatan Daya Dukung Lingkungan Tahun 2016)

c. Perhitungan Daya Tampung Wilayah, pendekatan berdasarkan Dr. Lutfi Muta'ali, S.Si.MSP (Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah)

PERKIRAAN MENGENAI DAMPAK DAN RISIKO LINGKUNGAN HIDUP

Acuan :

- Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Tingkat potensi dampak dapat berdasarkan sebagai berikut :

- Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan
- Luas wilayah penyebaran dampak;
- Intenitas dan lamanya dampak berlangsung;
- Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- Sifat kumulatif dampak;
- Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
- Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau

F ANALISIS PENGARUH

No	Tahapan Langkah Kegiatan Analisis	Penjelasan	Metode dan Teknik	Hasil
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan berdampak masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Teknik analisis mengkuantifikasi yang telah tersedia (misalnya Pedoman Dampak Penting) dan metodologi yang diakui secara ilmiah (misalnya metodologi Environmental Risk Assessment).	Teknik analisis : Analisis kualitatif dan kuantitatif Overlay KRP terhadap tutupan lahan	Dampak, risiko, dan manfaat KRP terhadap lingkungan hidup, keberlanjutan kehidupan, dan keberagaman pembangunan.

KRITERIA DAMPAK PENTING

No.	Faktor Penyebab Dampak Penting	Kriteria Dampak Penting	Penting
1.	Produksi (PI)	Produksi yang memenuhi manfaat lebih besar daripada penduduk yang menerima dampak	Produksi yang menerima dampak lebih besar daripada penduduk yang menerima manfaat
2.	Luas penyebaran dampak (L)	Tidak ada wilayah yang mengalami perubahan signifikan	Ada wilayah yang mengalami perubahan signifikan
3a.	Lama berlangsungnya dampak (waktu kegiatan)	Lamanya dampak kurang dari 1 tahun kegiatan, singkat, prosedur teknis dampak tidak terpengaruh, misal pada saat ini	Lamanya dampak lebih dari 1 tahun kegiatan, singkat, prosedur teknis dampak terpengaruh, misal pada saat ini
3b.	Intensitas dampak	Ringan, populasi yang terkena dampak tidak terganggu	Sedang sampai berat, populasi yang terkena dampak terganggu
4.	Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak (K)	Banyaknya komponen lingkungan hidup primer telah banyak terdampak (sangat)	Banyaknya komponen lingkungan hidup primer telah sedikit terdampak (sedikit)
5.	Sifat kumulatif dampak	Tidak kumulatif, dapat diantisipasi oleh masyarakat	Kumulatif dan terakumulasi, tidak dapat diantisipasi oleh masyarakat
6.	Berbalik atau tidak berbaliknya	Dapat diantisipasi dengan reboisasi	Tidak dapat diantisipasi (tidak berbalik)
7.	Preferensi lainnya : heterodan historis	Tersebut	Tidak Tersebut

Sumber : Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021

Berdasarkan 7 (tujuh) kriteria dampak penting di atas dapat diketahui KRP yang berdampak penting terhadap pembangunan daerah apabila memenuhi kriteria :
 • Kriteria jumlah manusia yang terkena dampak dianggap penting dan/atau
 • Terdapat 3 (tiga) dari 7 (tujuh) kriteria yang lain berdampak penting.
KRP yang berdampak penting terhadap pembangunan daerah tersebut memiliki pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup sehingga perlu diikuti dengan alternatif dan rekomendasi untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

No	Tahapan Langkah Kegiatan Analisis	Penjelasan	Metode dan Teknik	Hasil
1.	Kinerja layanan/jasa Ekosistem	Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama didalamnya adalah yaitu: • Layanan/fungsi penyedia (provisioning services) : Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetik, air dll. • Layanan/fungsi pengatur (regulating services) : Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengatur iklim dll. • Layanan/fungsi budaya (cultural services) : Ekosistem memberikan manfaat non material yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengkayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan. • Layanan/fungsi pendukung kehidupan (supporting services) : Ekosistem menyediakan dan/atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll. Kajian yang dilakukan terutama ditujukan Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberlanjutannya.	Teknik analisis : Matrik perbandingan status ekosistem sebelum dan sesudah rencana dan/atau pola ruang. Overlay KRP prioritas dengan jasa ekosistem/ Peta DTLN	Kinerja layanan atau fungsi ekosistem dari status ekosistem sebelum dan sesudah rencana dan/atau pola ruang. Program

KINERJA LAYANAN ATAU JASA EKOSISTEM

- Acuan : Acuan Modul Penggunaan Data Spasial Daya Dukung Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem Provinsi Dan Kabupaten Di Ekoregion Jawa Tengah (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2016)
- Teknik analisis : overlay peta KRP terpilih dengan jasa ekosistem terpengaruh

Teknik analisis jasa ekosistem KLHS RTRW dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap Peta jasa ekosistem adalah 1 : 250.000. Hal itu dilakukan kedetailan pemetaan pada penyusunan KLHS RTRW yang mempunyai kedalaman peta 1 : 50.000.

Tahapan analisa jasa ekosistem KLHS Rencana Detail Tata Ruang di skala 1 : 50.000 dilakukan dengan merubah data secara geometris akan tetapi tidak mempengaruhi hasil metode perbandingan berpasangan atau dalam hal ini hanya sebatas mendetailkan data ekoregion skala 1 : 250.000 dan menggunakan guna lahan dari RTRW Bolang Monggondow Selatan.

KINERJA LAYANAN JASA EKOSISTEM

<p>Contoh analisis Jasa Ekosistem Terhadap KRP Prioritas, meliputi :</p> <p>1. Rencana Jalan Lintas</p> <p>Jasa Ekosistem terpengaruh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Pangan (EP 1) • Penyediaan Air Bersih (EP 2) • Pengaturan Iklim (EP 3) • Pengaturan Tata Air dan Banjir (EP 4) • Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara (EP 6) <p>2. Rencana Jalur Kereta Api</p> <p>Jasa Ekosistem terpengaruh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Pangan (EP 1) • Penyediaan Air Bersih (EP 2) • Pengaturan Iklim (EP 3) • Pengaturan Tata Air dan Banjir (EP 4) • Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara (EP 6) <p>3. Rencana TRM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Pangan (EP 1) • Penyediaan Air Bersih (EP 2) • Pengaturan Tata Air dan Banjir (EP 4) • Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah (EP 5) • Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara (EP 6) 	<p>4. Kawasan Peruntukan permukiman: Pengembangan zona perumahan, Jasa Ekosistem terpengaruh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Pangan (EP 1) • Penyediaan Air Bersih (EP 2) • Pengaturan Iklim (EP 3) • Pengaturan Tata Air dan Banjir (EP 4) • Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah (EP 5) • Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara (EP 6) Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (EP 1). <p>5. Rencana Bendahar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Pangan (EP 1) • Penyediaan Air Bersih (EP 2) • Pengaturan Iklim (EP 3) • Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah (EP 5) • Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara (EP 6)
---	---

F ANALISIS PENGARUH

No	Tahapan Langkah Kegiatan Analisis	Penjelasan	Metode dan Teknik	Hasil
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya. Dilakukan dengan cara : • Mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dan ketersediaannya, • Mengukur cadangan yang tersedia, tingkat pemanfaatannya yang tidak mengerosi cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang; dan • Mengukur dengan nilai dan distribusi manfaat dari sumber daya alam tersebut secara ekonomi	Teknik analisis : Analisis kualitatif dan kuantitatif Expert judgement (perimbangan ahli) pemetaan sebaran/kebijakan Rencana, dan/atau Program dilaksanakan	Gambaran pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya. Dilakukan dengan cara : • Mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dan ketersediaannya, • Mengukur cadangan yang tersedia, tingkat pemanfaatannya yang tidak mengerosi cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang; dan • Mengukur dengan nilai dan distribusi manfaat dari sumber daya alam tersebut secara ekonomi

A TAHAPAN KLHS RDTR

No	Tahapan Pembuatan (PP 46/Permen 69)
I	Persiapan
A	Identifikasi para pemangku kepentingan
B	Penyusunan KA
II	Tahap Pengalihan Pengaruh KRP
A	Identifikasi dan perumusan isu PB
B	Isu PB strategis (ps 9)
C	Isu PB Prioritas (ps 9) / (psl 20)
D	Identifikasi KRP yang berpengaruh thd LH (ps 10-12) / (psl 22)
III	Analisis pengaruh KRP & isu PB Prioritas
A	Kajian muatan KLHS (ps 13) / (psl 23)
IV	Rumusan Alternatif (ps 15) / (psl 26-27)
V	Rekomendasi (ps 16) / (psl 26-29)
VI	Pengintegrasian (psl 30)
VII	Penjaminan Kualitas (PS 19) / (PS 31-34)
VIII	Pendokumentasian (ps 23) / (psl 35)
IX	Validasi (ps 25) / (psl 36-37)

7

TAHAPAN PERUMUSAN ISU PB

No	Tahapan Langkah Kegiatan	Metode dan Teknik	Hasil
1	Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik (Pasal 8 Ayat 2 PP No 46/2016 dan Pasal 21 Ayat (1) Permen LHKRI Nomor 69/2016/KEP/SETENKUM/L/2020) Teknik Pendukung Kegiatan - Metode curah pendapat/ Metode Kalorimer/ Bola/ Usulan 	Rumusan daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan
2	Perumusan isu pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Pengelompokan isu berdasarkan aspek pembangunan Melihat kesamaan substansi dan/atau memilah sebab-akibat dengan memperhatikan lintas sektor, wilayah, pemangku kepentingan, waktu Melakukan konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk penyempurnaan dan penajaman isu pembangunan berkelanjutan Melakukan konfirmasi dari data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan 	<ul style="list-style-type: none"> Rumusan daftar isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Rumusan daftar isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan kesamaan sebab akibat.
3	Telaah terhadap isu pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan telaah cepat hasil pengelompokan yang mempertimbangkan unsur-unsur paling sensitif Karakteristik wilayah yang ditelaah dalam bentuk spasial (dimulai dengan menggunakan peta Rupa Bumi, peta rencana tata ruang, dan peta kawasan lindung) Tingkat pentingnya potensi dampak Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil telaah sebagai dasar untuk menentukan isu pembangunan berkelanjutan strategis Isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan kriteria dampak strategis (isu dan mempunyai keterkaitan dengan isu tata ruang).
4	--	--	--

8

D TAHAPAN PERUMUSAN ISU PB

No	Tahapan Langkah Kegiatan	Metode dan Teknik	Hasil
4	Kajian perkiraan tentang dampak pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Membuat perkiraan tentang tingkat pentingnya potensi dampak berdasarkan indikasi cakupan wilayah dan frekuensi/intensitas dampak Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan hasil telaah sebab-akibatnya 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil telaah sebagai dasar untuk menentukan isu pembangunan berkelanjutan strategis Rumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis
5	Uji silang hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Uji silang hasil identifikasi isu pembangunan terhadap muatan Pasal 9 ayat (1) PP No 46 Tahun 2016. Muatan hasil identifikasi pembangunan berkelanjutan dengan muatan Pasal 9 ayat (1) PP No 46 Tahun 2016. Keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus dilaku, serupai dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung. 	<ul style="list-style-type: none"> Gambaran keterkaitan kajian identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dengan muatan Pasal 9 ayat (1) PP No 46 Tahun 2016.

D TAHAPAN PERUMUSAN ISU PB

No	Tahapan Langkah Kegiatan	Metode dan Teknik	Hasil
6	Penentuan isu strategis dan prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Uji silang hasil identifikasi isu pembangunan terhadap muatan Pasal 9 ayat (1) PP No 46 Tahun 2016 Pembobotan hasil analisis uji silang isu pembangunan berkelanjutan strategis Muatan materi Pasal 9 ayat (2) PP No 46 Tahun 2016, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; Perifera dampak dan risiko Lingkungan Hidup; Kinerja layanan atau jasa ekosistem; Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam; Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam; Ketahanan dan potensi keberlanjutan hayati; Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan serendah-rendah masyarakat serta kerentanan keberlanjutan penghidupan masyarakat; Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil telaah sebagai dasar untuk menentukan isu strategis dan prioritas Rumusan isu strategis dan prioritas

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Daftar Isu Panjang (Long List)

No	Isu	Relevansi
1	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
2	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
3	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
4	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
5	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
6	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
7	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
8	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
9	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
10	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
11	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
12	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
13	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
14	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
15	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
16	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
17	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
18	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
19	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
20	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
21	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
22	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
23	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
24	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
25	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
26	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
27	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
28	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
29	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
30	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
31	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
32	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
33	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
34	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
35	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
36	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
37	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
38	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
39	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
40	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
41	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
42	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
43	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
44	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
45	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
46	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
47	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
48	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
49	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
50	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
51	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
52	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
53	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
54	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
55	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
56	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
57	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
58	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
59	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
60	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
61	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
62	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
63	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
64	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
65	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
66	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
67	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
68	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
69	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
70	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
71	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
72	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
73	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
74	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
75	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
76	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
77	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
78	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
79	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
80	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
81	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
82	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
83	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
84	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
85	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
86	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
87	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
88	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
89	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
90	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
91	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
92	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
93	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
94	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
95	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
96	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
97	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
98	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
99	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
100	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Daftar Isu Panjang (Long List)

No	Isu	Relevansi
1	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
2	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
3	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
4	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
5	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
6	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
7	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
8	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
9	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
10	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
11	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
12	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
13	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
14	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
15	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
16	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
17	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
18	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
19	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
20	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
21	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
22	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
23	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
24	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
25	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
26	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
27	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
28	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
29	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
30	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
31	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
32	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
33	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
34	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
35	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
36	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
37	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
38	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
39	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
40	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
41	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
42	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
43	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
44	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
45	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
46	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
47	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
48	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
49	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
50	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
51	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
52	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
53	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
54	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
55	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
56	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
57	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
58	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
59	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
60	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
61	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
62	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
63	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
64	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
65	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
66	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
67	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
68	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
69	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
70	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
71	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
72	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
73	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
74	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
75	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
76	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
77	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
78	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
79	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
80	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
81	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
82	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
83	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
84	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
85	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
86	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
87	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
88	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
89	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
90	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
91	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
92	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
93	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
94	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
95	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
96	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
97	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
98	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
99	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...
100	... (daftar isu panjang) (relevansi) ...



DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN
CILACAP



KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RDTR

Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Maos
Kabupaten Cilacap

LAMPIRAN **5**

**PROSIDING FOCUS GROUP
DISCUSSION (FGD) 1**





**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan MT. Haryono. Nomor. 79. Telepon / Faksimile (0282) 533073
Website : www.dlh.cilacapkab.go.id E-mail : dlhcilacap@gmail.com

CILACAP

Kode Pos 53222

**BERITA ACARA
FOCUS GROUP DISCUSSION 1 (FGD-1)
PEMBAHASAN POKJA KLHS
DALAM RANGKA TINDAK LANJUT
PENYEPAKATAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN STRATEGIS
DAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PRIORITAS
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
KAWASAN PERKOTAAN MAOS KABUPATEN CILACAP
Nomor : 660.1/1065/24**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22 Agustus 2022), yang dilaksanakan Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai telah diadakan *Focus Group Discussion* 1 (FGD-1) Kelompok Kerja KLHS RDTR Kabupaten Cilacap. Kegiatan berupa Diskusi Tindak Lanjut Pembahasan hasil penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan, Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap berlokasi di Ruang Rapat UPTD Laboratorium DLH Cilacap Jalan Bromo Timur No. 12 Cilacap, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Ibu Sri Murniyati dan dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cilacap serta akademisi, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan masyarakat di Kabupaten Cilacap sebagaimana terlampir dalam daftar hadir pelaksanaan kegiatan.

Adapun beberapa hal yang dihasilkan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Pelaksanaan diskusi teknis ini dilakukan melalui proses pemaparan mengenai hasil kajian yang disusun oleh tim KLHS yang sudah disepakati oleh Tim POKJA KLHS terkait wilayah perencanaan di Kabupaten Cilacap;
2. Daftar Isu Pembangunan Berkelanjutan hasil telaah isu berdasarkan data sekunder, isu di lapangan (observasi dan wawancara), telaah terhadap Konsep Awal RDTR Kawasan Perkotaan Maos dan masukan dari kegiatan Konsultasi Publik Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, dirumuskan Daftar Panjang (*long list*) Isu Pembangunan Berkelanjutan yang berjumlah 63 isu dan terbagi menjadi 48 isu pada aspek lingkungan, 7 isu pada aspek sosial dan 8 isu pada aspek ekonomi yang dapat dilihat pada bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

3. Kesepakatan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis berdasarkan hasil penapisan terhadap Daftar Panjang (*long list*) Isu Pembangunan Berkelanjutan yang berjumlah 12 Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis dapat dilihat pada bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
4. Kesepakatan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas berdasarkan hasil penapisan terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis yang berjumlah 7 Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas dapat dilihat pada bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
5. Daftar isu pembangunan berkelanjutan prioritas yang disepakati kemudian akan dilakukan Analisis Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang Berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup oleh Tim KLHS;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dengan notulensi dan daftar hadir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini (terlampir).

**DAFTAR PANJANG (LONG LIST) ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DAN RENCANA DETAIL
TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN MAOS KABUPATEN CILACAP**

Daftar Isu Pembangunan Berkelanjutan hasil telaah isu berdasarkan data sekunder, isu di lapangan (observasi dan wawancara), telaah terhadap Konsep Awal RDTR Kawasan Perkotaan Maos dan Masukan Konsultasi Publik-1 (KP-1) adalah sebagai berikut:

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan
	TEMA LINGKUNGAN
1	Terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Karangreja
2	Potensi alih fungsi lahan pada rencana pola ruang dan penyediaan prasarana dan sarana RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap
3	Potensi terjadi alih fungsi lahan akibat rencana pengembangan jalan dan jalan kereta api
4	Limbah industri rumah tangga mayoritas belum dilakukan pengolahan
5	Limbah industri rumah tangga ada yang belum dilakukan pengolahan
6	Akses sanitasi yang layak dan aman belum optimal
7	Masih adanya penanganan air limbah rumah tangga yang belum memenuhi standar
8	Masih adanya praktik BABs (Buang Air Besar Sembarangan) tertutup
9	Pengelolaan sampah belum optimal
10	Pembuangan sampah sembarangan ditepi jalan nasional masih terjadi
11	TPS dan angkutan sampah ke TPA belum memadai
12	Bank sampah hanya ada di 3 desa: Desa Glempang, Klapagadan

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan
	dan karangkemiri
13	Potensi terjadi alih peningkatan pencemaran udara dan perubahan iklim akibat meningkatnya kegiatan industri, perdagangan, perumahan, transportasi dan pertanian
14	Masih adanya praktik pembakaran sampah
15	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau
16	Adaptasi dan Mitigasi terhadap perubahan iklim belum optimal
17	Terjadi kekeringan, banjir dan genangan
18	Rendahnya kualitas jalan menuju WP
19	Sistem transportasi dan angkutan jalan belum optimal.
20	Halte belum optimal: depan balai desa Glempang, depan SMAN 1 Maos, Depan Stiker Seruling Mas.
21	Trayek dan angkutan belum optimal: Ada 2 trayek: Adipala Maos 1 kendaraan, Sahwangi Maos 4 kendaraan.
22	Belum ada terminal, saat ini di Adipala
23	Terdapat Perlintasan Kereta api yang berpotensi kemacetan dan kecelakaan
24	Pemindahan kantor Kecamatan dari Desa Klapagada ke desa Karangreja berpotensi terjadi pengembangan infrastruktur penunjang
25	Penataan Drainase kurang optimal
26	Kurangnya infrastruktur sumber daya air untuk pertanian
27	Potensi menurunnya produksi perikanan budidaya di wilayah yang bersebelahan dengan DAS Serayu
28	Akses air minum yang layak dan berkelanjutan belum optimal
29	Penduduk banyak menggunakan sumber air minum non perpipaan dari sumur
30	Masih kurangnya akses jaringan air minum perpipaan
31	Menurunnya kuantitas air permukaan dan air bawah tanah
32	Menurunnya sumber mata air
33	Berkurangnya areal infiltrasi air tanah
34	Adanya degradasi lahan catchment area (daerah resapan)
35	Masih adanya sumur bor dalam pemenuhan kebutuhan air (misal : industri, perumahan)
36	Masih perlunya pembangunan embung sebagai penampung air untuk irigasi
37	Kurangnya air baku untuk memenuhi kebutuhan kedepan
38	Banjir dan genangan di Klapagada, Pasugihan Karang kemiri
39	Potensi Bencana Gempa Bumi di seluruh wilayah Kecamatan
40	Potensi Bencana Kekeringan
41	Potensi ancaman tsunami
42	Bencana Angin puting Beliung di seluruh wilayah Kecamatan
43	Penanganan kebencanaan belum optimal
44	Kurang optimalnya kinerja infrastruktur irigasi
45	Perubahan Iklim ekstrim menyebabkan penurunan hasil pertanian
46	Bencana hidrometeorologi berupa angin kencang, hujan lebat dan

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan
	banjir merendam tanaman padi
47	Potensi penurunan hasil pertanian pangan terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
48	Masih adanya ancaman OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)
TEMA SOSIAL	
1	Terdapat lingkungan permukiman kumuh
2	Adanya Rumah Tidak Layak Huni
3	Masih terdapat angka kemiskinan
4	Kualitas sumber daya manusia belum optimal
5	Masih terdapatnya angka pengangguran
6	Masih adanya kesenjangan antar wilayah
7	Masih adanya kesenjangan pendapatan masyarakat
TEMA EKONOMI	
1	Terdapat penduduk miskin
2	Kurangnya inovasi dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata
3	Pengembangan UKM belum optimal
4	Pengembangan produk berbahan lokal belum optimal
5	Penataan kawasan perdagangan dan jasa belum optimal
6	Masih terbatasnya pasar dan toko modern seperti: toko swalayan, mall dan lain-lain
7	Pasar tradisional memerlukan penataan
8	Pasar Sentolo Baru perlu penataan untuk kuliner

**KESEPAKATAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN STRATEGIS
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DAN RENCANA DETAIL
TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN MAOS KABUPATEN CILACAP**

Kesepakatan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis berdasarkan hasil penapisan terhadap Daftar (*Long List*) Isu Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

Isu Lingkungan

- 1 Terdapat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
- 2 Meningkatnya Pencemaran air dan tanah akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi, air limbah dan persampahan
- 3 Meningkatnya pencemaran udara dan kurangnya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
- 4 Belum optimalnya penataan jaringan prasarana wilayah
- 5 Belum optimalnya akses air minum dan kurangnya air baku
- 6 Kawasan termasuk rawan bencana
- 7 Potensi terjadi penurunan produktifitas pertanian

Isu Sosial

- 8 Terdapat angka kemiskinan
- 9 Terdapat angka pengangguran dan belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia
- 10 Terdapat Kesenjangan

Isu Ekonomi

- 11 Belum optimalnya pengembangan produk dan potensi lokal
- 12 Belum optimalnya pengembangan pasar tradisional dan pasar modern

KESEPAKATAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PRIORITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN MAOS KABUPATEN CILACAP

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas berdasarkan hasil penapisan terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis adalah sebagai berikut :

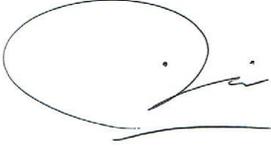
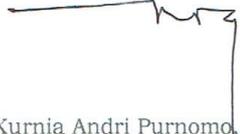
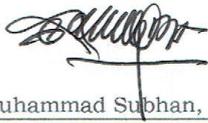
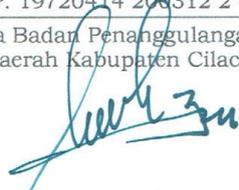
1. Kawasan termasuk rawan bencana
2. Belum optimalnya akses air minum dan kurangnya air baku
3. Meningkatnya Pencemaran air dan tanah akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi, air limbah dan persampahan
4. Meningkatnya pencemaran udara dan kurangnya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
5. Belum optimalnya penataan jaringan prasarana wilayah
6. Terdapat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
7. Potensi terjadi penurunan produktifitas pertanian

Penandatanganan Berita Acara Focus Discussion Group -1 (FGD-1)
Pembahasan Pokja KLHS Penyepakatan Isu Pembangunan Berkelanjutan
Strategis dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan
Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
Disepakati di Cilacap pada tanggal 22 Agustus 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP



SRMURNIYATI S.T. M.Si.
NIP. 197009101997032005

PEMERINTAH DI KABUPATEN CILACAP	
<p>a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cilacap</p>  <p>Cicik Setyorini, S.P. NIP. 19700507 199803 2 004</p>	<p>a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cilacap</p>  <p>Kurnia Andri Purnomo, S.T., M.T. NIP. 19860413 200903 1 002</p>
<p>a.n. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap</p>  <p>Muhammad Subhan, S.E. NIP. 19660525 198903 1 011</p>	<p>a.n. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Cilacap</p>  <p>Yoppi Juli Priyono, A.Md. NIP. 19890717 202012 1 010</p>
<p>a.n. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap Subkoordinator Standarisasi Mutu</p>  <p>Edi Sukanto, S.Sos., M.M. NIP. 19670926 199303 1 002</p>	<p>a.n. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap</p>  <p>Indriati Dwi Cahyani, S.T., M.M. NIP. 19720414 200312 2 001</p>
<p>a.n. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cilacap</p>  <p>Itrinna Fajar, S.P., M.Eng., M.URP. NIP. 19860323 201212 2 001</p>	<p>a.n. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap</p>  <p>Kelik Gunantoro S.T., M.Eng. NIP. 19740127 200212 1 005</p>
<p>a.n. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap</p>  <p>Marsid, S.T. NIP. 19730516 200801 1 007</p>	<p>a.n. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap</p>  <p>Singgih Wijayanto, S.T. NIP. 19921007 202012 1 011</p>

NOTULENSI

NO	POIN RAPAT	KETERANGAN
1	Pembukaan rapat	Oleh Kepala Dinas LH Cilacap
	Saran Pendapat & Tanggapan	
	Tahap pengkajian pengaruh KRP: Sudah ada longlist isu pembangunan berkelanjutan → Isu PB Strategis dan Prioritas	<p>KP Maos = (63) – (12) – (7)</p> <p>Penyusunan D3TLH = + 1 layer tipe vegetasi – menyurati BPKH Jawa Madura</p>
	Analisa D3TLH -Klasifikasi lahan dan tingkat kemampuan	
2	Poin 7 dan poin 3 bisa ditukar? Sepertinya lebih prioritas pencemaran udara dan p. iklim?	BPN
3	Tanggapan Konsultan dgn menampilkan rekap perhitungan ranking isu prioritas	Oleh konsultan
4	Skoring dan prioritas tetap mengacu pada hasil konsultan	Disnakerin – Pak Wagino
5	Prioritas hal yang paling urgent untuk ditangani, kalau kita melakukan perubagan skoring bias asal ada data yang mendukung, skala dampak Lebih baik tidak usah berubah, kita drop saja jika memang tidak masuk ke 5 prioritas. Jika memang ada isu yang mirip, dijadikan satu saja.	BPBD
6	Kawasan rawan bencana menjadi prioritas setuju sekali, gempa bumi Maos tahun 1930 an. Memang ada daerah yang cukup rawan karena berada di pinggir sungai serayu, yaitu abrasi di karangrena dan karangkemiri. Sependapat apabila isu PB Prioritas ada 7 item yang akan dimasukan semua. Alih fungsi lahan masuk kedalam isu setuju sekali karena Maos akan dilalui Jalan Tol.	Camat Maos
7	Kesimpulan KLHS RDTR Kwasan Perkotaan Maos disepakati 7 Isu PB Isu Prioritas	
8	Revisi hasil konsinyasi KRP Berdampak KRP Jalan Tol tetap masuk, KRP Arteri primer, KRP Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan jasa, Peruntukan Industri. KRP Jalur Kereta api baru tidak dimasukan	DPUPR – Dani 4 KRP Maos terpilih.
9	Identifikasi dan longlist maos banyak sekali. Lebih banyak dari sidareja. Namun, kenapa skorings Isu PB strategis maos 7	<p>Penyusunnya beda?</p> <p>Situasi dan kondisinya berbeda.</p>
10	Isu PB Strategis yg terpilih akan disesuaikan dengan KRP yang sudah ditentukan	Konsultan1
11	Terkait Abrasi tebing sungai di Karangrena, bisa berkoordinasi dengan BBWS Serayu Opak. Isu PB strategis Maos terkait penurunan produktivitas pertanian. Kebijakan nasional dan arahan presiden, bahwa bagian produktivitas pertanian menjadi daya tahan contohnya pada penanganan covid– swasembada mandiri pangan.	<p>UNUGHA</p> <p>Kenapa produktifitas pertanian nomor 8? Karena berdasarkan data penyediaan pangan 114,62 Ha</p> <p>Akan mengurangi produktifitas 1074 ton per tahun</p>

12	Produktifitas pertanian di Kawasan Maos saat ini sudah baik	
13	<p>Ketersediaan lahan Produksi = luas lahan x produktifitas Beberapa daerah maos ada endemic hama wereng coklat Produksi ada titik optimal, tidak mungkin akan meningkat sekali, hal itu akan menyebabkan penurunan Jadi Cilacap bagian timur lumbung pertanian</p> <p>Terkait parameter2 yang tadi disebutkan konsultan bisa membuat narasi terhadap skoring isu PB Strategis dan Prioritas</p>	
14	Ada data rdtr yg disusun oleh PUPR – 4 KRP Maos 63 isu PB	
15	Mempertimbangkan rumus2 ilmiah yang ada, sehingga menghasilkan rumusan data / skoring yang sesuai	PNC
16	Terkait perolehan data kenapa didapatkan hal seperti tsb? Dinkes punya data 10 besar prevalensi penyakit. Penyakit akibat media air. Jika membutuhkan data terkait hal tersebut bisa meminta data ke puskesmas Maos	<p>Dinkes</p> <p>Tanggapan Konsultan : Tidak bisa digabung, krn ada struktur ruang dan sub bab tersendiri.</p>
17	<p>KLHS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frame KLHS (harus disamakan dulu) dpt diimplementasikan ke pemda dalam bentuk KRP - KLHS Ex-ante = Semangat integrasinya - Fokusnya pada lingkungan hidup (di dalamnya juga mengakomodir isu ekonomi social dan tata kelola) - Yang divalidasi kita sebagai tim pokja, bukan dari konsultan - Pedoman penyusunan KLHS umum, bisa menjadi acuan - Dari isu PB belum ada analisis keterkaitan, perlu ditambahkan - Proses isu PB menjadi isu prioritas 	Pak Ady (Kabid 2 PSLB3 & PK)
20	<p>Split up progress, agar bisa next meeting langsung KP 2 RPPLH masih menggunakan draft yg belum ditetapkan Bisa pakai D3TLH, tp minus layer tipe vegetasi → bersurat ke BPKH Jawa Madura</p> <p>Overview D3TLH Sesuai Juknis 2019</p> <p>Jasa Ekosistem (20) akan ditampilkan Dioverlay dengan masing-masing KRP</p>	Konsultan
22	Penutupan	

Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771 – 534775 Faksimile (0282) 535222
Website : www.cilacapkab.go.id E-mail : setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

Cilacap, 18 Agustus 2022

Nomor : 005/02385/24/CLP
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth.
Bapak / Ibu / Saudara
Sebagaimana daftar terlampir
di -

C I L A C A P

Mengharap kehadiran Bapak / Ibu / Saudara pada :

Hari/ tanggal : Senin, 22 Agustus 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Acara : Rapat Membahas Focus Group Discussion (FGD) 1 & 2
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos
dan Kawasan Perkotaan Sidareja
Tempat : Ruang Adipura DLH Kabupaten Cilacap
Jalan MT Haryono No. 79, Donan, Cilacap Tengah,
Kabupaten Cilacap
Catatan : 1. Materi rapat dapat di download melalui *link*
<http://bit.ly/lapantaraklhrsrdtr21>
2. Saran/masukan/tanggapan secara tertulis disampai
kan melalui alamat e-mail [bidangpp.dlhcilacap@
gmail.com](mailto:bidangpp.dlhcilacap@gmail.com) atau ke nomor WA Sdr. Doni Alfianto, ST
(No. Hp. 081226819586)

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI CILACAP
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

AWALUDDIN MUURI, AP, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 199412 1 001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran I : Surat Dinas Lingkungan Hidup
Nomor : 005/00106/24/CLP
Tanggal : 4 Agustus 2022

Daftar Yang Diundang :

1. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan pada DLH Kabupaten Cilacap
2. Kepala Bidang Penataan Ruang pada DPUPR Kabupaten Cilacap (menghadirkan konsultan penyusun RDTR)
3. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang pada DPUPR Kabupaten Cilacap
4. Sub koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada DLH Kabupaten Cilacap
5. Sub Koordinator Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup pada DLH Kabupaten Cilacap
6. Sub Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan pada DLH Kabupaten Cilacap
7. Direktur CV Ideal Mandiri Konsultan

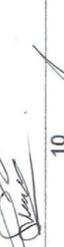


Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)



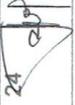
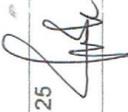
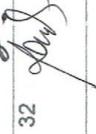
RAPAT PEMBAHASAN FOCUS GROUP DISCUSSION I DAN II KLHS RDTR KP MAOS DAN KP SIDAREJA
CILACAP, 22 AGUSTUS 2022

DAFTAR HADIR

No	NAMA LENGKAP	L/P	KEDUDUKAN/JABATAN	INSTANSI/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SAH MURMAYATI	P	Kepala Dinas	DLH	
2	Adnan Harris Sami	L	STAF PM	Kec. Sidareja	
3	Theresia Evila	P	Dosen	Politeknik Negeri Cilacap	
4	Stait Sunarto	L	Dosen	UNUHA Cilacap	
5	Vivy R	L	Dosen	Polunite Negeri Cuy	
6	IIS ERIKASARI	P	STAFF	DISPERTAN	
7	Tri Galabowo		Jft. Keskinerja	DINKE S	
8	Fritgony. A	L	Ambis Alunakultur	Dinas Perikanan	
9	Siti Nuglirah W.	P	STAF PM	Kec. Maos	
10	Heran S	P	Ketua	Pepeliga	
11	MAR-81D	L	Subkoordinator OP	PSDA	



RAPAT PEMBAHASAN FOCUS GROUP DISCUSSION I DAN II KLHS RDTR KP MAOS DAN KP SIDAREJA
CILACAP, 22 AGUSTUS 2022

24	PisHin TH	P	Pedat Analisis Media	DLH Cg-	
25	Tras Muska NP	P	Analisis LH	DLH Cg	
26	Dani Alqunto	L	Analisis LH	DLH Cg	
27	DWI WAHYU N.	L	Analisis LH	DLH Cg	
28	Ary C.	L	keber II	DLH	
29	Sri Hartono	L	stay	MH	
30	Anif	L	stay	DLH	
31	Wan kun.	L	KABO RRM	DLH	
32	Pengy NT	L	Peran.	DLH	
33					
34					

Dokumentasi





Materi Presentasi

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILAPAC

KLHS RDTR
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Maas
Kabupaten Cilacap

IMC
INTEGRATED MANAGEMENT CONSULTANTS

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 1

Maksud Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan ini adalah mengintegrasikan temuan-temuan proses pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memberikan masukan terhadap rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam rangka penyusunan rencana detail tata ruang Kawasan Perkotaan Maas terhadap aspek lingkungan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyiapkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perda RDTR Kawasan Perkotaan Maas yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan Materi Teknis RDTR Kawasan Perkotaan Maas dan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (RP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang meniadakan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Sasaran Penyusunan Dokumen KLHS Perda RDTR Kawasan Perkotaan Maas meliputi:

- Terdentifikasinya kondisi dan permasalahan lingkungan hidup di Kawasan Perkotaan Maas.
- Terdentifikasinya kemampuan wilayah (daya dukung) dalam menampung perkembangan kegiatan pembangunan.
- Terdentegrasinya konsep-konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen rencana tata ruang.

Latar Belakang

UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 - 2021, mengamanatkan bahwa Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai dokumen perencanaan tata ruang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap dokumen RDTR sebagai instrumen untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan disusun sebagai bentuk antisipasi dan konsekuen kebijakan, rencana dan program dalam Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Maas terhadap lingkungan hidup serta memenuhi kebutuhan akan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maas adalah seluruh desa dan kelurahan yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan di Kawasan Perkotaan Maas, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, meliputi Kabupaten, Rencana, dan/atau Program yaitu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program RDTR Kawasan Perkotaan Maas.

Lingkup Materi

Lingkup materi kajian Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maas adalah sebagai berikut:

- Perencanaan pembangunan berkelanjutan.
- Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Perencanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Ruang Lingkup

Referensi Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai referensi hukum dalam kegiatan Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maas sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.69/MENLHK/SETJEN/KUMH/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031

Gambaran Umum Perkotaan Maas

LOKASI
Kawasan Maas secara umum memiliki bentuk datar yang tinggi, dengan elevasi rata-rata berkisar antara 100-150 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan yang modern dan berwawasan lingkungan.

KLASIFIKASI
Kawasan Maas secara umum memiliki 5 (lima) jenis tanah, yaitu tanah pertanian, tanah perikanan, tanah hutan, tanah industri, dan tanah perumahan. Kawasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan yang modern dan berwawasan lingkungan.

REKORD
Kawasan Maas secara umum memiliki 5 (lima) jenis tanah, yaitu tanah pertanian, tanah perikanan, tanah hutan, tanah industri, dan tanah perumahan. Kawasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan yang modern dan berwawasan lingkungan.

A TAHAPAN KLHS RDTR

No	Tahapan Pembuatan (PP 46/Permen 69)
I	Persiapan
A	Identifikasi para pemangku kepentingan
B	Penyusunan KA
II	Tahap Pengujian Pengaruh KRP
A	Identifikasi dan pemusatan isu PB
B	Isu PB strategis (ps 9)
C	Isu PB Prioritas (ps 9) / (psl 20)
D	Identifikasi KRP yang berpengaruh thd LH (ps 10-12) / (psl 22)
III	Analisis pengaruh KRP & isu PB Prioritas
A	Kajian muatan KLHS (ps 13) / (psl 23)
IV	Rumusan Alternatif (ps15) / (psl 26-27)
V	Rekomendasi (ps 16) / (psl 26-29)
VI	Pengintegrasian (psl 30)
VII	Penjaminan Kualitas (PS 19) / (PS 31-34)
VIII	Pendokumentasian (ps 23) / (psl 35)
IX	Validasi (ps 25) / (psl 36-37)

TAHAPAN PERUMUSAN ISU PB

No	Tahapan Langkah Kegiatan	Metode dan Teknik	Hasil
1.	Identifikasi dan pemusatan isu pembangunan berkelanjutan	Menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik (Pasal 8 Ayat 2 PP No 46/2016 dan Pasal 21 Ayat (1) Permen LH RI Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUMH/12/2017) Teknik Pendukung Kegiatan - Metode curan pendapat/ Metode Kujalimber (Diskusi) Literatur	Rumusan daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan
2.	Pemusatan isu pembangunan berkelanjutan	Pengalokasian isu berdasarkan aspek pembangunan Melihat kesamaan substansi dan/atau masalah sebab-akibat dengan memperhatikan (sifat, lokasi, wilayah, pemangku kepentingan, waktu) Melakukan konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk pengujian dan penajaman isu pembangunan berkelanjutan Melakukan konfirmasi dari lista atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan	Rumusan daftar isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Rumusan daftar isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan kesamaan sebab akibat.
3.	Telaah terhadap isu pembangunan berkelanjutan	Melakukan telaah cepat hasil pengujian yang mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit: Karakteristik wilayah yang ditelaah dalam bentuk spasial (melalui dengan menggunakan peta Rupa Bumi, peta rencana tata ruang dan peta kawasan khusus). Tingkat pentingnya potensi dampak; Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan	Hasil telaah sebagai dasar untuk menentukan isu pembangunan berkelanjutan strategis Isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan tingkat dampak strategis isu dan mempunyai keterkaitan dengan isu tata ruang.
4.			

D TAHAPAN PERUMUSAN ISU PB

No	Tahapan Langkah Kegiatan	Metode dan Teknik	Hasil
4.	Kajian kerangka tentang identifikasi isu pembangunan Berkelanjutan	Membuat kerangka tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pentingnya potensi dampak berdasarkan indikator cakupan wilayah dan frekuensi/intensitas dampak; • Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan hasil telah sebab-akibatnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil telah sebagai dasar untuk menentukan isu pembangunan berkelanjutan strategis • Rumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis
5.	Uji silang hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan	Uji silang hasil identifikasi isu pembangunan terhadap muatan Pasal 9 ayat (1) PP No 46 Tahun 2016. Muatan materi Pasal 9 ayat (1), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik wilayah; 2. Tingkat pentingnya potensi dampak dan risiko; 3. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan; 4. Keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; 5. Muatan Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 6. Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berkaitan dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung. 	Gambaran keterkaitan kajian hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dengan muatan Pasal 9 ayat (1) PP No 46 Tahun 2016.

D TAHAPAN PERUMUSAN ISU PB

No	Tahapan Langkah Kegiatan	Metode dan Teknik	Hasil
6.	Pemertuan isu strategis dan prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • Uji silang hasil identifikasi isu pembangunan terhadap muatan Pasal 9 ayat (2) PP No 46 Tahun 2016 • Pembobotan hasil analisis uji silang isu pembangunan Berkelanjutan strategis • Muatan materi Pasal 9 ayat (2) PP No 46 Tahun 2016, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; 2. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup; 3. Kinerja layanan jasa ekosistem; 4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam; 5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam; 6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; 7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; 8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat; 9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau • Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. 	Hasil telah sebagai dasar untuk menentukan isu strategis dan prioritas

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Daftar Isu Panjang (Long List)

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan
1.	Terdapat alokasi lahan pertanian menjadi kawasan perikanan di Kabupaten...	Terdapat alokasi lahan pertanian menjadi perikanan
2.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Mengakibatkan perubahan di darat, akibat belum optimalnya pengalihan, serta, di bidang dan perikanan
3.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Mengakibatkan penurunan udara dan lingkungan akibat dari kegiatan terhadap perubahan iklim
4.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Masih sulitnya pemenuhan program prasarana air minum
5.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Masih sulitnya akses di berbagai lingkungan di air
6.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Kawasan terancam rusak bencana
7.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Meningkatkan ancaman perikanan perikanan

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Daftar Isu Panjang (Long List)

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan
1.	Terdapat alokasi lahan pertanian menjadi kawasan perikanan di Kabupaten...	Terdapat alokasi lahan pertanian
2.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Terdapat alokasi pengalihan dan belum optimalnya cakupan, jumlah, dan prioritas
3.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Terdapat lingkungan
4.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Masih sulitnya pemenuhan program prasarana air minum
5.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Masih sulitnya akses di berbagai lingkungan di air
6.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Kawasan terancam rusak bencana
7.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Meningkatkan ancaman perikanan perikanan

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Daftar Isu Panjang (Long List)

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan
1.	Terdapat alokasi lahan pertanian menjadi kawasan perikanan di Kabupaten...	Terdapat alokasi lahan pertanian
2.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Terdapat alokasi pengalihan dan belum optimalnya cakupan, jumlah, dan prioritas
3.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Terdapat lingkungan
4.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Masih sulitnya pemenuhan program prasarana air minum
5.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Masih sulitnya akses di berbagai lingkungan di air
6.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Kawasan terancam rusak bencana
7.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Meningkatkan ancaman perikanan perikanan

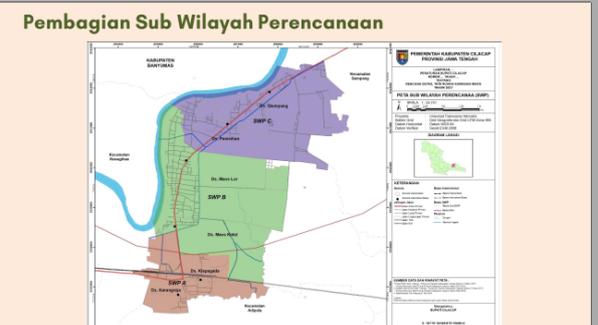
Identifikasi Isu Strategis - Isu Prioritas

No	Isu Pembangunan Strategis	Penjelasan
1.	Terdapat alokasi lahan pertanian menjadi kawasan perikanan di Kabupaten...	Terdapat alokasi lahan pertanian
2.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Terdapat alokasi pengalihan dan belum optimalnya cakupan, jumlah, dan prioritas
3.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Terdapat lingkungan
4.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Masih sulitnya pemenuhan program prasarana air minum
5.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Masih sulitnya akses di berbagai lingkungan di air
6.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Kawasan terancam rusak bencana
7.	Terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan...	Meningkatkan ancaman perikanan perikanan

Tinjauan RDTR Perkotaan Maas

Tujuan penataan ruang WP Maas yaitu "Mewujudkan WP Maas yang mandiri berbasis pada sektor pertanian dan perdagangan jasa". Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang WP Maas, maka disusun kebijakan penataan ruang:

1. Kebijakan pengaturan pengembangan kegiatan perkotaan yang efisien sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
2. Kebijakan pengaturan pusat-pusat pelayanan dan pengembangan sistem prasarana perkotaan
3. Kebijakan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan beserta sistem prasarana pendukungnya
4. Kebijakan pelestarian dan perlindungan zona lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan
5. Kebijakan pengembangan zona budidaya untuk mendukung aktivitas perkotaan
6. Kebijakan pengaturan tata bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan



Perbandingan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Lahan

Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah

Perhitungan Ketersediaan (Supply) Lahan :

$$S_i = \frac{\sum (P_i \times H_i) \times \frac{1}{Ph}}{Ph}$$

- Keterangan :
- S_i : Ketersediaan Lahan (Ha)
 - P_i : Produk aktual tiap jenis komoditi (satuan tergantung kepada jenis komoditas)
 - H_i : Harga satuan tiap jenis komoditas (Rp/Satuan) di tingkat produsen
 - Ph : Produk potensial beras (kg/ha)
 - Pho : Produk potensial beras (kg/ha)
 - Selingga diolah:
 - Σ (P_i × H_i) = Rp. 258.576.873.000
 - Ph = Rp. 8.500/kg
 - Pho = 4.498 kg/ha
 - SL = (258.576.873.000/8500) × (1/4.498)
 - SL = 6.763,19 Ha

No	Komoditas	Produksi (kg) Kecamatan 2021	Harga/Komoditas (Rp)	Penggunaan (kg)	Rasio Ketersediaan (Ketersediaan/Perkiraan) (H _i × P _i / Ph)
1	Padi	416.000	8.500	3.516.000.000	14,96
2	Ubi	2.000	2.000	40.000.000	0,09
3	Ubi Jalar	1.000	2.000	20.000.000	0,05
4	Ubi Merah	1.000	2.000	20.000.000	0,05
5	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
6	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
7	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
8	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05
9	Ubi Kuning	1.000	2.000	20.000.000	0,05
10	Ubi Merah Muda	1.000	2.000	20.000.000	0,05
11	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
12	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
13	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
14	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05
15	Ubi Kuning	1.000	2.000	20.000.000	0,05
16	Ubi Merah Muda	1.000	2.000	20.000.000	0,05
17	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
18	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
19	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
20	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05
21	Ubi Kuning	1.000	2.000	20.000.000	0,05
22	Ubi Merah Muda	1.000	2.000	20.000.000	0,05
23	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
24	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
25	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
26	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05
27	Ubi Kuning	1.000	2.000	20.000.000	0,05
28	Ubi Merah Muda	1.000	2.000	20.000.000	0,05
29	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
30	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
31	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
32	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05
33	Ubi Kuning	1.000	2.000	20.000.000	0,05
34	Ubi Merah Muda	1.000	2.000	20.000.000	0,05
35	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
36	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
37	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
38	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05
39	Ubi Kuning	1.000	2.000	20.000.000	0,05
40	Ubi Merah Muda	1.000	2.000	20.000.000	0,05
41	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
42	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
43	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
44	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05
45	Ubi Kuning	1.000	2.000	20.000.000	0,05
46	Ubi Merah Muda	1.000	2.000	20.000.000	0,05
47	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
48	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
49	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
50	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05

Perhitungan Kebutuhan (Demand) Lahan

$$D_i = \frac{N \times KHL_i}{Ph}$$

- Keterangan :
- D_i : Total kebutuhan lahan setara beras (Ha)
 - N : Jumlah penduduk (orang)
 - KHL_i : Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk
- Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk mengkonversi kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal.
 - Kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/tahun (1000kg/besarkapita/tahun).
 - Produktivitas beras lokal, sebesar 6.498 kg/ha/tahun.

Jumlah penduduk Kecamatan Maos Tahun 2021 (N) sebesar 27.617 jiwa, sedangkan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk di Kecamatan Maos sebesar 0,22 Ha (1 ton beras/kapita/tahun dibagi 4.498 kg/ha/tahun)

$$DL = 27.617 \times 0,22 = 6.075,74 \text{ Ha}$$

Penentuan Status Daya Dukung Lahan

Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (S_i) dan kebutuhan lahan (DL)

- Bila S_i > DL, daya dukung lahan dinyatakan surplus.
- Bila S_i < DL, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terampai.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas didapatkan bahwa :

SL (6.763,19 Ha) < DL (6.075,74 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan pada tahun 2021 dinyatakan surplus. Kebutuhan pada tahun ini masih memenuhi terkait ketersediaan lahan.

Status Daya Dukung Lahan (Proyeksi 2042)

Ketersediaan (Supply) Lahan

- Σ (P_i × H_i) = Rp. 829.291.061.692
- Ph = Rp. 27.262/kg
- Pho = 4.498 kg/ha
- SL = (829.291.061.692/8500) × (1/4.498)
- SL = 21.690 Ha

No	Komoditas	Produksi (kg) Kecamatan 2042	Harga/Komoditas (Rp)	Penggunaan (kg)	Rasio Ketersediaan (Ketersediaan/Perkiraan) (H _i × P _i / Ph)
1	Padi	416.000	8.500	3.516.000.000	14,96
2	Ubi	2.000	2.000	40.000.000	0,09
3	Ubi Jalar	1.000	2.000	20.000.000	0,05
4	Ubi Merah	1.000	2.000	20.000.000	0,05
5	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
6	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
7	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
8	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05
9	Ubi Kuning	1.000	2.000	20.000.000	0,05
10	Ubi Merah Muda	1.000	2.000	20.000.000	0,05
11	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
12	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
13	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
14	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05
15	Ubi Kuning	1.000	2.000	20.000.000	0,05
16	Ubi Merah Muda	1.000	2.000	20.000.000	0,05
17	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
18	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
19	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
20	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05
21	Ubi Kuning	1.000	2.000	20.000.000	0,05
22	Ubi Merah Muda	1.000	2.000	20.000.000	0,05
23	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
24	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
25	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
26	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05
27	Ubi Kuning	1.000	2.000	20.000.000	0,05
28	Ubi Merah Muda	1.000	2.000	20.000.000	0,05
29	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
30	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
31	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
32	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05
33	Ubi Kuning	1.000	2.000	20.000.000	0,05
34	Ubi Merah Muda	1.000	2.000	20.000.000	0,05
35	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
36	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
37	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
38	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05
39	Ubi Kuning	1.000	2.000	20.000.000	0,05
40	Ubi Merah Muda	1.000	2.000	20.000.000	0,05
41	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
42	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
43	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
44	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05
45	Ubi Kuning	1.000	2.000	20.000.000	0,05
46	Ubi Merah Muda	1.000	2.000	20.000.000	0,05
47	Ubi Putih	1.000	2.000	20.000.000	0,05
48	Ubi Ungu	1.000	2.000	20.000.000	0,05
49	Ubi Hitam	1.000	2.000	20.000.000	0,05
50	Ubi Coklat	1.000	2.000	20.000.000	0,05

Kebutuhan (Demand) Lahan

Berdasarkan SOTK Kecamatan Maos, jumlah penduduk Kecamatan Maos Tahun 2042 (N) sebesar 27.622 jiwa, sedangkan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk di Kecamatan Maos sebesar 0,22 Ha (1 ton beras/kapita/tahun dibagi 4.498 kg/ha/tahun)

$$DL = 27.622 \times 0,22 = 6.142,84 \text{ Ha}$$

Penentuan Status Daya Dukung Lahan 2042

Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (S_i) dan kebutuhan lahan (DL)

- Bila S_i > DL, daya dukung lahan dinyatakan surplus.
- Bila S_i < DL, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terampai.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas didapatkan bahwa :

SL (21.690 Ha) < DL (6.142,84 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan pada tahun 2042 dinyatakan masih surplus. Kebutuhan pada tahun ini masih memenuhi terkait ketersediaan lahan.

Perbandingan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Air

Ketersediaan Air

Ketersediaan air dihitung menggunakan metode satuan luas dengan menggunakan data debit sungai dan luas daerah tangkapan air.

$$KHL = \frac{A \times D}{1000000}$$

Keterangan :

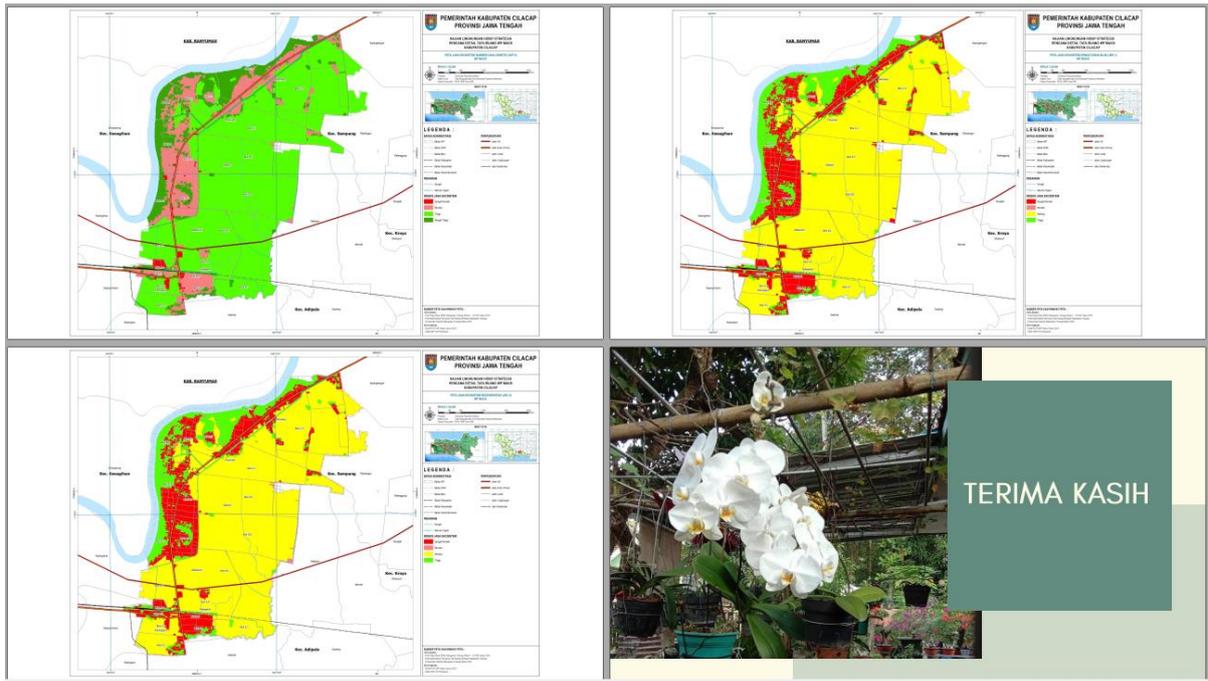
- KHL : Ketersediaan air
- A : Luas Daerah Tangkapan (Ha)
- D : Debit sungai (m³/detik)

Luas Daerah Tangkapan (Ha) = 1000000 × KHL / D

Luas Daerah Tangkapan (Ha) = 1000000 × 16.825.136,2 / 27617

Luas Daerah Tangkapan (Ha) = 605.411,36 Ha

Luas Daerah Tangkapan (Ha) = 605.





DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN
CILACAP



KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RDTR

Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perkotaan Maos
Kabupaten Cilacap

LAMPIRAN **6**

**PROSIDING FOCUS GROUP
DISCUSSION (FGD) 2**





**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan MT. Haryono, Nomor. 79. Telepon / Faksimile (0282) 533073
Website : www.dlh.cilacapkab.go.id E-mail : dlhcilacap@gmail.com

CILACAP

Kode Pos 53222

**BERITA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION 2 (FGD-2)
PENYEPAKATAN KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ ATAU PROGRAM
YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK DAN/ ATAU RISIKO
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANALISIS PENGARUH ENAM MUATAN KLHS
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
KAWASAN PERKOTAAN MAOS KABUPATEN CILACAP**

Nomor : 660.1 / 1066 / 24

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22 Agustus 2022), yang dilaksanakan Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai telah dilaksanakan *Focus Group Discussion 2* (FGD-2) Kelompok Kerja KLHS RDTR Kabupaten Cilacap. Agenda kegiatan berupa diskusi tindak lanjut pembahasan “Penyepakatan Kebijakan, Rencana dan/ atau Program yang Berpotensi Menimbulkan Dampak dan/ atau Risiko Lingkungan Hidup dan Analisis Pengaruh 6 (Enam) Muatannya” KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap berlokasi di Ruang Rapat DLH Kabupaten Cilacap, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Ibu Sri Murniyati dan dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cilacap serta akademisi, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan masyarakat di Kabupaten Cilacap sebagaimana terlampir dalam daftar hadir pelaksanaan kegiatan.

Adapun beberapa hal yang disepakati dalam kegiatan ini meliputi:

1. Proses perumusan Kebijakan Rencana dan/ atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap telah dianalisis dengan:
 - a. Ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf a pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - b. Keterkaitan KRP berdampak terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas.
2. Rumusan KRP berdampak lingkungan hidup hasil analisis KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:
 - a. KRP Zona Perumahan
 - b. KRP Zona Perdagangan dan Jasa
 - c. KRP Zona Kawasan Peruntukan Industri
 - d. KRP Jalan Tol
 - e. KRP Jalur Kereta Api
 - f. KRP JLSS

3. Analisis pengaruh dilakukan terhadap muatan KRP berdampak lingkungan hidup sesuai ketentuan didalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 dan Pasal 23 ayat (4), Pasal 25 dan Lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/2017. Analisis 6 (enam) hal penting tersebut meliputi:
 - a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
 - c. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
 - d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
4. Analisis pengaruh dalam KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap sebagaimana terlampir pada laporan KLHS merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada berita acara ini.

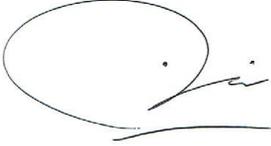
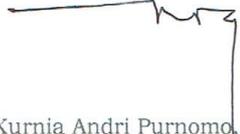
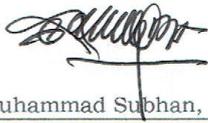
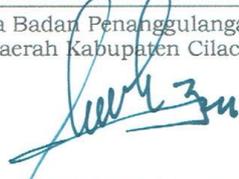
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dengan notulensi dan daftar hadir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini (terlampir).

Penandatanganan Berita Acara *Focus Discussion Group -2 (FGD-2)*
Penyepakatan Kebijakan, Rencana dan/ atau Program yang Berpotensi
Menimbulkan Dampak dan/ atau Risiko Lingkungan Hidup dan Analisis
Pengaruh 6 (Enam) Muatan KLHS
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap
Disepakati di Cilacap pada tanggal 22 Agustus 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP



SRI MURNIYATI S.T. M.Si.
NIP. 197009101997032005

PEMERINTAH DI KABUPATEN CILACAP	
<p>a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cilacap</p>  <p>Cicik Setyorini, S.P. NIP. 19700507 199803 2 004</p>	<p>a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cilacap</p>  <p>Kurnia Andri Purnomo, S.T., M.T. NIP. 19860413 200903 1 002</p>
<p>a.n. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap</p>  <p>Muhammad Subhan, S.E. NIP. 19660525 198903 1 011</p>	<p>a.n. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Cilacap</p>  <p>Yoppi Juli Priyono, A.Md. NIP. 19890717 202012 1 010</p>
<p>a.n. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap Subkoordinator Standarisasi Mutu</p>  <p>Edi Sukanto, S.Sos., M.M. NIP. 19670926 199303 1 002</p>	<p>a.n. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap</p>  <p>Indriati Dwi Cahyani, S.T., M.M. NIP. 19720414 200312 2 001</p>
<p>a.n. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cilacap</p>  <p>Itrinna Fajar, S.P., M.Eng., M.URP. NIP. 19860323 201212 2 001</p>	<p>a.n. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap</p>  <p>Kelik Gunantoro S.T., M.Eng. NIP. 19740127 200212 1 005</p>
<p>a.n. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap</p>  <p>Marsid, S.T. NIP. 19730516 200801 1 007</p>	<p>a.n. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap</p>  <p>Singgih Wijayanto, S.T. NIP. 19921007 202012 1 011</p>

NOTULENSI

NO	POIN RAPAT	KETERANGAN
1	Pembukaan rapat	Oleh Kepala Dinas LH Cilacap
2	Pemaparan KLHS RDTR KP MAOS	Oleh Konsultan
	Gambaran Umum	
	Muatan KRP yang berdampak thdp lingkungan – 7 muatan (P. Iklim Kehaati, Bencana, Mutu SDA, Alih fungsi lahan, kemiskinan dan kesehatan) → KRP Terpilih hasil konsinyasi → (Maos) Zona pemukiman Zona Perdagangan dan jasa Zona Industri Rencana jalan tol Rencana jalur Kereta Api Rencana JLSS (Jalur Jalan Lintas Selatan)	Penapisan PP 46/2016 4 KRP yang terpilih
	Analisa D3TLH -Klasifikasi lahan dan tingkat kemampuan	
	Saran Pendapat & Tangapan	
3	Revisi hasil konsinyasi KRP Berdampak KRP Jalan Tol tetap masuk, KRP Arteri primer, KRP Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagagn dan jasa, Peruntukan Industri. KRP Jalur Kereta api baru tidak dimasukkan	DPUPR – Dani 4 KRP Maos tepilih.
4	Mempertimbangkan rumus2 ilmiah yang ada, sehingga menghasilkan rumusan data / skoring yang sesuai	PNC
5	Data terkait ranking Isu PB Strategis Siareja No. 4 Pengelolaan sampah dan sanitasi belum optimal No . 5 Penurunan kualitas air Apakah bisa dijadikan satu isu? Terkait perolehan data kenapa didapatkan hal seperti tsb? Dinkes punya data 10 besar prevelnsi penyakit. Penyakit akibat media air. Jika membutuhkan data terkait hal tersebut bisa meminta data ke puskesmas Maos	Dinkes Tanggapan Konsultan : Tidak bisa digabung, krn ada struktur ruang dan sub bab tersendiri.
6	KLHS: - Frame KLHS (harus disamakan dulu) dpt diimplentasikan ke pemda dalam bentuk KRP - KLHS Ex-ante = Semangat integrasinya - Fokusnya pada lingkungan hidup (di dalamnya juga mengakomodir isu ekonomi social dan tata kelola) - Yang divalidasi kita sebagai tim pokja, bukan dari konsultan - KRP menjadi sesuatu yg fatal jika belum disepakati / berubah-ubah - Kita sedang ada di fase FGD 2, masih banyak tahapan yg lain - Pedoman penyusunan KLHS umum, bisa menjadi acuan	Pak Ady (Kabid 2 PSLB3 & PK)

	<ul style="list-style-type: none"> - Kita belum mempunyai RPPLH, sedang proses jadi belum bisa digunakan, jadi skoring RPPLH menjadi nol - Sesuai dgn pas 9, menggunakan 10 muatan, dalam dokumen menggunakan 9 muatan – kurang masyarakat dan hukum adat - KRP dituangkan dalam 2 bentuk, jenis rencana dan peta rencana. Belum tergambarkan dalam dokumen. - Di dalam KRP ada 2 penapisan, <ol style="list-style-type: none"> 1. Penapisan 7 muatan 2. Metode kuantitatifnya, jenis bencana dan dampak - Silakan dibuatkan konsep operasionalnya, misalnya kapasitas D3TLH - Rekapitulasi kajian muatan KLHS (belum ada) - Kebijakan tata ruang, struktur ruangnya yang akan dilihat KRP nya, nomenklatur KRP mengacu pada ketentuan baru / ATR 	Pak Ady (Kabid 2 PSLB3 & PK)
7	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada Konsistensi antara table penapisan, perumusan alternative dan perumusan KRP nya (Maos) - Narasi-narasi pada isu pengelolaan sampah mhon dicek kembali, terkait data dan angka-angka (Sidareja) - Penilaian alternative pnyimpulan KRP seharusnya ada 7 muatan, dalam dokumen masih berkutat 2 hal 	Pak Arif (Kabid 1 PPLH)
8	<p>Split up progress, agar bisa next meeting langsung KP 2 RPPLH masih menggunakan draft yg belum ditetapkan Bisa pakai D3TLH, tp minus layer tipe vegetasi → bersurat ke BPKH Jawa Madura</p> <p>Overview D3TLH Sesuai Juknis 2019</p> <p>Jasa Ekosistem (20) akan ditampilkan Dioverlay dengan masing-masing KRP</p>	Konsultan
9	Penutupan	

UNDANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771 – 534775 Faksimile (0282) 535222
Website : www.cilacapkab.go.id E-mail : setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

Cilacap, 18 Agustus 2022

Nomor : 005/02385/24/CLP
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth.
Bapak / Ibu / Saudara
Sebagaimana daftar terlampir
di -

C I L A C A P

Mengharap kehadiran Bapak / Ibu / Saudara pada :

Hari/ tanggal : Senin, 22 Agustus 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Acara : Rapat Membahas Focus Group Discussion (FGD) 1 & 2
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos
dan Kawasan Perkotaan Sidareja
Tempat : Ruang Adipura DLH Kabupaten Cilacap
Jalan MT Haryono No. 79, Donan, Cilacap Tengah,
Kabupaten Cilacap
Catatan : 1. Materi rapat dapat di download melalui *link*
<http://bit.ly/lapantaraklhrsrdtr21>
2. Saran/masukan/tanggapan secara tertulis disampai
kan melalui alamat e-mail [bidangpp.dlhcilacap@
gmail.com](mailto:bidangpp.dlhcilacap@gmail.com) atau ke nomor WA Sdr. Doni Alfianto, ST
(No. Hp. 081226819586)

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI CILACAP
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

AWALUDDIN MUURI, AP, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 199412 1 001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran I : Surat Bupati Cilacap
Nomor : 005/02385/24/CLP
Tanggal : 18 Agustus 2022

Daftar Yang Diundang :

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap.
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap.
5. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.
7. Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.
8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
11. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap
12. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Cilacap.
13. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.
14. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap.
15. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap.
16. Camat Maos.
17. Camat Sidareja.
18. Rektor UNUGHA Kesugihan.
19. Direktur Politeknik Negeri Cilacap.
20. Ketua LSM Peppeling Cilacap.
21. Para Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
22. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda selaku Para Subkoordinator pada Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

DAFTAR HADIR



RAPAT PEMBAHASAN FOCUS GROUP DISCUSSION I DAN II KLHS RDTR KP MAOS DAN KP SIDAREJA
CILACAP, 22 AGUSTUS 2022

DAFTAR HADIR

No	NAMA LENGKAP	L/P	KEDUDUKAN/JABATAN	INSTANSI/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	<i>SPH MURMAYATI</i>	P	Kepala Dinas	DLH	<i>[Signature]</i>
2	Adnan Harris Sami	L	Staf PM	Kec. Sidareja	<i>[Signature]</i>
3	Theresia Evila	P	Dosen	Politeknik Negeri Cilacap	<i>[Signature]</i>
4	Stella SUNARTO	L	Dosen	UNUHA Cilacap	<i>[Signature]</i>
5	Vivy R	L	Dosen	Polunite Negeri Cileg	<i>[Signature]</i>
6	Ilis ETIKASARI	P	STAFF	DISPERTAN	<i>[Signature]</i>
7	Tri Galabano		Jft. Keskinerja	DINKE S	<i>[Signature]</i>
8	Fritgony. A	L	Amliis Akademi	Dims Parkman	<i>[Signature]</i>
9	Siti Maghribah W.	P	Staf PM	Kec. Maos	<i>[Signature]</i>
10	Herman S	P	Ketua	Pepeleg	<i>[Signature]</i>
11	MARSTI	L	Subkoordinatir OP	PSDA	<i>[Signature]</i>



RAPAT PEMBAHASAN FOCUS GROUP DISCUSSION I DAN II KLHS RDTR KP MAOS DAN KP SIDAREJA
CILACAP, 22 AGUSTUS 2022

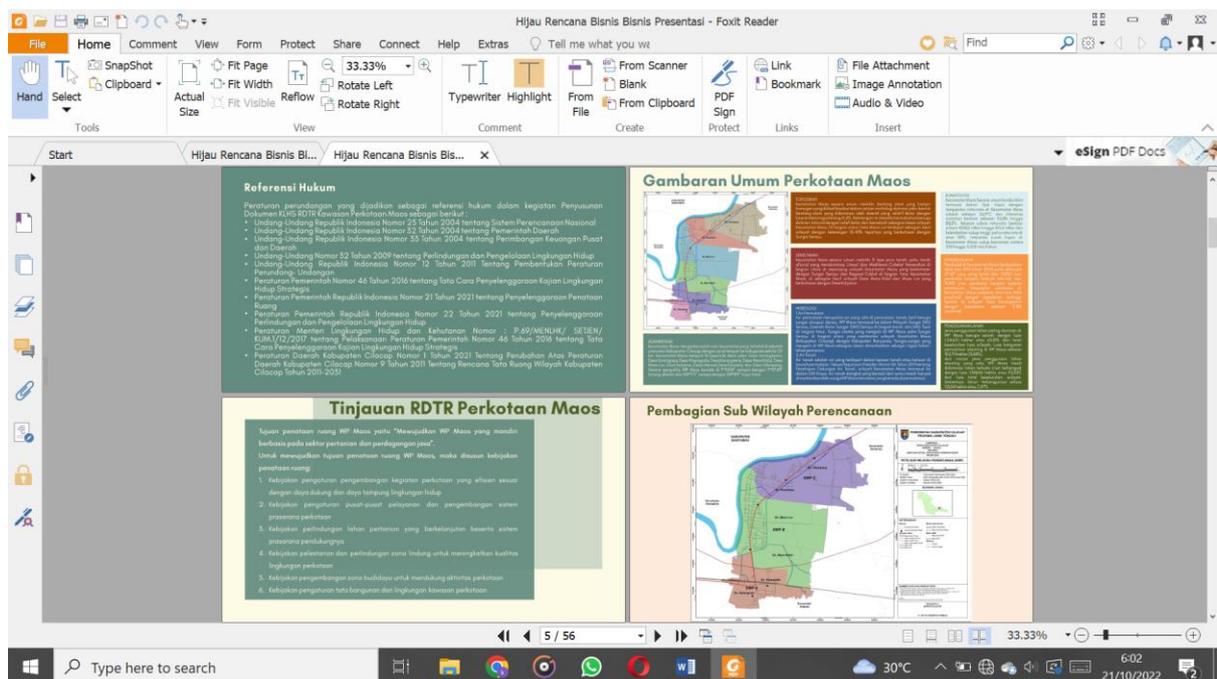
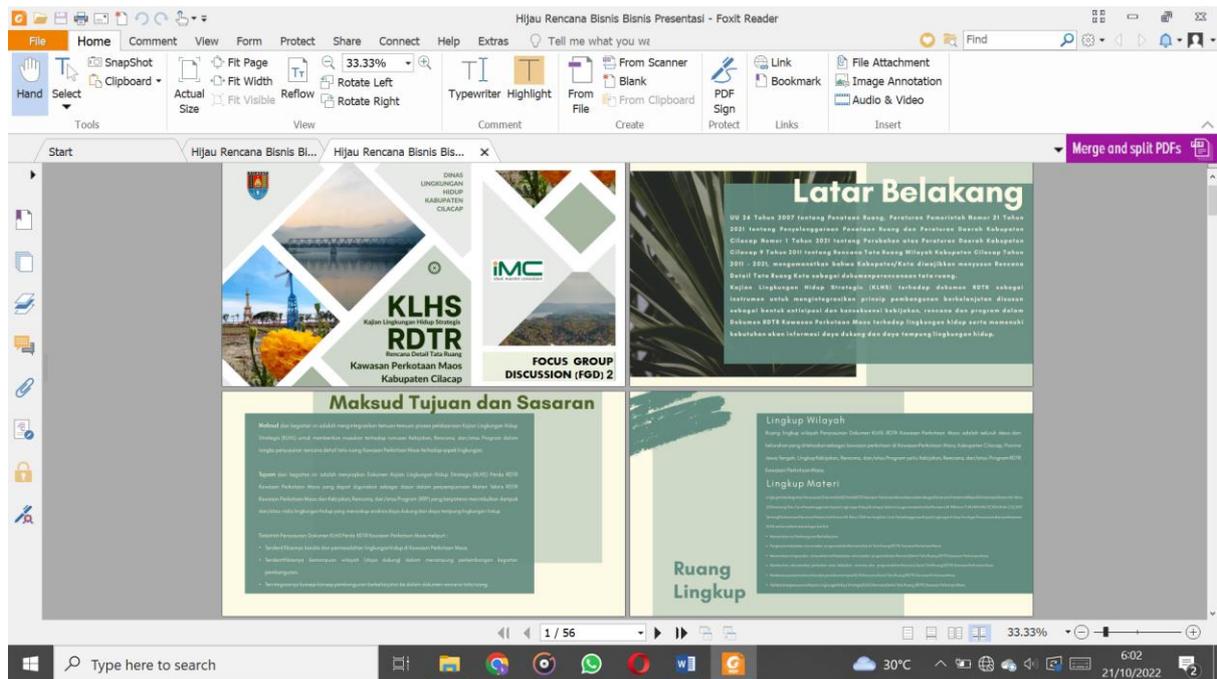
24	PisHin TH	P	Pedat Analisis Media	DLH Cg-	
25	Tras Muska NP	P	Analisis LH	DLH Cg	
26	Dani Alqunto	L	Analisis LH	DLH Cg	
27	DWI WAHYU N.	L	Analisis LH	DLH Cg	
28	Ary C.	L	KLHS II	DLH	
29	Sri Hartono	L	Staf	MH	
30	Anif	L	Staf	DLH	
31	Wan kun.	L	Kasid RRM	DLH	
32	Pengy NF	L	Peran.	MH	
33					
34					

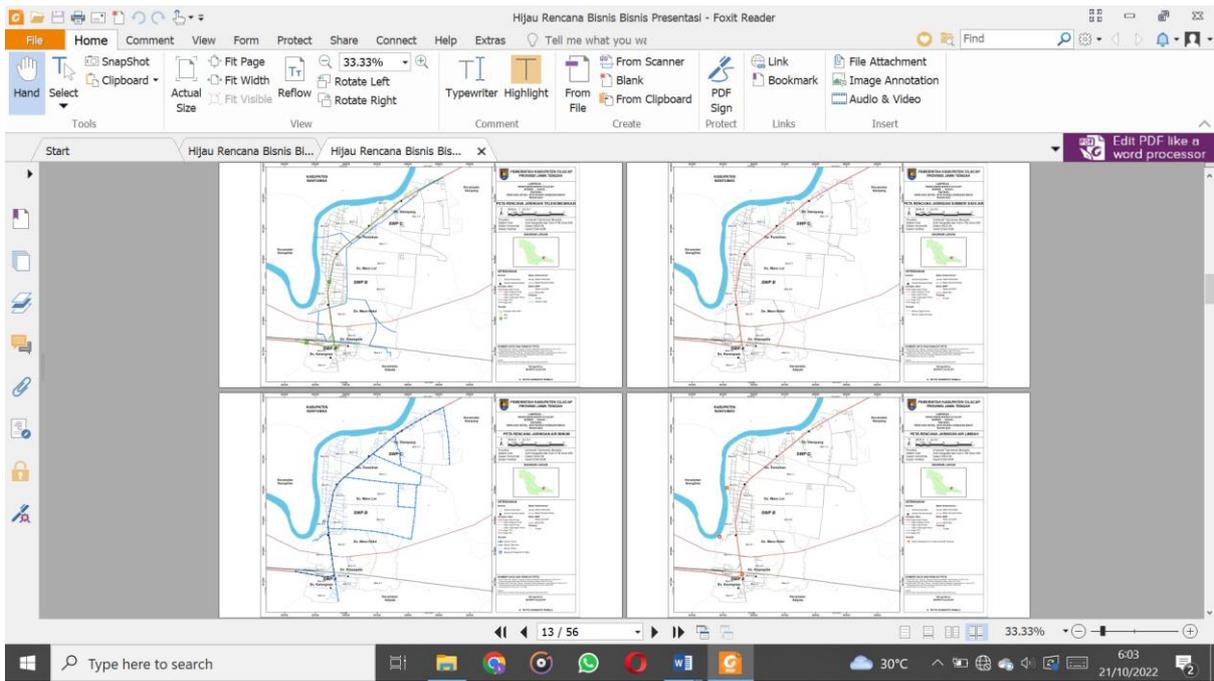
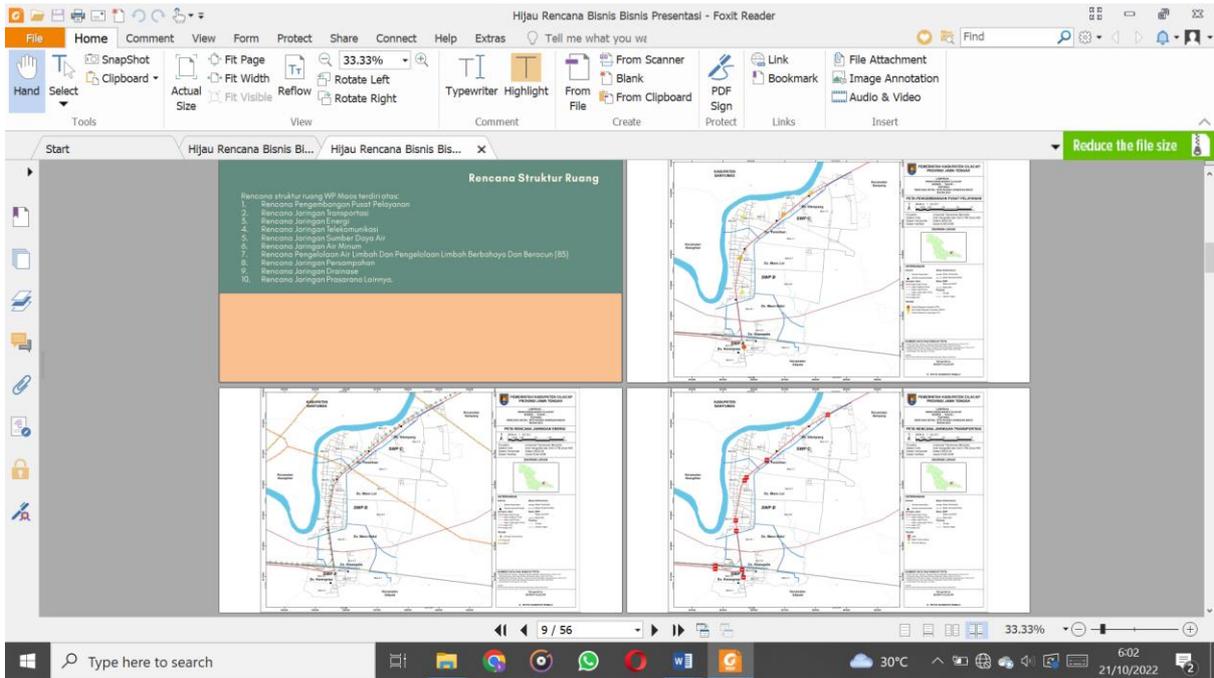
DOKUMENTASI

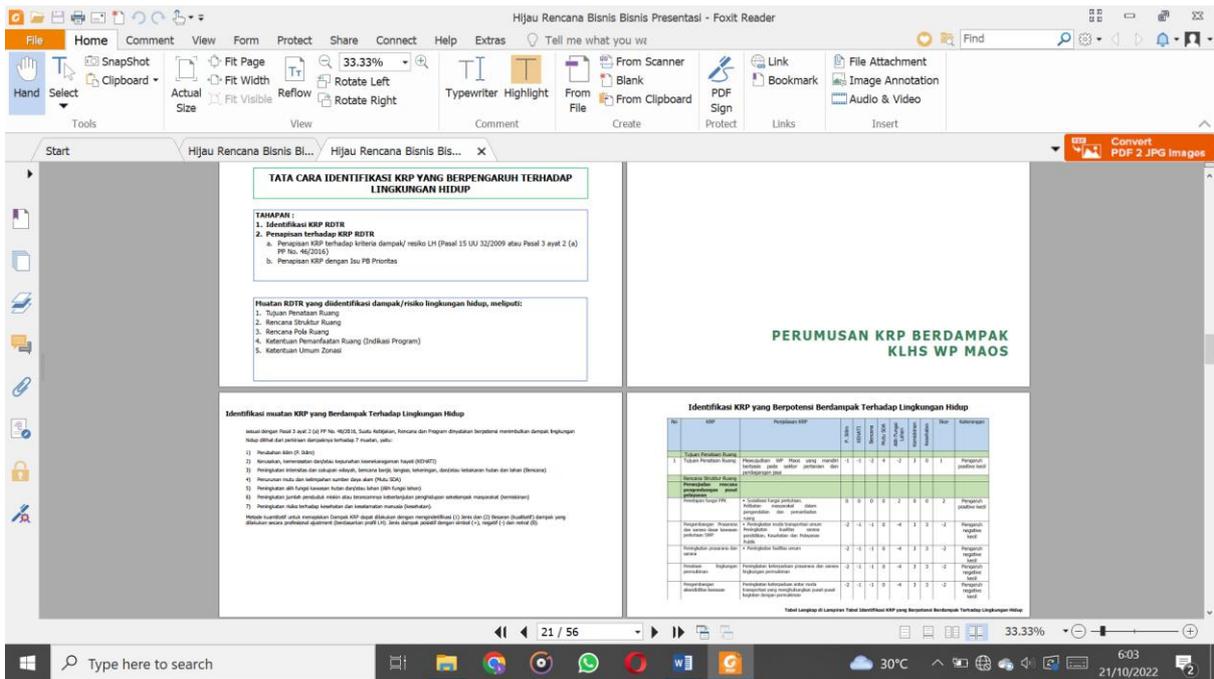
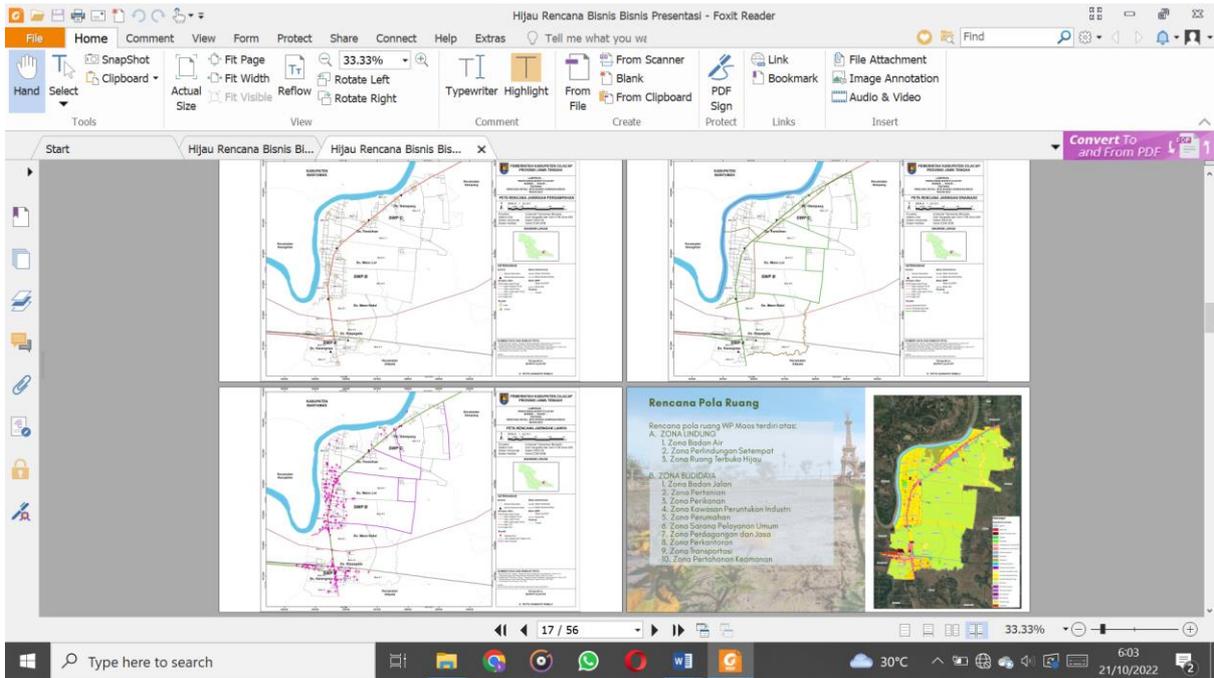


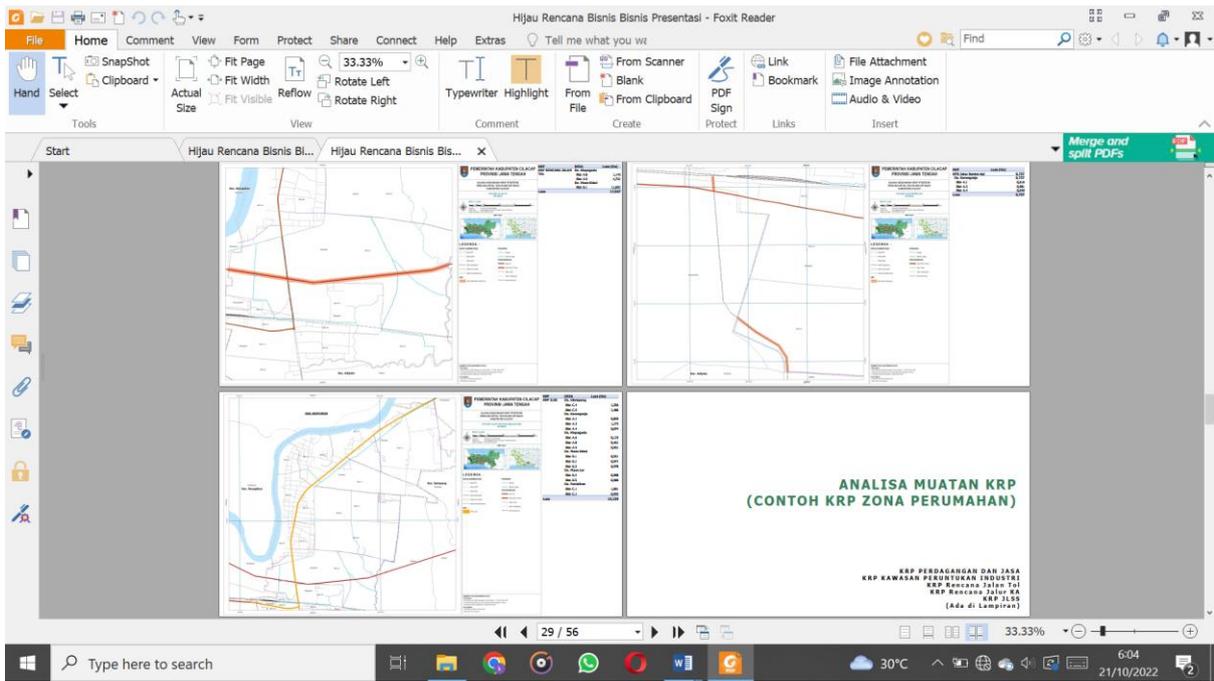
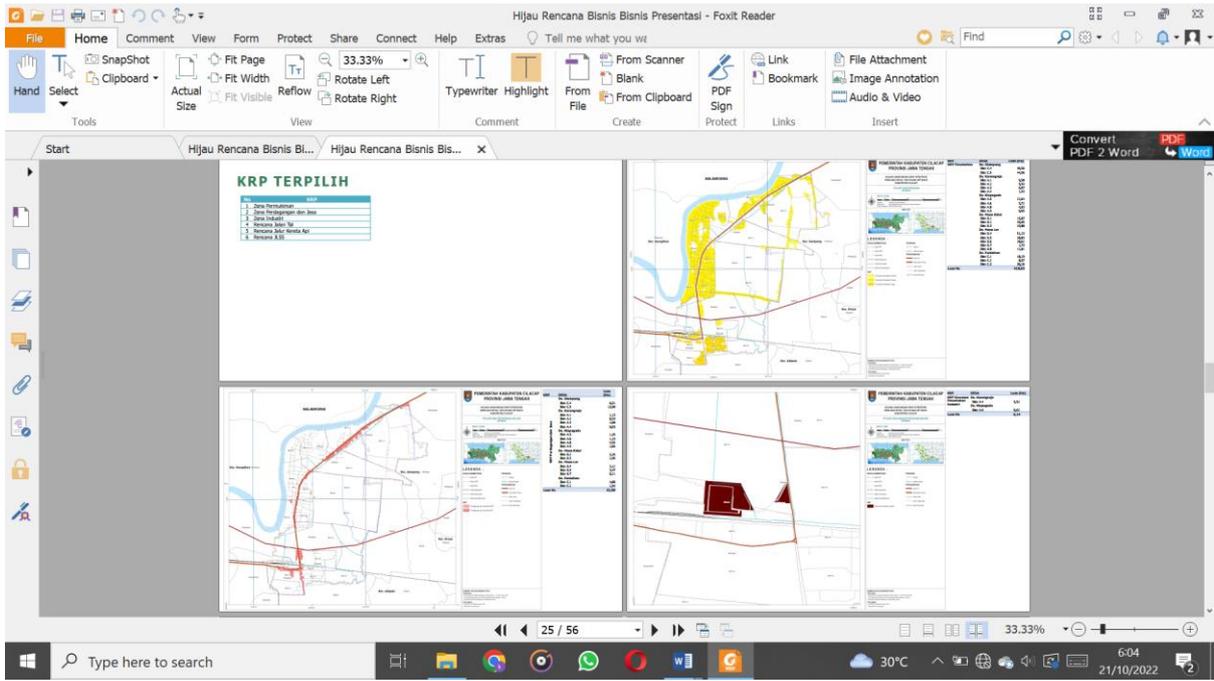


MATERI PRESENTASI









Hijau Rencana Bisnis Bisnis Presentasi - Foxit Reader

File Home Comment View Form Protect Share Connect Help Extras Tell me what you wz Find

Hand Select Tools Snapshot Clipboard Actual Size View Fit Page Fit Width Reflow Rotate Left Rotate Right Typewriter Highlight From File From Scanner From Clipboard PDF Sign Link Bookmark File Attachment Image Annotation Audio & Video

Start Hijau Rencana Bisnis Bl... Hijau Rencana Bisnis Bis... x

Kapasitas DODDTH KRP Kawasan Perumahan

Kelas kemampuan lahan pada KRP Kawasan Perumahan seluas 418,03 ha berada pada kelas kemampuan lahan kelas II dan IV. Kelas kemampuan lahan II ini memiliki kriteria Mempunyai beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan tindakan konservasi yang selang. Pengalokasian perlu hati-hati termasuk tindakan konservasi untuk mencegah kerusakan. Kelas kemampuan lahan II memiliki kesesuaian yang baik untuk kegiatan budidaya, terutama untuk pertanian

33.33%

Convert Word to PDF

33 / 56 33.33%

Type here to search 30°C 6:04 21/10/2022

Hijau Rencana Bisnis Bisnis Presentasi - Foxit Reader

File Home Comment View Form Protect Share Connect Help Extras Tell me what you wz Find

Hand Select Tools Snapshot Clipboard Actual Size View Fit Page Fit Width Reflow Rotate Left Rotate Right Typewriter Highlight From File From Scanner From Clipboard PDF Sign Link Bookmark File Attachment Image Annotation Audio & Video

Start Hijau Rencana Bisnis Bl... Hijau Rencana Bisnis Bis... x

Free PDF to Word Converter

Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang terdapat ancaman banjir yang berpotensi menimbulkan kerugian. Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) kawasan rawan banjir di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Karangasem, yaitu kawasan rawan banjir di Desa Sebanuran, Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Karangasem. Kawasan rawan banjir tersebut terdapat di Desa Sebanuran, Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Karangasem. Kawasan rawan banjir tersebut terdapat di Desa Sebanuran, Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Karangasem. Kawasan rawan banjir tersebut terdapat di Desa Sebanuran, Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Karangasem.

Rawan Serakan Tanah

Rawan serakan tanah adalah kawasan yang terdapat ancaman serakan tanah yang berpotensi menimbulkan kerugian. Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) kawasan rawan serakan tanah di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Karangasem, yaitu kawasan rawan serakan tanah di Desa Sebanuran, Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Karangasem. Kawasan rawan serakan tanah tersebut terdapat di Desa Sebanuran, Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Karangasem. Kawasan rawan serakan tanah tersebut terdapat di Desa Sebanuran, Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Karangasem.

Kinerja Layanan Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem penyedia terdiri atas fungsi penyedia pangan, fungsi penyedia air bersih, fungsi serat, fungsi penyedia bahan bakar dan fungsi sumber daya genetik. Berdasarkan hasil overlay antara KRP Perumahan dengan ekosistem penyedia (EP), Dari hasil overlay, maka dapat diketahui bahwa KRP Kawasan perumahan dan jasa ekosistem penyedia, dimana fungsi ekosistem penyedia hampir semua mayoritas berada di kemampuan kelas jasa ekosistem yang tinggi dan sangat tinggi. Dengan 200,45 ha perumahan baru, maka hal ini menjadi perhatian untuk kemampuan jasa ekosistemnya

Jasa Ekosistem Penyediaan (EP)

Jasa ekosistem penyedia terdiri atas fungsi penyedia pangan, fungsi penyedia air bersih, fungsi serat, fungsi penyedia bahan bakar dan fungsi sumber daya genetik. Berdasarkan hasil overlay antara KRP Perumahan dengan ekosistem penyedia (EP), Dari hasil overlay, maka dapat diketahui bahwa KRP Kawasan perumahan dan jasa ekosistem penyedia, dimana fungsi ekosistem penyedia hampir semua mayoritas berada di kemampuan kelas jasa ekosistem yang tinggi dan sangat tinggi. Dengan 200,45 ha perumahan baru, maka hal ini menjadi perhatian untuk kemampuan jasa ekosistemnya

Jasa Ekosistem Budaya (EC)

Jasa ekosistem budaya terdiri atas fungsi tempat tinggal dan ruang hidup, fungsi rekreasi dan estetika, dan budaya yang etnik atau adat. Berdasarkan hasil overlay antara KRP Perumahan dan Jasa Ekosistem Budaya (EC)

33.33%

37 / 56 33.33%

Type here to search 30°C 6:04 21/10/2022

Hijau Rencana Bisnis Bisnis Presentasi - Foxit Reader

File Home Comment View Form Protect Share Connect Help Extras Tell me what you wz

Tools: Hand, Select, Snapshot, Clipboard, Actual Size, Fit Page, Fit Width, Reflow, Rotate Left, Rotate Right

View: 33.33%

Comment: Typewriter, Highlight

Create: From Scanner, Blank, From File, From Clipboard

Protect: PDF Sign

Links: Link, Bookmark

Insert: File Attachment, Image Annotation, Audio & Video

Start Hijau Rencana Bisnis Bi... Hijau Rencana Bisnis Bi... x Merge and split PDFs

Jasa Ekosistem Perkebunan (SEP)

Jasa Ekosistem Perkebunan (SEP) terdiri dari Penyiangan Perkebunan Lahan dan Pemeliharaan, Penanaman Sisa Kotor, Penanaman Produk Primer dan Penyiangan Budidaya. Hasil manfaat jasa ekosistem adalah sebagai berikut:

No	Kategori Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan
1	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan
2	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan
3	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan
4	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan
5	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan	Perkebunan

41 / 56 33.33%

Type here to search 30°C 6:05 21/10/2022

Hijau Rencana Bisnis Bisnis Presentasi - Foxit Reader

File Home Comment View Form Protect Share Connect Help Extras Tell me what you wz

Tools: Hand, Select, Snapshot, Clipboard, Actual Size, Fit Page, Fit Width, Reflow, Rotate Left, Rotate Right

View: 33.33%

Comment: Typewriter, Highlight

Create: From Scanner, Blank, From File, From Clipboard

Protect: PDF Sign

Links: Link, Bookmark

Insert: File Attachment, Image Annotation, Audio & Video

Start Hijau Rencana Bisnis Bi... Hijau Rencana Bisnis Bi... x eSign PDF Docs

45 / 56 33.33%

Type here to search 30°C 6:05 21/10/2022

Hijau Rencana Bisnis Presentasi - Foxit Reader

File Home Comment View Form Protect Share Connect Help Extras Tell me what you want to do Find

Tools: Hand Select, Snapshot, Clipboard, Actual Size, Fit Page, Fit Width, Reflow, Rotate Left, Rotate Right, Typewriter, Highlight, From File, From Scanner, From Clipboard, PDF Sign, Link, Bookmark, File Attachment, Image Annotation, Audio & Video

Start Hijau Rencana Bisnis Bl... Hijau Rencana Bisnis Bl... x eSign PDF Docs

Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

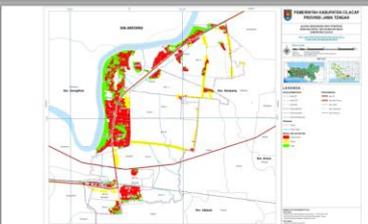
Berdasarkan overlay KRP Kawasan Perumahan berada di mayoritas lahan produktif (jasa ekosistem siklus hara) dengan kemampuan sangat tinggi seluas 199,51 ha atau sekitar 48% dari total luas KRP Kawasan Perumahan dan kemampuan sedang seluas 217,89 ha atau sekitar 52,12%. Hal ini akan berpotensi memberikan dampak pada produktivitas tanaman dibanding pertanian

No	Kategori	Luas (Ha)	Spesifikasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Berdasarkan overlay KRP Kawasan Perumahan berada di mayoritas kemampuan jasa ekosistem pengaturan iklim (EIR-1) memiliki kemampuan rendah seluas 215,90 ha atau sekitar 52% dari total luas KRP Kawasan Perumahan. Sedangkan untuk Kawasan dengan pengaturan iklim tinggi, seluas 126 ha atau 39%. Hal ini menunjukkan bahwa kelas KRP Kawasan Perumahan berada pada kelas yang memang memiliki kemampuan pengaturan iklim yang sedang hingga tinggi, memerlukan penyesuaian seperti penghijauan untuk mengurangi pencemaran yang dapat mengakibatkan perubahan iklim

No	Kategori	Luas (Ha)	Spesifikasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Berdasarkan overlay KRP Jalan Tol berada di mayoritas lahan dengan kemampuan jasa ekosistem biodiversitas yang sangat rendah seluas 215 ha atau sekitar 65% dari total luas Kawasan Perumahan

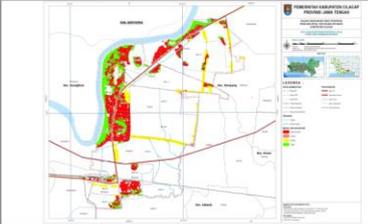
No	Kategori	Luas (Ha)	Spesifikasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Hijau Rencana Bisnis Presentasi - Foxit Reader

File Home Comment View Form Protect Share Connect Help Extras Tell me what you want to do Find

Tools: Hand Select, Snapshot, Clipboard, Actual Size, Fit Page, Fit Width, Reflow, Rotate Left, Rotate Right, Typewriter, Highlight, From File, From Scanner, From Clipboard, PDF Sign, Link, Bookmark, File Attachment, Image Annotation, Audio & Video

Start Hijau Rencana Bisnis Bl... Hijau Rencana Bisnis Bl... x Reduce the file size



Rekapitulasi KRP Terdampak Terhadap Jasa Ekosistem

No	Kategori	Luas (Ha)	Spesifikasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Tabel Rekapitulasi Analisis Pengaruh KRP Yang Berdampak Terhadap Lingkungan Hidup

No	Kategori	Luas (Ha)	Spesifikasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50





DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN
CILACAP



KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RDTR

Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perkotaan Maos
Kabupaten Cilacap

LAMPIRAN **7**

**PROSIDING
KONSULTASI PUBLIK 2**





**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan MT. Haryono. Nomor. 79. Telepon / Faksimile (0282) 533073
Website : www.dlh.cilacapkab.go.id E-mail : dlhcilacap@gmail.com

CILACAP

Kode Pos 53222

**BERITA ACARA
HASIL KONSULTASI PUBLIK II
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN MAOS
KABUPATEN CILACAP**

Nomor: **660.1/1134/24**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-09-2022) pukul 09.00 bertempat di Ruang Rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, telah dilaksanakan Konsultasi Publik II, dalam rangka melakukan perumusan alternatif dan rekomendasi perbaikan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap tahun 2022-2042.

Peserta Kegiatan Konsultasi Publik II, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW meliputi:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap;
2. Jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (daftar terlampir);
3. LSM Peppeling;
4. Konsultan Pendamping;
5. Akademisi / Perguruan Tinggi;

Kegiatan Konsultasi Publik II Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap tahun 2022-2042 menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Perumusan Alternatif dan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan, Rencana dan Program yang Berdampak Terhadap Lingkungan Hidup yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

2. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dalam RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Berita Acara ini dan;
3. Notulensi dan Daftar Presensi Kehadiran Peserta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik II (KP II)
Penyepakatan Perumusan Alternatif, Rekomendasi Perbaikan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2042.

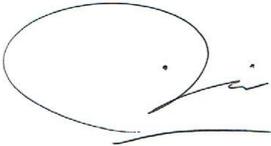
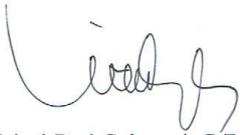
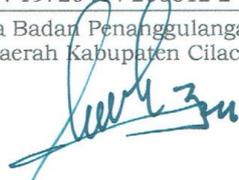
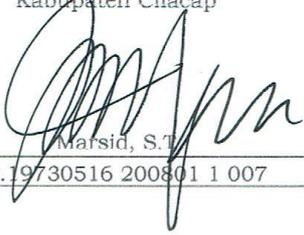
Disepakati di Cilacap pada tanggal 12 September 2022

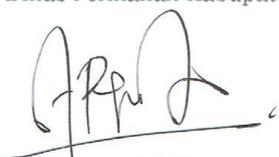
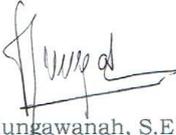
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP



SRI MURNIYATI S.T. M.Si.

NIP. 197009101997032005

PEMERINTAH DI KABUPATEN CILACAP	
<p>a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cilacap</p>  <p>Cicik Setyorini, S.P. NIP. 19700507 199803 2 004</p>	<p>a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cilacap</p>  <p>Kurnia Andri Purnomo, S.T., M.T. NIP. 19860413 200903 1 002</p>
<p>a.n. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap</p>  <p>Muhammad Subhan, S.E. NIP. 19660525 198903 1 011</p>	<p>a.n. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Cilacap</p>  <p>Yoppi Juli Priyono, A.Md. NIP. 19890717 202012 1 010</p>
<p>a.n. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap Subkoordinator Standarisasi Mutu</p>  <p>Edi Sukanto, S.Sos., M.M. NIP. 19670926 199303 1 002</p>	<p>a.n. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap</p>  <p>Indriati Dwi Cahyani, S.T., M.M. NIP. 19720414 200312 2 001</p>
<p>a.n. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cilacap</p>  <p>Itrinna Fajar, S.P., M.Eng., M.URP. NIP. 19860323 201212 2 001</p>	<p>a.n. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap</p>  <p>Kelik Gunantoro S.T., M.Eng. NIP. 19740127 200212 1 005</p>
<p>a.n. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap</p>  <p>Marsid, S.T. NIP. 19730516 200801 1 007</p>	<p>a.n. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap</p>  <p>Singgih Wijayanto, S.T. NIP. 19921007 202012 1 011</p>

PEMERINTAH DI KABUPATEN CILACAP	
<p>a.n. Kepala Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Cilacap</p>  <p><u>Rio Darmawan Indriyatmoko, S.T., M.T.</u> NIP. 19850206 200903 1 005</p>	<p>a.n. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap</p>  <p><u>Fritsony Ariefianto</u> NIP. 19801227 201001 1 018</p>
<p>a.n. Camat Maos</p>  <p><u>Mungawanah, S.E.</u> NIP. 19650126 198607 2 001</p>	<p>a.n. Camat Sidareja</p>  <p><u>Hartono, S.E.</u> NIP. 19700630 199103 1 006</p>
<p>Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap</p>  <p><u>Iwan Hasan Ma'arif, S.Pi.</u> NIP. 19720618 201001 1 001</p>	<p>Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap</p>  <p><u>Ady Setiawan, S.Pd. M.Kes</u> NIP. 19701206 199403 1 004</p>
<p>Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap</p>  <p><u>Dra. Her Sri Nintowati</u> NIP. 19651028 199803 2 001</p>	<p>a.n. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap</p> <p>NIP.</p>
<p>a.n. Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap</p> <p>NIP.</p>	<p>NIP.</p>
<p>NIP.</p>	<p>NIP.</p>

LEMBAGA NON PEMERINTAH DAN AKADEMISI	
<p>Politeknik Negeri Cilacap</p>  <p>Vicky Prasetya, S.ST., M.Eng. NIP. 199206302019031011</p>	<p>Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pelajar Peduli Lingkungan (PEPPELING) Cilacap</p>  <p>Herman Sukato</p>
<p>Universitas Nadhatul Ulama Al-Ghazali Cilacap</p>  <p>Fahrur Rozi</p>	

NOTULENSI

NO	POIN RAPAT	KETERANGAN
	<p>Dihadiri oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris DLH 2. Kabid PPLH 3. Bappeda 4. DPUPR 5. Disperkimta 6. DispertLan 7. Dinas Perikanan 8. Disnakerin 9. BPBD 10. ATR/BPN Cilacap 11. PSDA 12. Dishub 13. DPKUKM 14. Camat Maos 15. A.n Rektor UNUGHA 16. A.n Direktur PNC 17. LSM Peppeling 18. Para Kabid DLH 	
1	Pembukaan rapat	Oleh Sekretaris DLH Cilacap
2	Pemaparan	Oleh Pak Adi IMC
	Pemaparan KP Maos	Oleh Ibu Dewi
3	<p>Data spasial masih perlu dikaji kembali Terkait zona perumahan Zona rawan tinggi, kemiringan lereng tidak lebih dari 40%</p> <p>KRP Jalan tol disetujui Arahan luas kavling minimal</p>	DPUPR
4	<p>Saringan lintas sektor Rekomendasi yang disampaikan akan kami masukan ke dalam KRP Atau ke indikasi program atau ketentuan khusus</p>	DPUPR Bu Cicik
5	<p>Border Kawasan diperhatikan perlu ditambahkan rekapitulasi KLHS seperti yang ada di Maos Rekomendasi sebaiknya disajikan secara kuantitatif</p>	PNC
6		UNUGHA
7	<p>Setelah terusnya KLHS mohon dikoordinasikan antar OPD Bisa memberikan kenyamanan masyarakat Dokumen ini bisa dikembangkan jika secara konsep sulit diaplikasikan Masih swa sembada beras, bisa dipertahankan Limbah rumah tangga perlu diperhitungkan Bencana banjir perlu diantisipasi, khususnya di Sidareja</p>	LSM Peppeling
8	<p>Hal III.18 disebutkan terminal barang menjadi kewenangan pemerintah pusat</p> <p>Dokumen Maos, II.12 terkait dengan terminal penumpang, hanya di jalan Gatot Subroto terminal tipe A . padahal terminal cukup banyak.</p>	Dishub

	Terminal penumpang tipe C ada 8 buah tersebar di beberapa kecamatan. IV.4 Sumbernya semestinya DPUPR Dua Perlintasan KA yang mengganggu itu di mana saja? Mohon dilihat kembali kewenangannya.	
9	Penampungan limbah domestic untuk perumahan Adanya jalan tol mudah2an tidak mengurangi produksi pangan Bisa menambahkan potensi perkembangan industri di lokasi-lokasi yang lainnya	Disnakerin
10	Penyebab terjadi banjir: Pancaroba Belum ada arah ke penyebab seperti yang di atas Jika ada biopori maka dibangun pengendali sedimentasi Daerah Sidareja cukup tinggi intensitas sedimentasinya Musim pancaroba kita mundur, maka bersamaan dengan musim penghujan Mencari alternatif lagi, bangunan konstruksi seperti waduk / kolam-kolam	BPBD
11		Disperkimta
12	Daerah sebelah utara (kunci) dijadikan daerah tutupan lahan. Sidareja daerah cekungan, elevasi terendah berada di pusat kota	PSDA
13	Pengendalian alih fungsi lahan, Pembatasan pada peruntukan tanah yang tidak langsung Sawah produktivitas tinggi Perlu dilihat kembali terkait jumlah penduduk yang ada	Dispertan
15	Ahli fungsi lahan yang terdampak jalan tolakan seperti apa	
16	Penambahan informasi daerah yang terdampak jalan tol Integrasi jaringan jalan, kolam retensi Pengembangan jalur hijau di area yang terdampak jalan tol Pembuatan JPO, Underpass industry kelas menengah bisa bekerja sama membantu memfasilitasi industri-industri kecil di sekitar	Bappeda
11	Sangat mendukung. Nama desa jangan dipenggal atau tidak diberi spasi Maoslor	Kecamatan Maos
13	KP Maos: Bab IV Tabel 4, klasifikasi KRP: tujuan penataan maos. Yang menjadi perhatian, jalan tol tidak hanya melewati 2 daerah saja. Tapi ada beberapa yang	Bidang III

	lainnya.luas penyebaran terkena dampak jalan tol hanya mencakup 2 desa tadi saja. desa lain yang belum terhitung belum teranalisa.	
14	<p>Laporan akhir – proses analisis pengaruh Pengintegrasian (lampiran administrasi on process) baru divalidasi</p> <p>Deliniasi wilayah perencanaan, 13,2 % Relative sempit dibandingkan luasan wilayah perencanaan</p> <p>Klasifikasi KRP belum menemukan kesimpulan / tahapan KRP ini perlu integrasi 6 muatan</p> <p>Tabel perumusan alternatif perumusan KRP Ada peningkatan pencemaran air, lengkap data-data eksisting</p> <p>Kawasan industry ada Kawasan permukiman IPAL industri menjadi project Pemda</p> <p>Beban tamping pencemaran apakah ke air? Lihat kembali D3TLH tahun 2018-2019</p> <p>Ada potensi peningkatan pencemaran udara Membuat jalur hijau dicermati kembali</p> <p>Menyediakan lahan RTH di Kawasan Industri</p> <p>Perbaiki KRP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan 2. kebijakan 3. Materi program 	Bidang II
15	Rekomendasi untuk pembatasan perencanaan penyusunan Kawasan Perkotaan Sidareja dan Maos Apakah perlu diintegrasikan Semuanya karena akan berpengaruh pada pola ruang.	Konsultan
16	<p>Anggota pokja KLHS hampir semua sepakat Penanganan TPS3R Komunal Segera berkoordinasi dengan penyusun RDTR</p> <p>DLHK Provinsi untuk melakukan Pra Validasi akhir bulan September</p>	Bidang I

Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771 – 534775 Faksimile (0282) 535222
Website : www.cilacapkab.go.id E-mail : setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

Cilacap, 9 September 2022

Nomor : 005/02728/24/CLP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : UNDANGAN

Kepada :
Yth. Bapak /Ibu / Saudara
sebagaimana daftar terlampir
di -
CILACAP

Mengharap kehadiran Bapak / Ibu / Saudara pada :

Hari/ tanggal : Senin, 12 September 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Acara : Rapat Membahas Konsultasi Publik II Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos dan Kawasan Perkotaan Sidareja
Tempat : Ruang Adipura DLH Kabupaten Cilacap
Jalan MT. Haryono No. 79, Donan, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap
Catatan : 1. Materi rapat dapat di download melalui [link http://bit.ly/lapakhirklhs22](http://bit.ly/lapakhirklhs22)
2. Saran/masukan/tanggapan secara tertulis dapat disampaikan melalui alamat e-mail bidangpp.dlhcilacap@gmail.com atau ke nomor WA Sdr. Doni Alfianto, ST (No. Hp. 081226819586)

Demikian atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI CILACAP
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AWALUDDIN MUURI, AP, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 199412 1 001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran I : Surat Bupati Cilacap
Nomor : 005/02728/24/CLP
Tanggal : 9 September 2022

Daftar Yang di Undang :

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap
5. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap
7. Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap
8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
11. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap
12. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap
13. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap
14. Kepala Kantor ATR / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap
15. Para Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
16. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda selaku Subkoordinator pada Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
17. Camat Maos
18. Camat Sidareja
19. Rektor UNUGHA Kesugihan
20. Direktur Politeknik Negeri Cilacap
21. Ketua LSM Peppeling



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)



RAPAT PEMBAHASAN KONSULTASI PUBLIK II KLHS RDTR KP MAOS DAN KP SIDAREJA
CILACAP, 12 SEPTEMBER 2022

DAFTAR HADIR

No	NAMA LENGKAP	L/P	INSTANSI/ALAMAT	NO. TELEPON	TANDA TANGAN
1	Sari Murniyati		DLH	081540917725	
2	Juwahudin		DLH	082233330545	
3	Vicj Pruba	L	Pabrik Negeri Cleop	081227000601	
4	MARSID	L	PSDA	082134198884	
5	M. Sulhan		Disnug	081327018507	
6	Yenni D.	L	Asosiasi	08223062600	
7	Hantoro	L	Kec. Sidareja	083130538259	
8	Kurnia Andri	L	BPUP	085641283795	
9	Fahrur Rofiq	L	VNU GYA	081328721237	
10	Ninto	P	DLH	08156979251	



RAPAT PEMBAHASAN KONSULTASI PUBLIK II KLHS RDTR KP MAOS DAN KP SIDAREJA
CILACAP, 12 SEPTEMBER 2022

No	NAMA LENGKAP	L/P	INSTANSI/ALAMAT	NO. TELEPON	TANDA TANGAN
11	A Sukoto	L	PEPELIN	085642658483	11
12	Pio D. I.	L	DISPERKUMPTA	085640278258	12
13	Singgha W	L	BAPPEDA		13
14	Edi Susanti	L	Disnakerin	081391409010	14
15	Hirno Fajar S	P	BRN	082720993242	15
16	Cia C	P	DPUPR		16
17	Mungawanah, S.E.	P	Kasi PM Ker. Maos		17
18	Sth Maghpirah W.	P	Staf PM Ker. Maos	035600088177	18
19	Indri	P	DPKUKM	08121522085	19
20	Kelik-G	L	BPBD		20
21	FritSony. A	L	Dinas Perikanan		21



RAPAT PEMBAHASAN KONSULTASI PUBLIK II KLHS RDTR KP MAOS DAN KP SIDAREJA
CILACAP, 12 SEPTEMBER 2022

No	NAMA LENGKAP	L/P	INSTANSI/ALAMAT	NO. TELEPON	TANDA TANGAN
22	Rendy NF	L	DLH	533 703	22
23	Ady. S	L	DLH	081327196768	23
24	Richā TH	P	DLH	085 728 919 127	24
25	Arif Nurdiansyah	L	DLH	—	25
26	Tnas MNP	P	DLH	085 085860 432284	26
27	SP. HARTONO	L	DLH	085 865 361912	27
28	Dani Alcarro	L	DLH	081 226 819 586	28
29	Iwan HM.	L	DLH.	08726965009	29
30					30
31					31
32					32

Dokumentasi









Materi Presentasi

Latar Belakang

UU 24 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 - 2021, mengamanatkan bahwa Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai dokumen perencanaan tata ruang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap dokumen RDTR sebagai instrumen untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan disusun sebagai bentuk antisipasi dan konsekuensi kebijakan, rencana dan program dalam Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Maos terhadap lingkungan hidup serta memenuhi kebutuhan akan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dimana dalam kajian terdapat beberapa isu penting terkait dampak pembangunan yaitu adanya potensi bencana, belum optimalnya pemanfaatan air minum, sanitasi, potensi bertambahnya pencemaran air, serta degradasi lahan pertanian menjadi terbangun.

Maksud Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan ini adalah mengintegrasikan temuan-temuan proses pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memberikan masukan terhadap rumusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam rangka penyusunan rencana detail tata ruang Kawasan Perkotaan Maos terhadap aspek lingkungan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyajikan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perda RDTR Kawasan Perkotaan Maos yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan Materi Teknis RDTR Kawasan Perkotaan Maos dan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (RKP) yang berpotensi memberikan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang menaungi analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Sasaran Penyusunan Dokumen KLHS Perda RDTR Kawasan Perkotaan Maos meliputi:

- Terdapatnya kondisi dan permasalahan lingkungan hidup di Kawasan Perkotaan Maos,
- Terdapatnya temuan wilayah (daya dukung) dalam menampung perkembangan kegiatan pembangunan,
- Terintegrasinya konsep-konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen rencana tata ruang.

Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos adalah seluruh desa dan kelurahan yang diformulasikan sebagai kawasan perkotaan di Kawasan Perkotaan Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Lingkup Kabupaten, Rencana, dan/atau Program yaitu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program RDTR Kawasan Perkotaan Maos.

Lingkup Materi

Lingkup materi penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos adalah sebagai berikut:

- Penyusunan dan penyempurnaan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos
- Penyusunan dan penyempurnaan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos
- Penyusunan dan penyempurnaan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos
- Penyusunan dan penyempurnaan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos
- Penyusunan dan penyempurnaan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos

Referensi Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai referensi hukum dalam kegiatan Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembidanaan dan Penyelenggaraan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.49/MENLHK/ SETEN/KUM/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Maos Perencanaan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2031

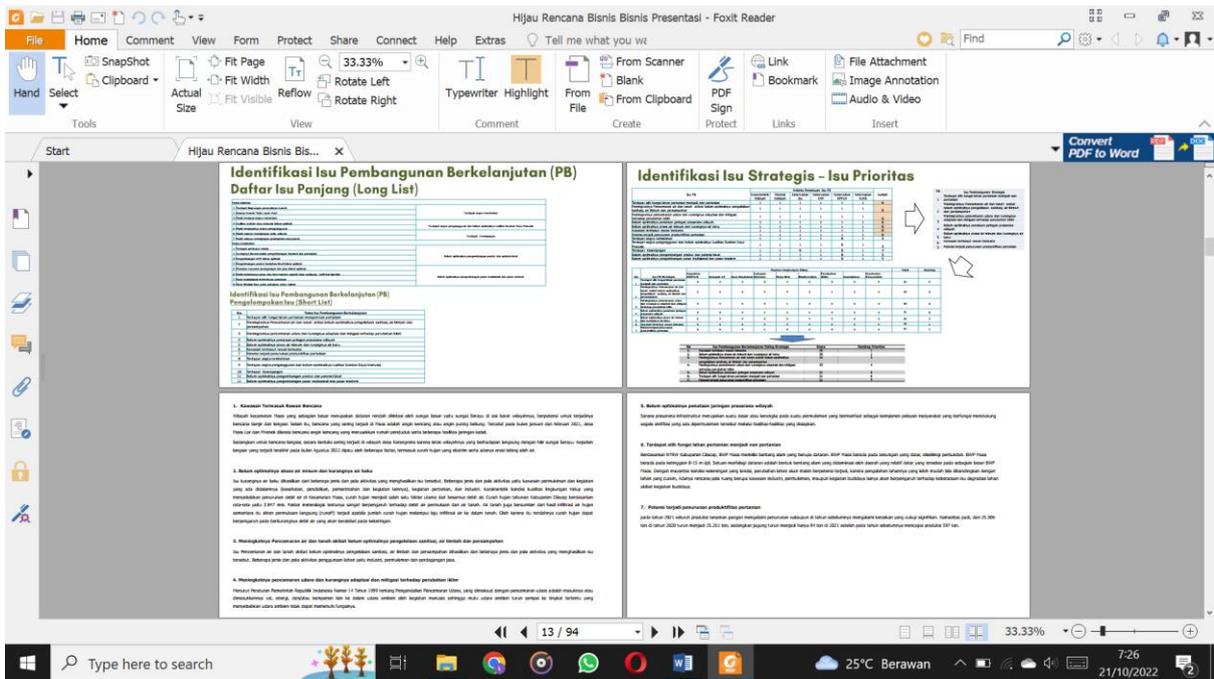
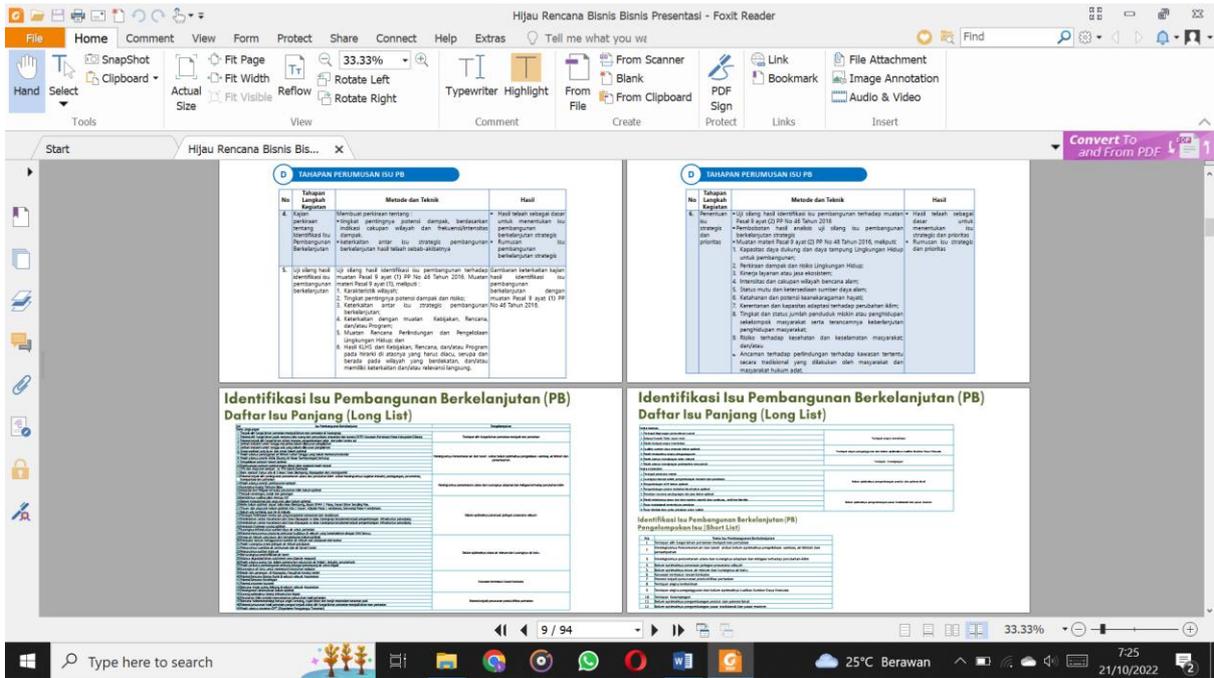
Gambaran Umum Perkotaan Maos

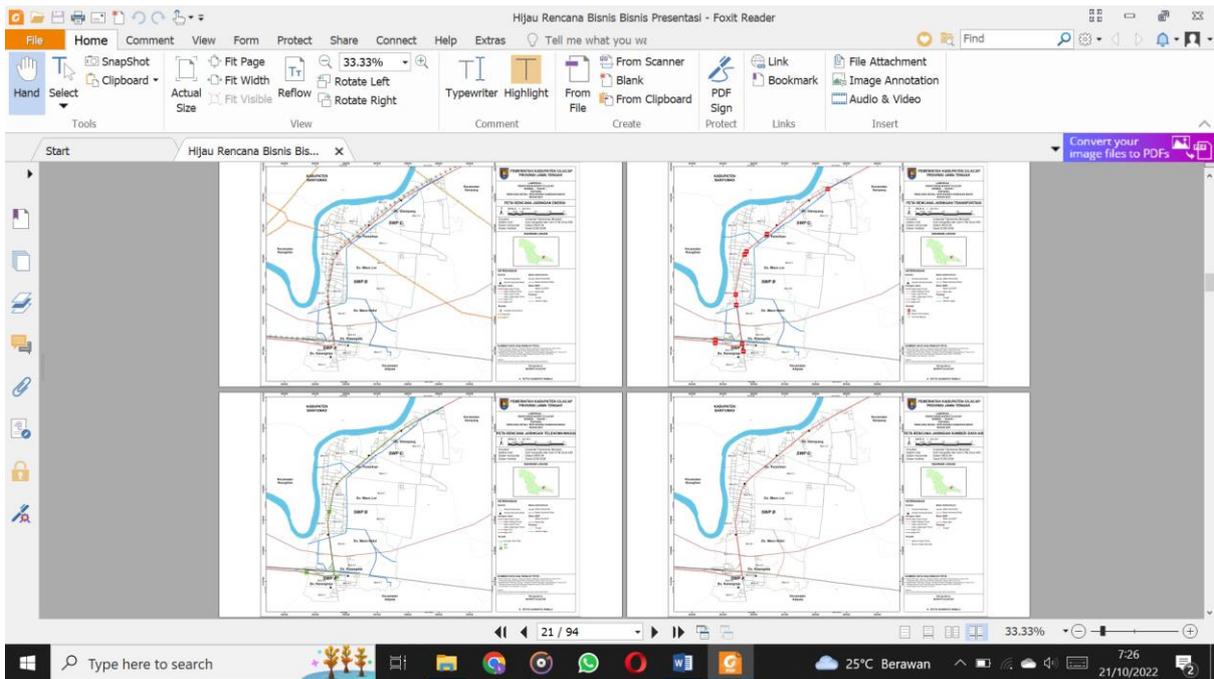
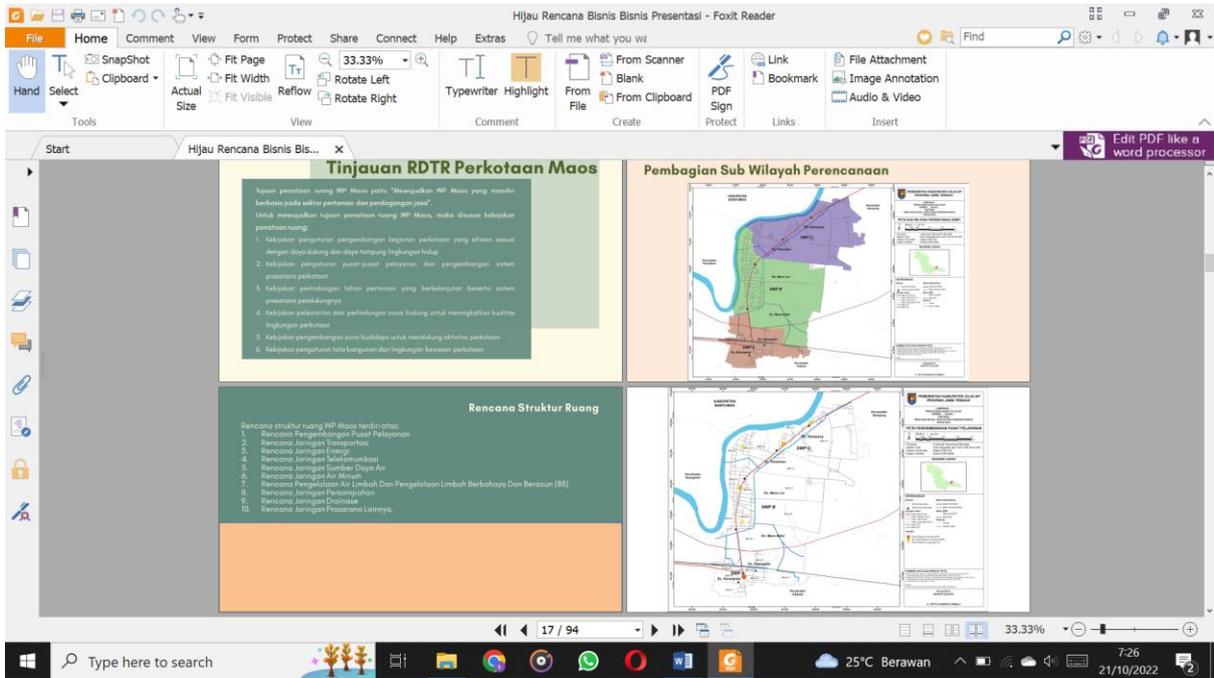
A TAHAPAN KLHS RDTR

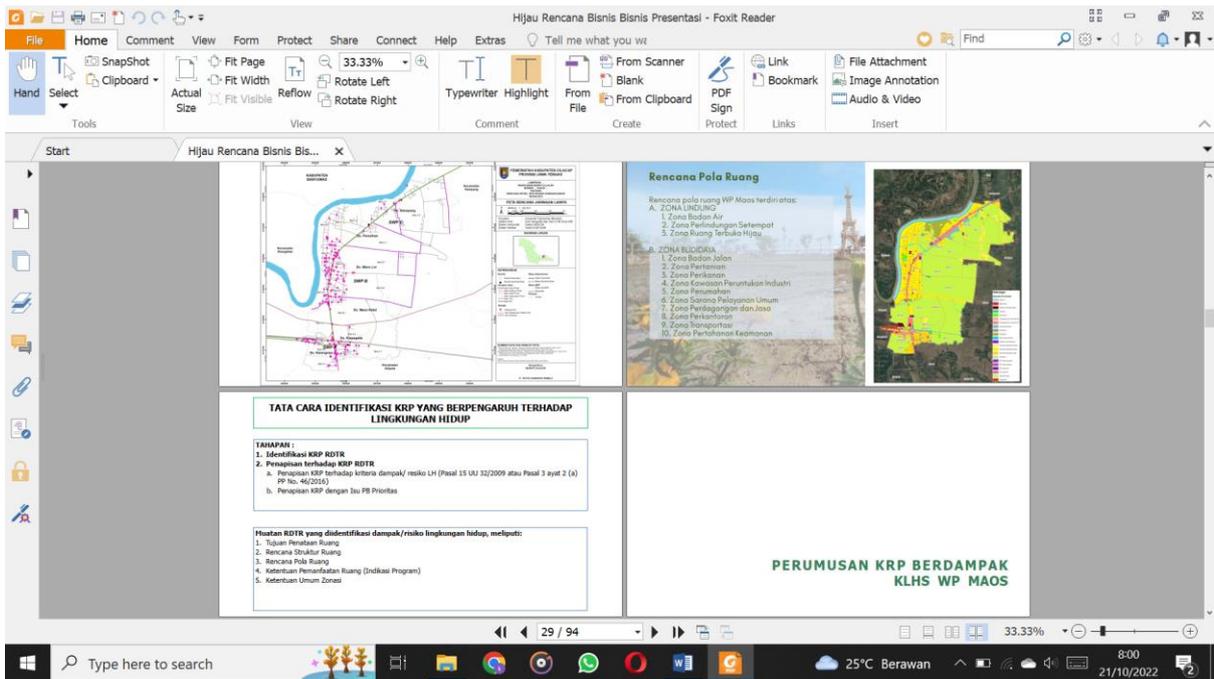
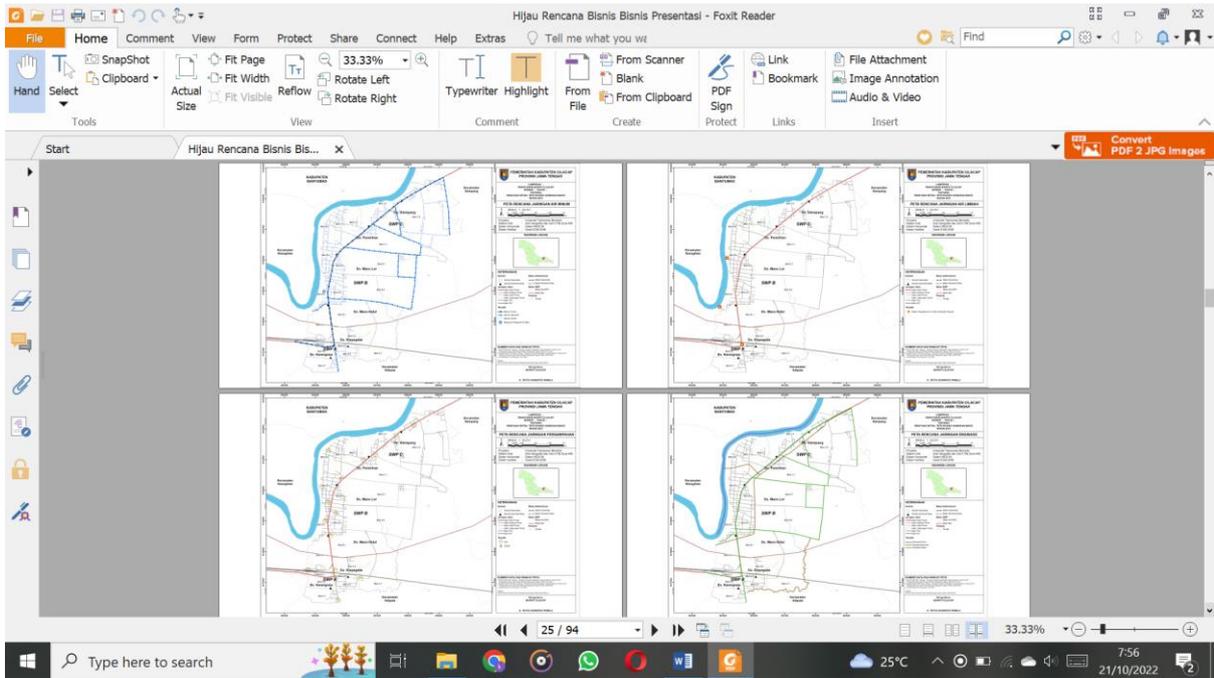
No	Tahap	Prosedur
A	Identifikasi isu lingkungan	Identifikasi isu lingkungan
B	Penyusunan RKA	Penyusunan RKA
C	Tahap Pengujian Pengaruh RKP	Identifikasi dan penentuan isu PB Isu PB prioritas (ps 3) Isu PB Prioritas (ps 5) (ps 20) Identifikasi RKP yang berpengaruh (ps 10 ps 15 ps 22)
D	Analisis pengaruh RKP & isu PB Prioritas	Kajian mandiri (ps 13 ps 14 ps 15)
E	Rekomendasi (ps 16 ps 26-29)	Rekomendasi (ps 16 ps 26-29)
F	Pengembangan (ps 30)	Pengembangan (ps 30)
G	Pengumuman Kualitas (PS 19) / (PS 31-34)	Pengumuman Kualitas (PS 19) / (PS 31-34)
H	Pembentukan (ps 23) / (ps 35)	Pembentukan (ps 23) / (ps 35)
I	Validasi (ps 25) / (ps 37)	Validasi (ps 25) / (ps 37)

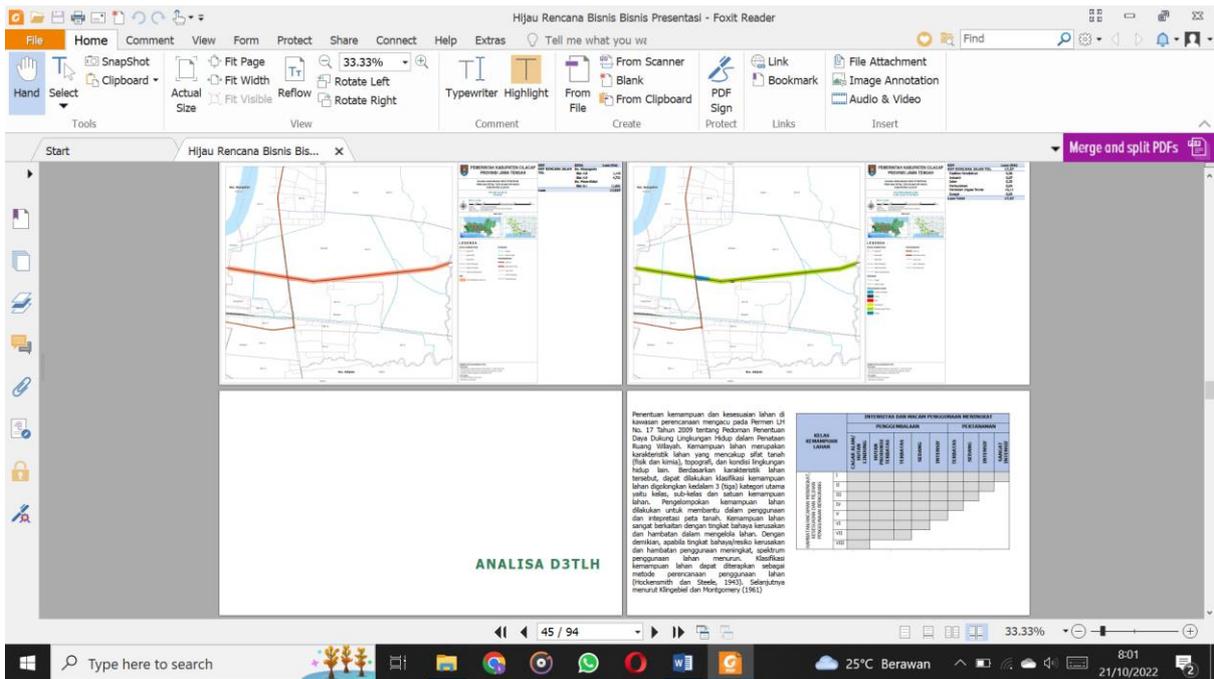
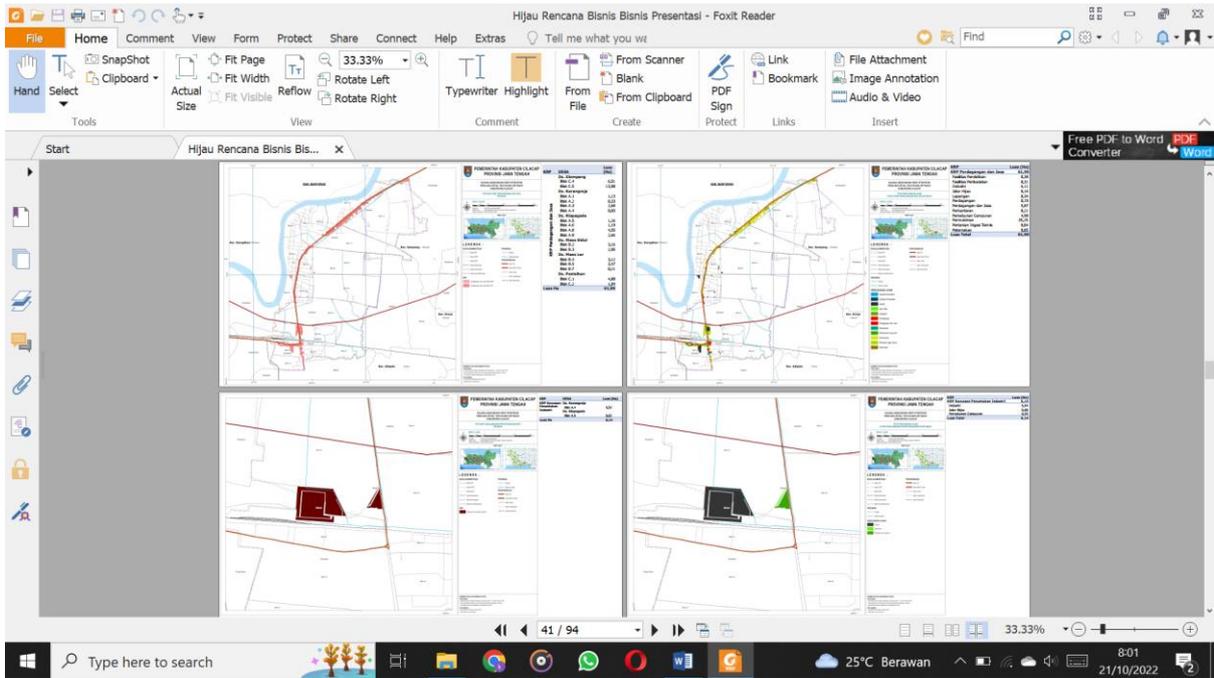
TAHAPAN PERUMUMAN ISU PB

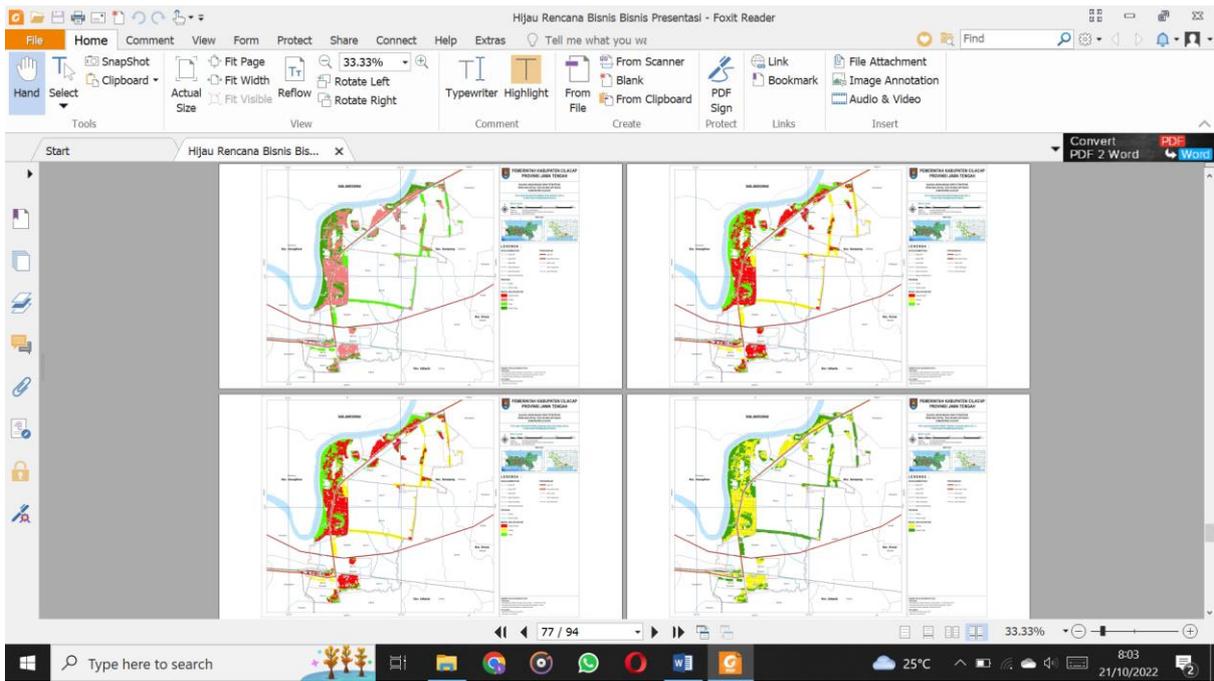
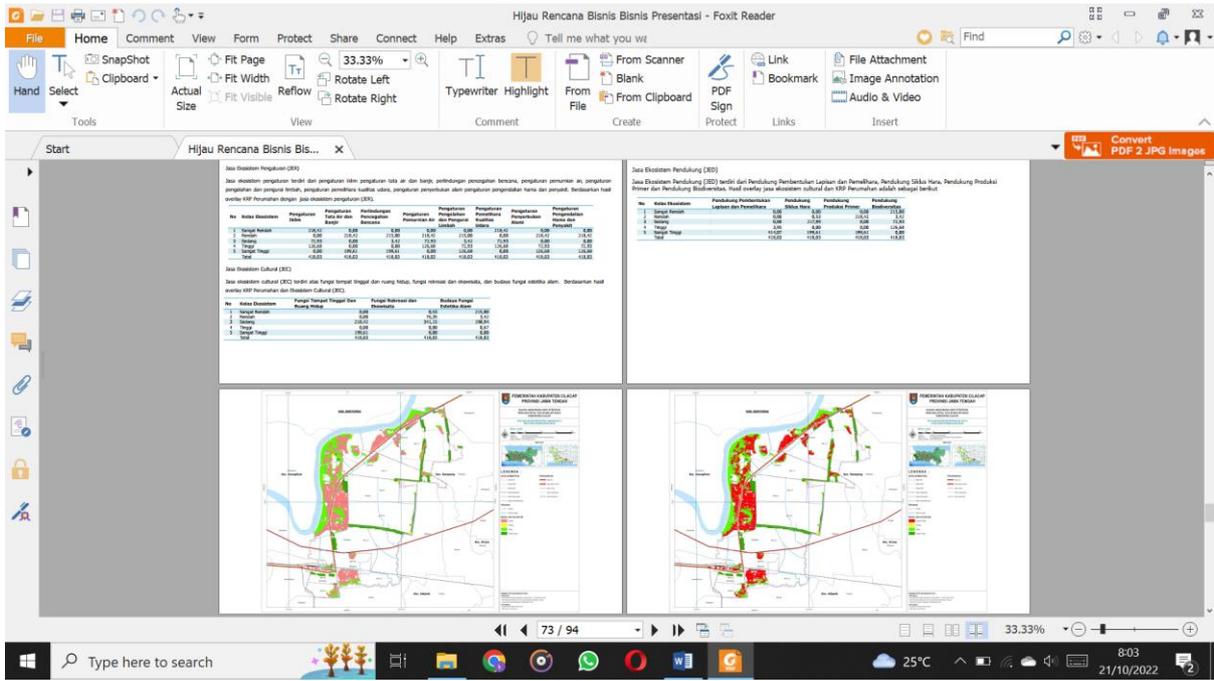
No	Langkah	Metode dan Teknik	Hasil
1	Identifikasi dan penentuan isu lingkungan	Menggunakan metode SWOT dan analisis lingkungan melalui wawancara (ps 8 ps 9 ps 10 ps 11 ps 12 ps 13 ps 14 ps 15 ps 16 ps 17 ps 18 ps 19 ps 20 ps 21 ps 22 ps 23 ps 24 ps 25 ps 26 ps 27 ps 28 ps 29 ps 30 ps 31 ps 32 ps 33 ps 34 ps 35 ps 36 ps 37 ps 38 ps 39 ps 40 ps 41 ps 42 ps 43 ps 44 ps 45 ps 46 ps 47 ps 48 ps 49 ps 50 ps 51 ps 52 ps 53 ps 54 ps 55 ps 56 ps 57 ps 58 ps 59 ps 60 ps 61 ps 62 ps 63 ps 64 ps 65 ps 66 ps 67 ps 68 ps 69 ps 70 ps 71 ps 72 ps 73 ps 74 ps 75 ps 76 ps 77 ps 78 ps 79 ps 80 ps 81 ps 82 ps 83 ps 84 ps 85 ps 86 ps 87 ps 88 ps 89 ps 90 ps 91 ps 92 ps 93 ps 94 ps 95 ps 96 ps 97 ps 98 ps 99 ps 100 ps 101 ps 102 ps 103 ps 104 ps 105 ps 106 ps 107 ps 108 ps 109 ps 110 ps 111 ps 112 ps 113 ps 114 ps 115 ps 116 ps 117 ps 118 ps 119 ps 120 ps 121 ps 122 ps 123 ps 124 ps 125 ps 126 ps 127 ps 128 ps 129 ps 130 ps 131 ps 132 ps 133 ps 134 ps 135 ps 136 ps 137 ps 138 ps 139 ps 140 ps 141 ps 142 ps 143 ps 144 ps 145 ps 146 ps 147 ps 148 ps 149 ps 150 ps 151 ps 152 ps 153 ps 154 ps 155 ps 156 ps 157 ps 158 ps 159 ps 160 ps 161 ps 162 ps 163 ps 164 ps 165 ps 166 ps 167 ps 168 ps 169 ps 170 ps 171 ps 172 ps 173 ps 174 ps 175 ps 176 ps 177 ps 178 ps 179 ps 180 ps 181 ps 182 ps 183 ps 184 ps 185 ps 186 ps 187 ps 188 ps 189 ps 190 ps 191 ps 192 ps 193 ps 194 ps 195 ps 196 ps 197 ps 198 ps 199 ps 200 ps 201 ps 202 ps 203 ps 204 ps 205 ps 206 ps 207 ps 208 ps 209 ps 210 ps 211 ps 212 ps 213 ps 214 ps 215 ps 216 ps 217 ps 218 ps 219 ps 220 ps 221 ps 222 ps 223 ps 224 ps 225 ps 226 ps 227 ps 228 ps 229 ps 230 ps 231 ps 232 ps 233 ps 234 ps 235 ps 236 ps 237 ps 238 ps 239 ps 240 ps 241 ps 242 ps 243 ps 244 ps 245 ps 246 ps 247 ps 248 ps 249 ps 250 ps 251 ps 252 ps 253 ps 254 ps 255 ps 256 ps 257 ps 258 ps 259 ps 260 ps 261 ps 262 ps 263 ps 264 ps 265 ps 266 ps 267 ps 268 ps 269 ps 270 ps 271 ps 272 ps 273 ps 274 ps 275 ps 276 ps 277 ps 278 ps 279 ps 280 ps 281 ps 282 ps 283 ps 284 ps 285 ps 286 ps 287 ps 288 ps 289 ps 290 ps 291 ps 292 ps 293 ps 294 ps 295 ps 296 ps 297 ps 298 ps 299 ps 300 ps 301 ps 302 ps 303 ps 304 ps 305 ps 306 ps 307 ps 308 ps 309 ps 310 ps 311 ps 312 ps 313 ps 314 ps 315 ps 316 ps 317 ps 318 ps 319 ps 320 ps 321 ps 322 ps 323 ps 324 ps 325 ps 326 ps 327 ps 328 ps 329 ps 330 ps 331 ps 332 ps 333 ps 334 ps 335 ps 336 ps 337 ps 338 ps 339 ps 340 ps 341 ps 342 ps 343 ps 344 ps 345 ps 346 ps 347 ps 348 ps 349 ps 350 ps 351 ps 352 ps 353 ps 354 ps 355 ps 356 ps 357 ps 358 ps 359 ps 360 ps 361 ps 362 ps 363 ps 364 ps 365 ps 366 ps 367 ps 368 ps 369 ps 370 ps 371 ps 372 ps 373 ps 374 ps 375 ps 376 ps 377 ps 378 ps 379 ps 380 ps 381 ps 382 ps 383 ps 384 ps 385 ps 386 ps 387 ps 388 ps 389 ps 390 ps 391 ps 392 ps 393 ps 394 ps 395 ps 396 ps 397 ps 398 ps 399 ps 400 ps 401 ps 402 ps 403 ps 404 ps 405 ps 406 ps 407 ps 408 ps 409 ps 410 ps 411 ps 412 ps 413 ps 414 ps 415 ps 416 ps 417 ps 418 ps 419 ps 420 ps 421 ps 422 ps 423 ps 424 ps 425 ps 426 ps 427 ps 428 ps 429 ps 430 ps 431 ps 432 ps 433 ps 434 ps 435 ps 436 ps 437 ps 438 ps 439 ps 440 ps 441 ps 442 ps 443 ps 444 ps 445 ps 446 ps 447 ps 448 ps 449 ps 450 ps 451 ps 452 ps 453 ps 454 ps 455 ps 456 ps 457 ps 458 ps 459 ps 460 ps 461 ps 462 ps 463 ps 464 ps 465 ps 466 ps 467 ps 468 ps 469 ps 470 ps 471 ps 472 ps 473 ps 474 ps 475 ps 476 ps 477 ps 478 ps 479 ps 480 ps 481 ps 482 ps 483 ps 484 ps 485 ps 486 ps 487 ps 488 ps 489 ps 490 ps 491 ps 492 ps 493 ps 494 ps 495 ps 496 ps 497 ps 498 ps 499 ps 500 ps 501 ps 502 ps 503 ps 504 ps 505 ps 506 ps 507 ps 508 ps 509 ps 510 ps 511 ps 512 ps 513 ps 514 ps 515 ps 516 ps 517 ps 518 ps 519 ps 520 ps 521 ps 522 ps 523 ps 524 ps 525 ps 526 ps 527 ps 528 ps 529 ps 530 ps 531 ps 532 ps 533 ps 534 ps 535 ps 536 ps 537 ps 538 ps 539 ps 540 ps 541 ps 542 ps 543 ps 544 ps 545 ps 546 ps 547 ps 548 ps 549 ps 550 ps 551 ps 552 ps 553 ps 554 ps 555 ps 556 ps 557 ps 558 ps 559 ps 560 ps 561 ps 562 ps 563 ps 564 ps 565 ps 566 ps 567 ps 568 ps 569 ps 570 ps 571 ps 572 ps 573 ps 574 ps 575 ps 576 ps 577 ps 578 ps 579 ps 580 ps 581 ps 582 ps 583 ps 584 ps 585 ps 586 ps 587 ps 588 ps 589 ps 590 ps 591 ps 592 ps 593 ps 594 ps 595 ps 596 ps 597 ps 598 ps 599 ps 600 ps 601 ps 602 ps 603 ps 604 ps 605 ps 606 ps 607 ps 608 ps 609 ps 610 ps 611 ps 612 ps 613 ps 614 ps 615 ps 616 ps 617 ps 618 ps 619 ps 620 ps 621 ps 622 ps 623 ps 624 ps 625 ps 626 ps 627 ps 628 ps 629 ps 630 ps 631 ps 632 ps 633 ps 634 ps 635 ps 636 ps 637 ps 638 ps 639 ps 640 ps 641 ps 642 ps 643 ps 644 ps 645 ps 646 ps 647 ps 648 ps 649 ps 650 ps 651 ps 652 ps 653 ps 654 ps 655 ps 656 ps 657 ps 658 ps 659 ps 660 ps 661 ps 662 ps 663 ps 664 ps 665 ps 666 ps 667 ps 668 ps 669 ps 670 ps 671 ps 672 ps 673 ps 674 ps 675 ps 676 ps 677 ps 678 ps 679 ps 680 ps 681 ps 682 ps 683 ps 684 ps 685 ps 686 ps 687 ps 688 ps 689 ps 690 ps 691 ps 692 ps 693 ps 694 ps 695 ps 696 ps 697 ps 698 ps 699 ps 700 ps 701 ps 702 ps 703 ps 704 ps 705 ps 706 ps 707 ps 708 ps 709 ps 710 ps 711 ps 712 ps 713 ps 714 ps 715 ps 716 ps 717 ps 718 ps 719 ps 720 ps 721 ps 722 ps 723 ps 724 ps 725 ps 726 ps 727 ps 728 ps 729 ps 730 ps 731 ps 732 ps 733 ps 734 ps 735 ps 736 ps 737 ps 738 ps 739 ps 740 ps 741 ps 742 ps 743 ps 744 ps 745 ps 746 ps 747 ps 748 ps 749 ps 750 ps 751 ps 752 ps 753 ps 754 ps 755 ps 756 ps 757 ps 758 ps 759 ps 760 ps 761 ps 762 ps 763 ps 764 ps 765 ps 766 ps 767 ps 768 ps 769 ps 770 ps 771 ps 772 ps 773 ps 774 ps 775 ps 776 ps 777 ps 778 ps 779 ps 780 ps 781 ps 782 ps 783 ps 784 ps 785 ps 786 ps 787 ps 788 ps 789 ps 790 ps 791 ps 792 ps 793 ps 794 ps 795 ps 796 ps 797 ps 798 ps 799 ps 800 ps 801 ps 802 ps 803 ps 804 ps 805 ps 806 ps 807 ps 808 ps 809 ps 810 ps 811 ps 812 ps 813 ps 814 ps 815 ps 816 ps 817 ps 818 ps 819 ps 820 ps 821 ps 822 ps 823 ps 824 ps 825 ps 826 ps 827 ps 828 ps 829 ps 830 ps 831 ps 832 ps 833 ps 834 ps 835 ps 836 ps 837 ps 838 ps 839 ps 840 ps 841 ps 842 ps 843 ps 844 ps 845 ps 846 ps 847 ps 848 ps 849 ps 850 ps 851 ps 852 ps 853 ps 854 ps 855 ps 856 ps 857 ps 858 ps 859 ps 860 ps 861 ps 862 ps 863 ps 864 ps 865 ps 866 ps 867 ps 868 ps 869 ps 870 ps 871 ps 872 ps 873 ps 874 ps 875 ps 876 ps 877 ps 878 ps 879 ps 880 ps 881 ps 882 ps 883 ps 884 ps 885 ps 886 ps 887 ps 888 ps 889 ps 890 ps 891 ps 892 ps 893 ps 894 ps 895 ps 896 ps 897 ps 898 ps 899 ps 900 ps 901 ps 902 ps 903 ps 904 ps 905 ps 906 ps 907 ps 908 ps 909 ps 910 ps 911 ps 912 ps 913 ps 914 ps 915 ps 916 ps 917 ps 918 ps 919 ps 920 ps 921 ps 922 ps 923 ps 924 ps 925 ps 926 ps 927 ps 928 ps 929 ps 930 ps 931 ps 932 ps 933 ps 934 ps 935 ps 936 ps 937 ps 938 ps 939 ps 940 ps 941 ps 942 ps 943 ps 944 ps 945 ps 946 ps 947 ps 948 ps 949 ps 950 ps 951 ps 952 ps 953 ps 954 ps 955 ps 956 ps 957 ps 958 ps 959 ps 960 ps 961 ps 962 ps 963 ps 964 ps 965 ps 966 ps 967 ps 968 ps 969 ps 970 ps 971 ps 972 ps 973 ps 974 ps 975 ps 976 ps 977 ps 978 ps 979 ps 980 ps 981 ps 982 ps 983 ps 984 ps 985 ps 986 ps 987 ps 988 ps 989 ps 990 ps 991 ps 992 ps 993 ps 994 ps 995 ps 996 ps 997 ps 998 ps 999 ps 1000	Hasil











Hijau Rencana Bisnis Bisnis Presentasi - Foxit Reader

File Home Comment View Form Protect Share Connect Help Extras Tell me what you want to do Find

Hand Select Tools Snapshot Clipboard Actual Size View Fit Page Fit Width Reflow Rotate Left Rotate Right Typewriter Highlight Comment From Scanner From File From Clipboard PDF Sign Link Bookmark File Attachment Image Annotation Audio & Video Insert

Start Hijau Rencana Bisnis Bis... x Merge and split PDFs

Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Berdasarkan overlay KRP Kawasan Perumahan berada di mayoritas lahan produktif (jasa ekosistem siklus hara) dengan kemampuan sangat tinggi sebesar 199,61 ha atau sekitar 48% dari total luas KRP Kawasan Perumahan dan kemampuan sedang sebesar 217,89 ha atau sekitar 52,12%. Hal ini akan berpotensi memberikan dampak pada produktivitas lahan dalam bidang pertanian.

No	KRP	Luas	Kategori	Kapasitas	Luas Potensial	Luas Terpenuhi
1	KRP 1.1	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
2	KRP 1.2	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
3	KRP 1.3	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
4	KRP 1.4	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
5	KRP 1.5	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
6	KRP 1.6	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
7	KRP 1.7	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
8	KRP 1.8	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
9	KRP 1.9	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
10	KRP 1.10	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
11	KRP 1.11	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
12	KRP 1.12	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
13	KRP 1.13	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
14	KRP 1.14	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
15	KRP 1.15	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
16	KRP 1.16	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
17	KRP 1.17	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
18	KRP 1.18	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
19	KRP 1.19	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
20	KRP 1.20	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
21	KRP 1.21	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
22	KRP 1.22	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
23	KRP 1.23	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
24	KRP 1.24	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
25	KRP 1.25	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
26	KRP 1.26	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
27	KRP 1.27	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
28	KRP 1.28	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
29	KRP 1.29	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
30	KRP 1.30	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
31	KRP 1.31	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
32	KRP 1.32	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
33	KRP 1.33	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
34	KRP 1.34	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
35	KRP 1.35	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
36	KRP 1.36	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
37	KRP 1.37	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
38	KRP 1.38	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
39	KRP 1.39	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
40	KRP 1.40	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
41	KRP 1.41	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
42	KRP 1.42	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
43	KRP 1.43	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
44	KRP 1.44	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
45	KRP 1.45	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
46	KRP 1.46	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
47	KRP 1.47	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
48	KRP 1.48	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
49	KRP 1.49	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
50	KRP 1.50	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
51	KRP 1.51	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
52	KRP 1.52	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
53	KRP 1.53	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
54	KRP 1.54	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
55	KRP 1.55	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
56	KRP 1.56	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
57	KRP 1.57	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
58	KRP 1.58	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
59	KRP 1.59	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
60	KRP 1.60	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
61	KRP 1.61	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
62	KRP 1.62	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
63	KRP 1.63	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
64	KRP 1.64	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
65	KRP 1.65	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
66	KRP 1.66	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
67	KRP 1.67	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
68	KRP 1.68	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
69	KRP 1.69	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
70	KRP 1.70	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
71	KRP 1.71	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
72	KRP 1.72	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
73	KRP 1.73	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
74	KRP 1.74	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
75	KRP 1.75	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
76	KRP 1.76	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
77	KRP 1.77	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
78	KRP 1.78	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
79	KRP 1.79	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
80	KRP 1.80	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
81	KRP 1.81	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
82	KRP 1.82	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
83	KRP 1.83	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
84	KRP 1.84	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
85	KRP 1.85	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
86	KRP 1.86	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
87	KRP 1.87	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
88	KRP 1.88	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
89	KRP 1.89	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
90	KRP 1.90	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
91	KRP 1.91	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
92	KRP 1.92	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
93	KRP 1.93	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
94	KRP 1.94	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
95	KRP 1.95	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
96	KRP 1.96	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
97	KRP 1.97	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
98	KRP 1.98	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
99	KRP 1.99	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
100	KRP 1.100	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00

Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Berdasarkan overlay KRP Kawasan Perumahan berada di mayoritas kemampuan jasa ekosistem pengaturan iklim (DER-I) memiliki kemampuan rendah sebesar 215,00 ha atau sekitar 52% dari total luas KRP Kawasan Perumahan. Sedangkan untuk kawasan dengan pengaturan iklim tinggi, sebesar 125 ha atau 30%. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi KRP Kawasan Perumahan berada pada lokasi yang memang memiliki kemampuan pengaturan iklim yang sedang hingga tinggi, memerlukan penangan seperti pengalihan untuk mengurangi pencemaran yang dapat mengakibatkan perubahan iklim.

No	KRP	Luas	Kategori	Kapasitas	Luas Potensial	Luas Terpenuhi
1	KRP 1.1	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
2	KRP 1.2	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
3	KRP 1.3	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
4	KRP 1.4	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
5	KRP 1.5	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
6	KRP 1.6	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
7	KRP 1.7	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
8	KRP 1.8	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
9	KRP 1.9	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
10	KRP 1.10	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
11	KRP 1.11	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
12	KRP 1.12	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
13	KRP 1.13	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
14	KRP 1.14	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
15	KRP 1.15	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
16	KRP 1.16	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
17	KRP 1.17	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
18	KRP 1.18	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
19	KRP 1.19	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
20	KRP 1.20	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
21	KRP 1.21	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
22	KRP 1.22	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
23	KRP 1.23	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
24	KRP 1.24	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
25	KRP 1.25	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
26	KRP 1.26	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
27	KRP 1.27	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
28	KRP 1.28	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
29	KRP 1.29	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
30	KRP 1.30	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
31	KRP 1.31	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
32	KRP 1.32	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
33	KRP 1.33	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
34	KRP 1.34	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
35	KRP 1.35	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
36	KRP 1.36	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
37	KRP 1.37	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
38	KRP 1.38	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
39	KRP 1.39	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
40	KRP 1.40	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
41	KRP 1.41	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
42	KRP 1.42	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
43	KRP 1.43	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
44	KRP 1.44	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
45	KRP 1.45	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
46	KRP 1.46	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
47	KRP 1.47	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
48	KRP 1.48	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
49	KRP 1.49	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
50	KRP 1.50	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
51	KRP 1.51	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
52	KRP 1.52	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
53	KRP 1.53	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
54	KRP 1.54	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
55	KRP 1.55	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
56	KRP 1.56	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
57	KRP 1.57	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
58	KRP 1.58	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
59	KRP 1.59	100,00	Sangat Tinggi	199,61	100,00	100,00
60	KRP 1.60	100,00	Sangat Tinggi			



DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN
CILACAP



KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RDTR

Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perkotaan Maos
Kabupaten Cilacap

LAMPIRAN **8**

PENJAMINAN KUALITAS

KLHS

**PENJAMINAN KUALITAS
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAOS
KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor :/...../
Tanggal: ... September 2022

Penjaminan kualitas KLHS dilakukan dengan mengacu pada Lampiran VIII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Nama KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Nama Kebijakan, Rencana, atau Program (KRP)	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
K / L Penanggung Jawab	Tim Penjamin Kualitas Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun Pelaksanaan	2022

Penilaian Desain Proses KLHS

Penilaian : Desain Proses KLHS		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Apakah KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan proses perencanaan KRP ? - Bila "Ya" lanjutkan ke c - Bila "Tidak" lanjutkan ke a, lalu b dan c	Ya	KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan bersamaan sejak awal penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah hingga setiap tahap hingga hasil final penyusunan KRP RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
a. Adakah Mekanisme komunikasi antara tim perencana dengan kelompok kerja KLHS ?	-	-
b. Apakah Rekomendasi yang diusulkan KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP ?	-	-
c. Apakah disampaikan secara jelas siapa penyusun KLHS ? (SDM Internal institusi pembuat KRP, SDM institusi yang ditunjuk sebagai penyusun KLHS, tenaga ahli eksternal, perusahaan konsultan, Pokja yang dibentuk oleh SK, pegawai pemerintah atau lainnya)	Ya	KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah disusun oleh Kelompok Kerja KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sebagai Ketua Pokja yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penyusunan KLHS. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh tim konsultan multi disiplin yang berpengalaman dalam penyusunan KLHS dan kajian lingkungan lainnya dari CV. Ideal Mandiri Consultant dengan Tenaga Ahli Utama KLHS Alex Luqman Setio Wibowo, ST, MSi.
<p>Ringkasan Kesimpulan :</p> <p>KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap yang disusun oleh Kelompok Kerja KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: tanggal 2022 dimana Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sebagai Ketua Pokja telah sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, baik dari aspek substansi maupun proses penyusunan. Rekomendasi yang disampaikan dalam KLHS memenuhi kriteria layak, sesuai dengan kaidah pedoman dan langkah-langkah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta telah dibahas bersama tim penyusun KRP dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap.</p>		

Tabel 1. Penilaian Laporan KLHS

Penilaian : Laporan KLHS		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Apakah Laporan KLHS telah memuat :	Nilai : <ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkap • Lengkap • Terpenuhi sebagian • Tidak bisa dilakukan penilaian (dijelaskan dalam keterangan) 	
1	Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS	Lengkap <p>Termuat dalam Bab I Pendahuluan, Sub bab 1.1 Latar Belakang dan 1.3 Referensi Hukum, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 14 b. Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) c. Pasal 16 d. Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) e. Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) f. Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) 2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2) 3. Permen LHK Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, pasal 4 ayat (3) huruf a : Bahwa KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan RDTR.
2	Metode, tehnik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan	Lengkap <p>Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap mengikuti ketentuan (Metode, tehnik, rangkaian langkah-langkah) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH dan Pembangunan berkelanjutan tercantum dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi KRP yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap LH dengan tabel Penapisan KRP

Penilaian : Laporan KLHS		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
		<p>berdampak dengan Pasal 15 UU 32/2009 dan Pasal 3 ayat 2(a) PP No. 46/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabel penapisan hasil Analisis Muatan KRP berdampak dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Prioritas ▪ Tabel KRP berdampak lingkungan hidup yang memerlukan Kajian
3	Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP	<p>Lengkap</p> <p>Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap mengikuti ketentuan (Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan perumusan alternatif muatan KRP, dibedakan menjadi beberapa tipologi berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 PP 46/2016 dan Lampiran 1 PP No. 22 Tahun 2021 seperti tercantum dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabel Alternatif Penyempurnaan KRP
4	Pertimbangan, muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan	<p>Lengkap</p> <p>Rekomendasi perbaikan KRP sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Beberapa pertimbangan yang digunakan berupa perundangan dalam analisis yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Pasal 4 ayat (3) huruf a : Bahwa KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan RTRW dan turunannya. ▪ Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (mengenai kriteria dampak) ▪ Acuan Modul Penggunaan Data Spasial Daya Dukung Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem Provinsi Dan Kabupaten di Ekoregion Jawa (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Penilaian : Laporan KLHS			
Kriteria	Penilaian	Keterangan	
		<p>Jawa Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampiran VI PermenLHK No. P.69 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP ▪ 	
5	Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP	Lengkap	Termuat dalam Bab Integrasi dalam Tabel Persandingan rekomendasi KLHS dan KRP Final RDTR Kab. Cilacap.
6	Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS	Lengkap	<p>Partisipasi masyarakat dilakukan dengan melibatkan Pokja KLHS dan pemangku kepentingan dari unsur Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, LSM, dunia usaha, tokoh masyarakat dalam tahapan pelaksanaan KLHS melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Publik 1, untuk penjarangan isu pembangunan Berkelanjutan; 2. <i>Focussed Group Discussion</i> 1, untuk Penetapan Isu Strategis; 3. <i>Focussed Group Discussion</i> 2, untuk Penetapan Isu Prioritas; 4. Konsultasi Publik 2, untuk penyepakatan Identifikasi KRP berdampak, Analisis muatan KLHS, Penyempurnaan alternatif, Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan 5. <i>Focussed Group Discussion</i> 3, untuk penyepakatan pengambilan keputusan integrasi hasil KLHS kedalam KRP RDTR
7	Hasil penjaminan kualitas KLHS	Lengkap	Hasil penjaminan kualitas KLHS disusun berdasarkan muatan form lampiran penjaminan kualitas dokumen KLHS yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8	Ringkasan Eksekutif yang menuangkan rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk	Lengkap	Laporan KLHS memuat Ringkasan Eksekutif yang menguraikan metode, teknik, langkah-langkah dan hasil proses

Penilaian : Laporan KLHS		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
pengambilan keputusan secara jelas.		penyusunan KLHS serta rekomendasi untuk pengambilan keputusan.

Tabel 2. Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas

Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan paling strategis sudah disepakati oleh pemangku kepentingan sebagai akar masalah dan telah disampaikan dengan jelas ?	Sudah disepakati	Isu pembangunan berkelanjutan dirumuskan melalui proses sebagai berikut : a. Hasil survey primer dan sekunder, hasil desk studi dan dari kajian RDTR yang telah ada dan mengacu pedoman dalam PP 46/ 2016. b. Pelaksanaan FGD 1 dengan Pokja KLHS dan pemangku kepentingan dari unsur Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, LSM, dunia usaha, tokoh masyarakat untuk penyepakatan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis
<i>Apakah Hasil identifikasi isu strategis telah sedikitnya mempertimbangkan :</i>	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
1 Karakteristik wilayah	Sudah dipertimbangkan	Telah dibahas karakteristik wilayah meliputi: wilayah administrasi, demografi, topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, wilayah rawan bencana dan kondisi sosial ekonomi.
2 Tingkat pentingnya potensi dampak	Sudah dipertimbangkan	Tingkat penting dampak dari masing-masing isu telah dipertimbangkan
3 Keterkaitan antar isu strategis	Sudah dipertimbangkan	Keterkaitan antar isu strategis telah dibahas

Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas			
Kriteria		Penilaian	Keterangan
4	Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Sudah dipertimbangkan	Keterkaitan isu strategis dengan Muatan KRP telah dipertimbangkan.
5	Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH, dan/atau	Sudah dipertimbangkan	Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH, telah dipertimbangkan
6	Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung	Sudah dipertimbangkan	Keterkaitan Dengan Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung. KLHS yang diacu adalah KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah, KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah dan KLHS RTRW Kabupaten Cilacap.
<i>Aspek rumusan prioritas juga memperhatikan aspek-aspek berikut :</i>		Uraikan Penilaiannya dalam keterangan	
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Sudah	Dibahas dalam Bab 3 dan Bab 4 KLHS, terkait dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan dianalisis dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daya dukung dan daya tampung lahan, 2. Daya dukung dan daya tampung air, 3. Satuan kemampuan lahan 4. jasa ekosistem penyedia pangan, 5. Jasa ekosistem penyedia air
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Sudah	Dibahas dalam Bab 2 dan Bab 4 KLHS, terkait dengan perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> - Besarnya jumlah penduduk terdampak - Luas wilayah penyebaran dampak - Intensitas dan lamanya dampak berlangsung

Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas			
Kriteria		Penilaian	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak - Sifat kumulatif dampak - Sifat pemulihan dampak - Jasa ekosistem pengurai limbah
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Sudah	Dibahas dalam Bab 2 dan Bab 4 KLHS, terkait dengan kinerja layanan / jasa ekosistem memperhatikan beberapa jasa ekosistem yang meliputi jasa ekosistem penyedia pangan, penyedia air, pengatur iklim dan pendukung biodiversity
4	Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam	Sudah	Dibahas dalam Bab 2 dan Bab 4 KLHS, terkait dengan intensitas dan sebaran wilayah bencana di Kabupaten Cilacap dianalisis mengenai: resiko bencana banjir, gempa bumi dan kekeringan dan jasa ekosistem Jasa ekosistem Pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana alam
5	Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam	Sudah	Dibahas dalam Bab 2 dan Bab 4, terkait dengan status mutu dan ketersediaan sumber daya alam dihitung dengan analisis Mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dan ketersediaannya; Mengukur cadangan yang tersedia, tingkat pemanfaatannya yang tidak menggerus cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang; dan Mengukur dengan nilai dan distribusi manfaat dari sumber daya alam tersebut secara ekonomi, analisis daya dukung pangan dan air, analisis jasa ekosistem penyedia pangan
6	Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Sudah	Dibahas dalam Bab 3 dan Bab 4, terkait dengan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dilakukan analisis jasa ekosistem pendukung biodiversitas.

Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas			
Kriteria		Penilaian	Keterangan
7	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Sudah	Dibahas dalam Bab 4, terkait dengan kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim berupa analisis terhadap: 1. perubahan koefisien pengaliran, 2. run off, 3. emisi karbon dan 4. jasa ekosistem pengaturan iklim
8	Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat	Sudah	Dibahas dalam Bab 2 dan Bab 4, terkait dengan analisis: tingkat dan status jumlah penduduk miskin
9	Resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau	Sudah	Dibahas dalam Bab 2 dan Bab 4 , terkait dengan analisis: 1. Kondisi Sumber daya air 2. Aspek penyediaan Air Minum 3. Aspek pengelolaan SPALD 4. Aspek pengelolaan limbah cair 4. Aspek pengelolaan Persampahan 5. Aspek pengelolaan limbah B3 6. Aspek Drainase 7. Angka kesakitan 8. Laporan kualitas air permukaan
10	Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat	Tidak ada	Tidak terdapat masyarakat hukum adat di kecamatan Maos
Apakah lingkup geografis disampaikan dengan jelas ?		Ya	Ya, diuraikan secara jelas dalam Bab 2 KLHS mengenai luas dan batas wilayah
Jika Ya, apakah melingkupi wilayah diluar cakupan KRP ?		Ya	Ya, diuraikan secara terbatas antara lain pada substansi yang terkait dengan topografi, klimatologi, geologi, hidrologi dan perubahan iklim
Apakah Lingkup pihak terkena dampak / resiko dan berkepentingan disampaikan dengan jelas ?		Ya	Ya, didalam pembahasan setiap isu diuraikan pihak yang terkena dampak meski kadang tidak secara eksplisit.

Tabel 3. Penilaian Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Penilaian : Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
Apakah kondisi terkini dan pemetaan masalah dari isu prioritas dideskripsikan dengan jelas ?	Ya	Ya, telah dibahas dalam Bab 4
Apakah tersedia informasi yang menjelaskan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkini dan atau kecenderungannya ?	Ya	Ya, telah dibahas dalam Bab 2 dan Bab 4
Apakah telah dilakukan Analisis semua dampak KRP terhadap isu prioritas ?	Ya	Ya, telah dibahas dalam Bab 4
Aakah hasil analisis diatas dideskripsikan dengan jelas ?	Ya	Ya. Telah dibahas dalam Bab 4
Apakah hasil analisis diatas dijelaskan secara spasial ?	Ya	Ya, dalam analisisnya dijelaskan rinci secara spasial.
Jika "Ya" apakah dibedakan tingkat kerinciannya ? Contoh : isu skala nasional, skala pulau atau skala lokasi	Tidak	Isu tidak dibedakan tingkat entitas dan kerinciannya

Tabel 4. Penilaian Pengkajian

Penilaian : Pengkajian		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung LH untuk pembangunan	Ya Dituangkan dalam Bab 4 mengacu pada daya dukung lahan dan daya dukung air terkait dengan peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada kebutuhan air dan pangan. Selai itu juga dipengaruhi dan mempengaruhi satuan kemamuan lahan, jasa ekosistem penyedia pangan dan air.
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko LH	Ya Dituangkan dalam Bab 4, mengacu pada analisis ancaman bencana banjir, gempa, kekeringan, serta pencemaran. Besaran dampak memperhatikan antara lain:

Penilaian : Pengkajian			
Kriteria		Penilaian	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Besarnya jumlah penduduk terdampak - Luas wilayah penyebaran dampak - Intensitas dan lamanya dampak berlangsung - Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak - Sifat kumulatif dampak - Sifat pemulihan dampak - Jasa ekosistem pengurai limbah
3	Kinerja layanan atau jasa ekosistem	Ya	<p>Termuat dalam Bab 4 terkait Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem. Acuan Modul Penggunaan Data Spasial Daya Dukung Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem Provinsi dan Kabupaten Di Ekoregion Sumatra (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatra Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2016). Analisis overlay terhadap jasa ekosistem, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Overlay pemetaan KRP terhadap jasa ekosistem yang terpengaruh ▪ Deskripsi dalam bentuk analisis dan diagram ▪ Analisis kondisi jasa ekosistem pada setiap peruntukan KRP yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup. <p>Analisis overlay terhadap jasa ekosistem, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa ekosistem Penyedia Pangan (JEP1) ▪ Jasa Ekosistem Penyedia Air bersih (JEP2) ▪ Jasa Ekosistem Pengatur Iklim (JER2) ▪ Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (JED 4)
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Ya	Termuat dalam Bab 4 terkait kondisi sumber daya air, pertanian dan peternakan.
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan	Ya	Termuat dalam Bab 2 dan 4 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi

Penilaian : Pengkajian		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
		Terhadap Perubahan Iklim berupa analisis dianalisis proyeksi terkait: 1. perubahan koefisien pengaliran, 2. run off, 3. emisi karbon dan 4. jasa ekosistem pengaturan iklim
6	Ya	Termuat dalam Bab 2 dan 4 Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem. Analisis overlay terhadap jasa ekosistem, berupa : ▪ Jasa ekosistem Pendukung Biodiversitas (JED 4)
Apakah pengkajian yang bersifat kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan yang akuntabel ?	Ya	Mengacu pada uraian baseline data terkait isu strategis pembangunan
Apakah pengkajian menyebutkan landasan pedoman, acuan / referensi standar, jaminan akuntabilitas dari ahli yang jelas ?	Ya	Mengacu pada referensi / acuan yang digunakan dalam laporan formal
Apakah pengkajian dilakukan dengan pendekatan spasial	Ya	Diuraikan dalam peta yang menunjukkan hasil analisis spasial
Apakah dijelaskan pada tahap penyusunan KRP yang mana, proses telaahan KLHS dilaksanakan ?	Ya	Dalam KLHS RDTR telaahan dilakukan terhadap materi teknis RDTR (termasuk peta) yang memuat tujuan, pola ruang dan struktur ruang, indikasi program, ketentuan peraturan zonasi dan raperkadanya.
Apakah semua dampak dan resiko terhadap isu prioritas telah dianalisis ?	Ya	Dibahas untuk masing-masing isu prioritas mulai dari analisis tren masa lalu dan proyeksi masa datang, serta analisis dampak atau risiko kedepan
Apakah perkiraan dampak lanjutan dan dampak kumulatif sudah dianalisis ?	Ya	Dibahas untuk masing-masing isu prioritas terkait analisis dampak kedepan
Apakah perkiraan dampak dan risiko dilakukan secara kuantitatif ?	Ya	Perkiraan dampak dihitung secara kuantitatif dan kualitatif untuk masing-masing KRP terdampak.

Penilaian : Pengkajian		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Apakah dilakukan simulasi berbasis skenario untuk perkiraan dampak dan risiko ?	Ya	Terbatas pada analisis dan risiko kedepan
Apakah perkiraan dampak dan risiko dituangkan secara spasial ?	Tidak	Data spasial untuk menampilkan kondisi saat ini. Untuk perkiraan kedepan menggunakan analisis kualitatif.
Apakah ada penjelasan antara hasil telaahan dengan pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ?	Ya	Dibahas pada masing-masing KRP yang menimbulkan dampak lingkungan hidup.

Tabel 5. Penilaian Alternatif dan Rekomendasi

Penilaian Alternatif dan Rekomendasi			
Kriteria	Penilaian	Keterangan	
	Uraikan penilaiannya dalam keterangan		
Bagaimana bentuk penyempurnaan KRP ? Uraikan dalam bagian-bagian yang sesuai di bawah ini :			
1	Perubahan tujuan atau target	Tidak ada	Tidak ada perubahan tujuan atau target.
2	Perubahan strategi pencapaian target	Tidak ada	Tidak ada perubahan strategi pencapaian target.
3	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi	Ada	Tidak ada Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi
4	Perubahan, penyesuaian atau adaptasi proses atau metode terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Tidak ada	Tidak ada perubahan, penyesuaian atau adaptasi proses atau metode terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau	Ada	Pemberian arahan untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem seiring dengan perubahan lingkungan yang terjadi sebagai dampak kegiatan pada struktur ruang dan pola ruang.

Penilaian Alternatif dan Rekomendasi			
Kriteria		Penilaian	Keterangan
6	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup	Ada	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup yang terjadi sebagai dampak kegiatan ada pada arahan perwujudan pada struktur dan pola ruang.
	Apakah dijelaskan bagaimana menyusun dan memutuskan alternatif KRP serta rekomendasi KLHS ?	Ya	Substansi telah diakomodir
	Apakah langkah-langkah untuk pencegahan dan pengurangan dampak dan resiko dari KRP telah diidentifikasi dengan jelas ?	Ya	Telah diuraikan dalam Bab 6 KLHS
	Apakah langkah-langkah mitigasi mencantumkan apa perkiraan dampak / risiko tambahan / sisa dampak yang mungkin / masih akan muncul ?	Ya	Substansi telah diakomodir.
	Adakah rekomendasi KLHS terkait hasil kajian terutama pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung LH diidentifikasi dengan jelas ?	Ya	Telah diuraikan pada Bab 6 KLHS
	Apakah hasil rekomendasi konsisten dan relevan sebagai hasil dari rangkaian proses penetapan isu prioritas, pengkajian dan penyusunan alternatif ?	Ya	Rekomendasi merupakan hasil yang diperoleh dari rangkaian proses penetapan isu prioritas, pengkajian dan penyusunan alternatif
	Apakah disusun rekomendasi tindak lanjut tambahan sebagai konsekuensi implementasi KLHS untuk KRP ?	Ya	Pada rekomendasi indikasi program, diberikan arahan tindak lanjut untuk dipertajam dan Rencana Strategis OPD pelaksana program

Tabel 6. Penilaian Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS

Penilaian Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Apakah telah terpenuhi :	Nilai : - Sudah - Belum Ada Catatan (keterangan)	

Penilaian Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Data dukung proses Konsultasi Publik (foto, absen, berita acara)	Sudah	Terlampir
Dokumen KRP sebelum dan sesudah KRP diperbaiki dan / atau matriks yang menjelaskan perubahan sebelum dan sesudah	Sudah	Terlampir
Dokumen Penjaminan kualitas	Sudah	Terlampir
Bukti Pemenuhan kompetensi penyusun KLHS	Sudah	Terlampir
SK Kelompok Kerja KLHS	Sudah	Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: tanggal dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sebagai Ketua Pokja yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penyusunan KLHS.

Tabel 7. Penilaian Integrasi Hasil KLHS / Pengambilan Keputusan

Penilaian Integrasi Hasil KLHS / Pengambilan Keputusan		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Apakah telah terpenuhi	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS dituliskan / dimasukkan materi teknis KRP	Ya	Dalam pekerjaan ini, materi teknis disini diartikan dalam Materi Teknis RDTR, dan hasil rekomendasi yang dihasilkan KLHS telah diintegrasikan dalam Draft Materi Teknis RDTR.
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS dituliskan / dijadikan ketentuan pengaturan KRP	Ya	Hasil rekomendasi yang dihasilkan KLHS telah diintegrasikan dalam Draft Materi Teknis RDTR. KRP yang telah diintegrasikan dengan KLHS antara lain pada : <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan dan Strategi - Peta spasial - Arahan perwujudan atau Indikasi program

Penilaian Integrasi Hasil KLHS / Pengambilan Keputusan		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
		- Ketentuan Umum Peraturan Zonasi. - Ketentuan dalam raperkada
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS dijembatani / diinterpretasikan kembali penulisannya dalam bahasa peraturan pada KRP	Ada	Sebagian rekomendasi yang dihasilkan KLHS dapat dijembatani/ diinterpretasikan kembali penulisannya dalam bahasa peraturan pada KRP, yaitu pada draft raperda.
Rekomendasi KLHS diatur tersendiri dalam ketentuan KRP (tidak ditulis kembali)	Tidak ada	Seluruh rekomendasi, baik yang ditujukan untuk penyempurnaan RDTR Kabupaten Cilacap maupun turunannya, akan dituliskan kembali di dalam masing-masing dokumen.
Penjelasan tentang KRP lainnya yang juga harus mempertimbangkan rekomendasi KLHS ini ?	Ya	Dalam proses penjaminan KLHS, terdapat rekomendasi yang ditujukan untuk KRP lain yaitu : Rencana Strategis Dinas.
Rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS bagi KRP turunannya	Tidak ada	Tidak ada rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS bagi KRP turunannya. Penyusunan KLHS bagi KRP turunannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL sebagai tindak lanjut KRP ini		

Tabel 8. Penilaian Partisipasi Pemangku Kepentingan

Penilaian : Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
Apakah dijelaskan pada tahapan mana saja dilakukan konsultasi publik?	Ya	Konsultasi Publik didalam penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap disebut Focussed Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik menyesuaikan dengan Dokumen Kontrak, dan sudah mengakomodir semua tahapan yang harus

Penilaian : Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
		<p>dilaksanakan dalam penyusunan KLHS.</p> <p>Partisipasi masyarakat dilakukan dengan melibatkan Pokja KLHS dan pemangku kepentingan dari unsur Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, LSM, dunia usaha, tokoh masyarakat dalam tahapan pelaksanaan KLHS melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Publik 1, untuk Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan; 2. Focussed Group Discussion 1, untuk Penetapan Isu Strategis dan Isu Prioritas; 3. Focussed Group Discussion 2, untuk Penetapan Isu Prioritas; 4. Konsultasi Publik 2, untuk Penyepakatan Identifikasi Krp Berdampak, Analisis Muatan Klhs, Penyempurnaan Alternatif, Rekomendasi Perbaikan Untuk Pengambilan Keputusan Krp Yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 5. Focussed Group Discussion 3, untuk Penyepakatan Pengambilan Keputusan Integrasi Hasil KLHS kedalam KRP RDTR
Apakah pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam KLHS disebutkan dengan jelas?	Ya	Meliputi seluruh pemangku kepentingan antara lain berasal dari akademisi, praktisi, LSM dan SOPD Kabupaten Cilacap dan Kecamatan Maos.
Apakah semua pemangku kepentingan yang dilibatkan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan selama proses KLHS? Jika tidak, pemamngku kepentingan yang mana yang tidak dilibatkan?	Ya	Dalam semua tahap, semua pemangku kepentingan diberi kesempatan memberi masukan dalam proses KLHS.

Penilaian : Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Apakah semua dokumen terkait KLHS dapat diakses oleh publik selama dan setelah proses KLHS?	Ya	Materi pembahasan KLHS selama proses penyusunan KLHS dipublikasikan pada saat FGD dan Konsultasi Publik untuk dapat diberikan masukan. Dokumen hasil KLHS yang telah divalidasi akan dipublikasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.

Instrumen Pengawasan Mutu Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RDTR OSS

No	Kegiatan	Nilai*				Keterangan**
		1	2	3	4	
1.	KLHS dalam Persiapan Penyusunan RDTR OSS					
	1.1. Membentuk Pokja PL yang komposisi keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan daerah	1				Pokja PL Penyusun KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap terdiri dari unsur Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup berserta Kabid dan Kasinya ; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berserta Kabid dan Kasinya; Dinas Pengairan; Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda; Dinas Bina Marga; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perindustrian; Dinas Perdagangan; Dinas Perhubungan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Kantor Pertanahan; Camat Maos; Tenaga Ahli penyusun KLHS, Pemerhati Lingkungan, Unsur masyarakat.
	1.2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang meliputi : (a) latar	1				

No	Kegiatan	Nilai*				Keterangan**
		1	2	3	4	
	belakang, (b) tujuan dan sasaran, (c) lingkup kegiatan, (d) hasil yang diharapkan, (e) rencana kerja dan metode pengkajian,(f) tenaga ahli yang diperlukan, dan (g) waktu dan pembiayaan.					
	1.3. Mengidentifikasi dan melibatkan nara sumber yang sesuai dengan cakupan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan	1				
	1.4. Melakukan Pra Pelingkupan untuk memperoleh daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu lingkungan, isu sosial budaya, isu ekonomi)	1				
	1.5. Mengidentifikasi dan menganalisis Pemangku Kepentingan sesuai dengan cakupan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan.	1				
2.	Peran serta Pemangku Kepentingan					
	2.1 Pelibatan seluruh unsur pemangku kepentingan yang relevan (pemerintah, organisasi non pemerintah, academia, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan)	1				Unsur yang dilibatkan antara lain Pemerintah Kabupaten Cilacap, Akademisi, Praktisi, LSM dan Tenaga Ahli
	3.1. Pelibatan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLHS: a. Pelingkupan, b. <i>Baseline Data</i> , c. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan d. Pengkajian Pengaruh	1				Pelibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk akademisi dan LSM dilakukan pada setiap tahapan proses KLHS.

No	Kegiatan	Nilai*				Keterangan**
		1	2	3	4	
	e. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif					
	f. Perumusan Rekomendasi					

*Nilai:

1 = Tercakup Sepenuhnya

2 = Tercakup Sebagian Besar

3 = Tercakup Sebagian Kecil

4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

** Keterangan:

Tuliskan catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan saran perbaikan terkait dengan nilai yang diberikan (terutama bila nilai yang diberikan 3 atau 4).

a/n BUPATI CILACAP
SEKRETARIS DAERAH

AWALUDDIN MUURI, AP, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 199412 1 001



DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN
CILACAP



KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RDTR

Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perkotaan Maos
Kabupaten Cilacap

LAMPIRAN **9**

VALIDASI

KLHS



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Setiabudi Nomor 201 B Semarang Kode Pos 50263 Telepon 024 - 7478813

Faksimile 024 - 7475453 e-mail : dlhk@jatengprov.go.id

website: <http://www.dlhk.jatengprov.go.id>

Nomor : 660.1/00848
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Validasi KLHS RDTR
Kawasan Perkotaan Maos
Tahun 2023-2043

Semarang, 26 Januari 2023

Kepada :

Yth. BUPATI CILACAP

di-

Cilacap

Menindaklanjuti Surat Bupati Cilacap Nomor : 660.1/00289/24/CLP tanggal 19 Januari 2023 perihal : Permohonan Validasi KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos Tahun 2023-2043, telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.69 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yaitu :
 - a. Dokumen rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Maos Tahun 2023-2043;
 - b. Laporan KLHS (Hasil Penjaminan Kualitas); dan
 - c. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi Penyusun/Tenaga Ahli.
2. Hasil telaahan terhadap proses penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan (Isu PB) sebagaimana Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 telah memperhatikan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2);
 - b. Tahap identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup sudah dilakukan sebagaimana Pasal 7 huruf c dan Pasal 11;
 - c. Tahap kajian materi muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program, rumusan alternatif dan rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan sebagaimana Pasal 13, 15 dan Pasal 16.
3. Tahap penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara mandiri dan telah memperhatikan sinkronisasi antara hasil kajian pasal 13 PP No. 46 Tahun 2016 dengan rumusan alternatif dan rekomendasi perbaikan Kebijakan, Rencana dan/atau Program.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami sampaikan sebagai berikut:

1. Penjaminan kualitas KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Tahun 2023-2043 beserta proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Tahun 2023-2043 telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 19 sampai dengan pasal 21 PP No. 46 Tahun 2016 dan **tervalidasi**.

2. Rekomendasi tindak lanjut :

- a. Meminimalisir alih fungsi lahan pertanian terutama pada KRP Pembangunan Jalan Tol dan KRP Kawasan Permukiman sebagai upaya menjaga ketahanan pangan;
- b. Menerapkan teknologi pengelolaan industri yang ramah lingkungan dan rendah polutan untuk mengurangi pencemaran udara dan air serta kerusakan lingkungan;
- c. Menyediakan kawasan ruang terbuka hijau dengan jenis vegetasi yang mampu menyerap polutan untuk mitigasi perubahan iklim;
- d. Meningkatkan kegiatan konservasi dan rehabilitasi pada daerah rawan bencana dan lahan kritis untuk menambah ketersediaan air baku;
- e. Mengintegrasikan seluruh rekomendasi KLHS ke dalam RDTR Kawasan Perkotaan Maos Tahun 2023-2043, serta menyampaikan hasil KLHS RDTR kepada publik.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



WIDI HARTANTO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730405 199803 1 006

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Setiabudi Nomor 201 B Semarang Kode Pos 50263 Telepon 024 - 7478813

Faksimile 024 - 7475453 e-mail : dlhk@jatengprov.go.id

website: <http://www.dlhk.jatengprov.go.id>

BERITA ACARA

Nomor: 660.1/00847

RAPAT VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN MAOS TAHUN 2023-2043

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang diselenggarakan secara *hybrid* yaitu bertempat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan melalui *zoom meeting* telah terlaksana Rapat Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos Tahun 2023-2043. Rapat dihadiri oleh :

- A. Pimpinan Rapat : Irma Damayanti, S.Hut, MM
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
- B. Peserta :
- Perwakilan Tim Validasi KLHS Provinsi Jawa Tengah;
 - Perwakilan PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.
 - Perwakilan Pokja KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos;
 - Perwakilan Tim Teknis Penyusunan RDTR Perkotaan Maos.

Adapun hasil Rapat Validasi KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Tahun 2023-2043 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Tahun 2023-2043 sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan sudah sesuai dengan pedoman terbaru Penyusunan KLHS RTRW/RDTR Provinsi Jawa Tengah;
2. Mengupayakan pencapaian luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan peraturan;
3. Memastikan data penduduk yang digunakan sebagai *database* perhitungan daya dukung dan daya tampung sudah sesuai dengan data BPS Kabupaten Cilacap;

4. Melakukan perbaikan kualitas lingkungan terhadap wilayah yang mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. Saran dan masukan peserta rapat Validasi serta daftar hadir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda



IRMA DAMAYANTI, S.Hut, M.M.
NIP. 19750513 200003 2 004

Perwakilan Pokja KLHS RDTR
Kawasan Perkotaan Maos



SRI MURNIYATI, S.T., M.Si.
NIP. 19700910 199703 2 005

Mengetahui,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah



WIDI HARTANTO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730405 199803 1 006

Perwakilan Tim Teknis Penyusunan RDTR
Perkotaan Maos



HAMZAH SYAFROEDIN, S.T., M.M.
NIP. 19700103 199803 1 010